



ISSN Cetak : 1978-4880

Khazanah

Jurnal Pengembangan Kearsipan



**Dari Sumber Informasi ke Galeri Pengetahuan
Pendekatan Kearsipan Pada Penyelenggaraan Pameran Arsip Statis**

**Arsip dan Jaringan Intelektual
Studi tentang Koleksi Nishijima di Universitas Waseda Jepang**

Impementasi Program Arsip Masuk Desa

**Menelusuri Jejak UGM dalam Reformasi Indonesia
Dari Sumber Arsip Statis Khazanah Arsip UGM**

**Academic Archives: Managing The Next Generation of College and
University Archives, Records, and Special Collections**

KHAZANAH	Volume 10	Nomor 1	Halaman 1-71	Mei 2017	ISSN Cetak: 1978-4880
----------	--------------	------------	-----------------	----------	--------------------------

Arsip Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur: Gedung L7 Lantai 3 (Komplek Perpustakaan UGM) Yogyakarta

ISSN Cetak : 1978-4880

KHAZANAH

Jurnal Pengembangan Kearsipan

Pemimpin Redaksi : Musliichah

Redaktur Pelaksana : Kurniatun dan Ully Isnaeni Effendi

Penyunting : Fitria Agustina dan Herman Setyawan

Desain Grafis dan Fotografer : Dwi Nur Rizkiansyah

IT Support dan Sekretariat : Eko Paris BY dan Anna Riasmiati

Mitra Bebestari

Prof. Dr. Sulistyو Basuki (Prodi Ilmu Perpustakaan FIB Universitas Indonesia)

Drs. Machmoed Effendhie, M.Hum. (Prodi Sejarah FIB UGM)

Waluyo, S.S., M.Hum. (Prodi Kearsipan Sekolah Vokasi UGM)

Drs. Azmi, M.Si. (Arsip Nasional Republik Indonesia)

Diterbitkan oleh:

Arsip Universitas Gadjah Mada

Alamat Redaksi:

Gedung L7 Lantai 3 Komplek Perpustakaan UGM Bulaksumur Yogyakarta

Telepon 0274 6492151, 6492152, 582907; Fax. 0274 582907

Website: jurnal.ugm.ac.id/khazanah; Surel: khazanah@ugm.ac.id

Foto Sampul Depan:

Gerbang UGM Komplek Ngasem Tahun 1950-an

Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan terbit setahun 2 kali (Mei dan November) sebagai media sosialisasi hasil pengkajian dan penelitian bidang kearsipan.

Editorial

- 1-6 **Perjalanan Lahirnya Khazanah:
Jurnal Pengembangan Kearsipan**
Musliichah, S.I.P., M.A.

Opini

- 7-16 **Dari Sumber Informasi ke Galeri Ilmu Pengetahuan:
Pendekatan Kearsipan pada Penyelenggaraan
Pameran Arsip Statis**
Adhie Gesit Pambudi, S. Sos., M.A.

- 17-28 **Arsip dan Jaringan Intelektual:
Studi tentang Koleksi Nishijima
di Universitas Waseda Jepang**
Arif Rahman Bramantya, S. S., M. Hum.

- 29-49 **Implementasi Program Arsip Masuk Desa**
Drs. Burhanudin Dwi Rohmatun

Telisik

- 50-67 **Menelusuri Jejak UGM
dalam Gerakan Reformasi Indonesia
Dari Sumber Arsip Statis Khazanah Arsip UGM**
Musliichah, S.I.P., M.A.

Resensi

- 68-71 **Academic Archives:
Managing The Next Generation of Collage
and University Archives, Records, and Special Collections**
Suprayitno, S.I.P

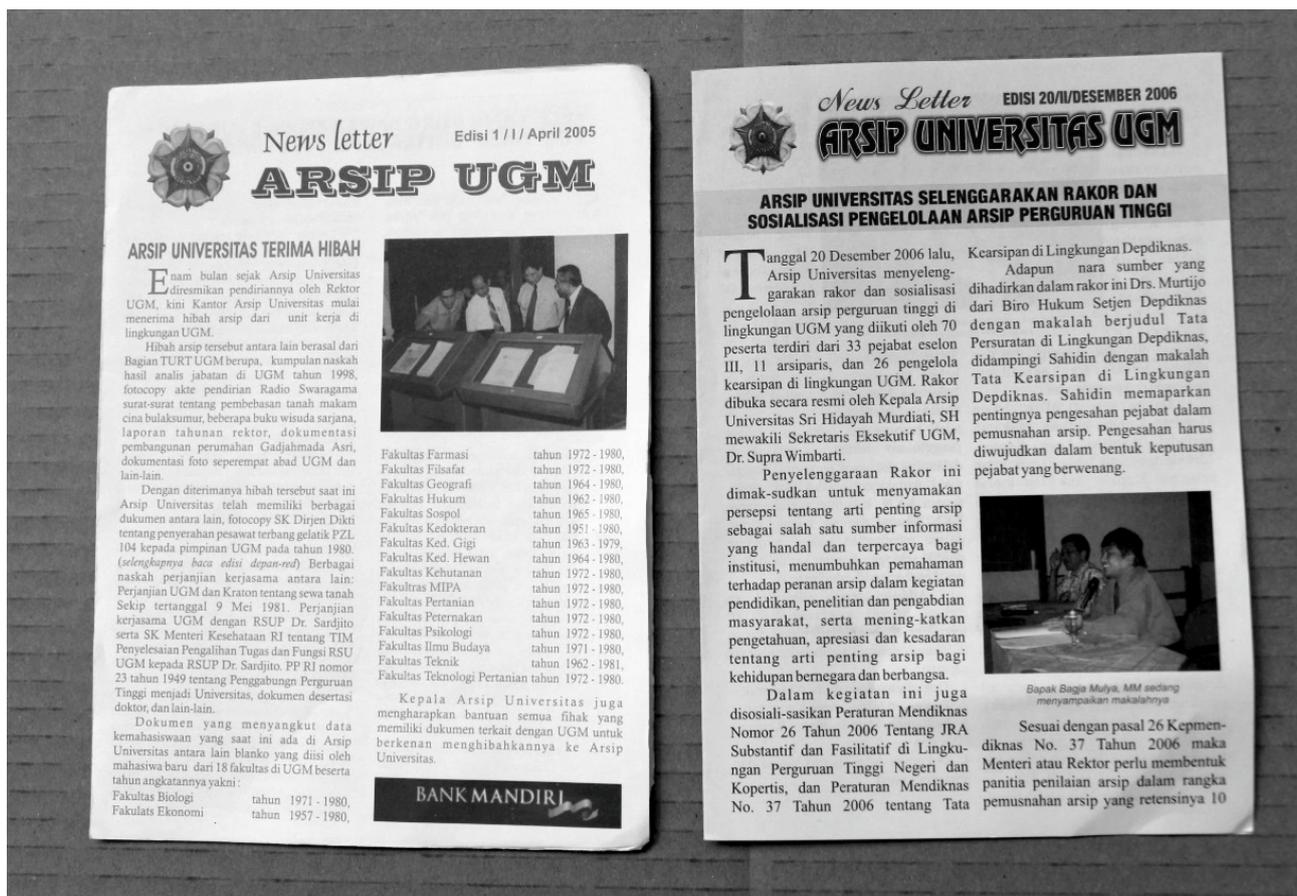
**Perjalanan Lahirnya Khazanah:
Jurnal Pengembangan Kearsipan**

Musliichah, S.I.P., M.A.

Arsip UGM sebagai lembaga kearsipan perguruan tinggi pertama di Indonesia memiliki visi menjadi pusat pengembangan dan layanan informasi kearsipan dalam menunjang universitas riset kelas dunia dan bertata kelola baik. Salah satu misi Arsip UGM adalah melaksanakan dan mengoptimalkan layanan internal dan eksternal informasi kearsipan. Dalam rangka memberikan layanan yang optimal di bidang kearsipan kepada lingkungan internal UGM dan masyarakat eksternal, Arsip UGM mengembangkan program publikasi kearsipan.

Tujuan dari program publikasi kearsipan adalah menyosialisasikan kearsipan dan melakukan edukasi kearsipan kepada publik baik internal maupun eksternal UGM.

Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan merupakan salah satu media publikasi kearsipan yang dikembangkan oleh Arsip UGM. Media publikasi ini merupakan pengembangan dari News Letter yang diterbitkan Arsip UGM sejak April 2005 yang terbit tiap bulan hanya berupa 1 lembar kertas 4 halaman. News Letter dalam format ini terakhir diterbitkan pada Desember 2006. Januari 2007 News Letter diubah tampilannya menjadi buku mini dicetak berwarna dengan jumlah halaman lebih dari 4 halaman. News Letter dengan format ini terbit hingga Mei 2008.



Gambar 1. News Letter 2 lembar edisi pertama April 2005 dan Edisi terakhir Desember 2006

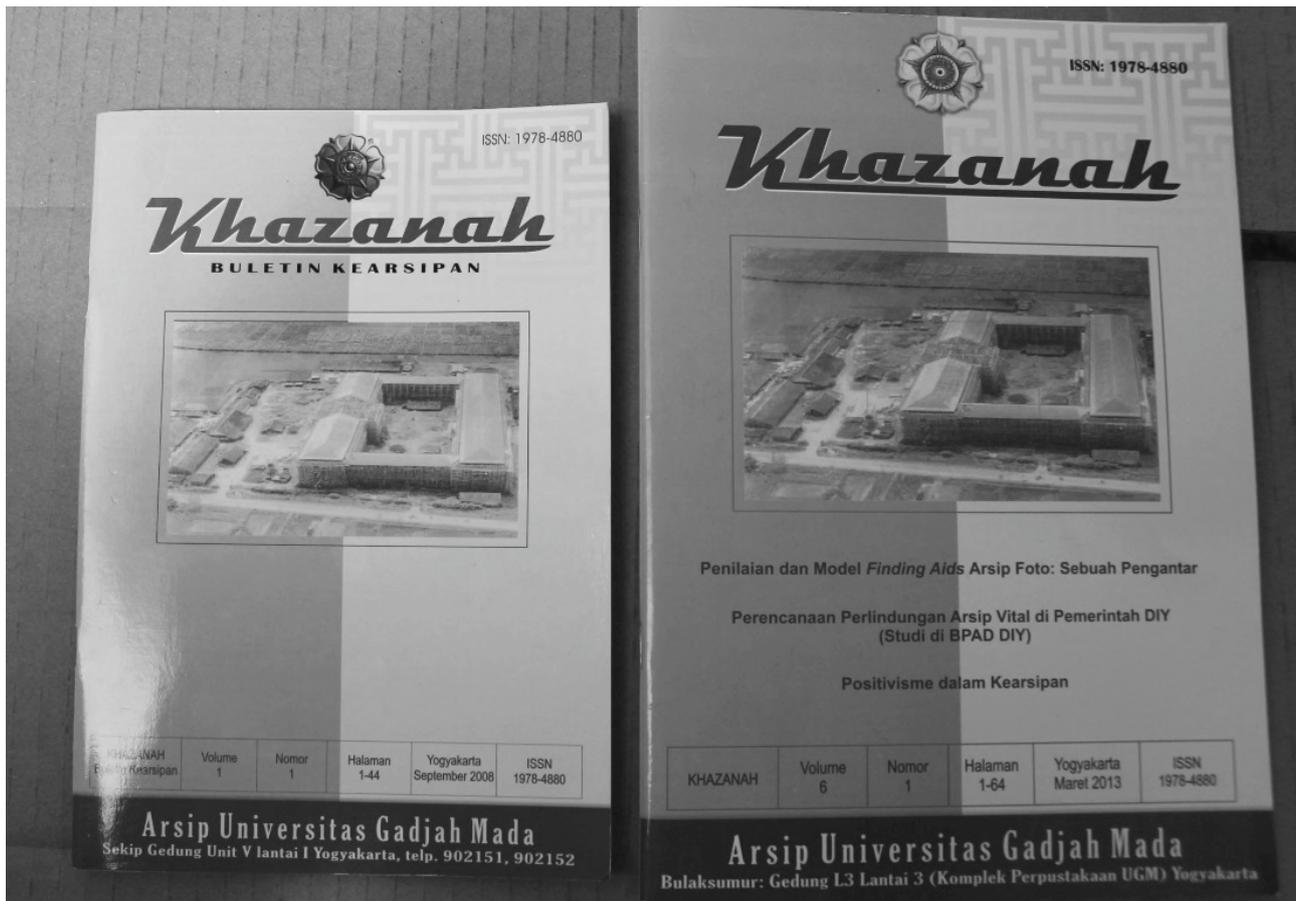


Gambar 2. *News Letter* bentuk buku (edisi pertama Januari 2007 dan terakhir Mei 2008)

Tahun 2007 Arsip UGM mengajukan ijin ke PDII LIPI untuk mengembangkan *News Letter* menjadi Jurnal. PDII LIPI menyetujui permohonan pengembangan *News Letter* menjadi jurnal dengan nama “*Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*” dengan nomor ISSN 1978-4880. Ijin PDII LIPI tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan media publikasi pengganti *News Letter*.

Volume pertama terbit pada September 2008. Pertama kali terbit tahun 2008, media ini belum sepenuhnya berformat jurnal sehingga nama yang digunakan adalah *Khazanah: Buletin Kearsipan*. *Khazanah* terbit 3 kali dalam setahun yaitu Maret, Juli dan November. Tahun 2013 terjadi perubahan pada penerbitan *Khazanah*.

Format *Khazanah* sudah mengarah pada jurnal dengan layout dan bobot isi artikel ditingkatkan. Nama *Khazanah* pada terbitan volume 6 Nomor 1 Maret 2013 berubah menjadi *Khazanah* (tidak diikuti sub judul *Buletin Kearsipan*).



Gambar 3. Buletin Vol. 1 September 2008 dan Foto Buletin Vol. 6 No 1 Maret 2013

Khazanah memuat beberapa artikel dalam 3 kolom/rubrik. Pada edisi pertama September 2008 berisi dua kolom yaitu Opini dan Resensi. Opini berisi artikel hasil kajian dan penelitian kearsipan sedangkan Kolom Resensi berisi review atau resensi buku kearsipan. Volume 4 Nomor 1 Maret 2011, Khazanah menambah 1 kolom lagi yaitu Telisik yang

berisi artikel hasil penelitian tema tertentu yang bersumber pada khazanah arsip statis yang tersimpan di Arsip UGM. Jumlah artikel pada kolom Telisik pada volume 4 nomor 3 November 2011 ditambah menjadi 2 artikel. Tahun 2014 sejak terbitan nomor pertama jumlah artikel pada Kolom Telisik dikurangi menjadi 1.

ISSN : 1978-4880	<i>Khazanah Buletin Kearsipan</i>
KHAZANAH BULETIN KEARSIPAN ARSIP UNIVERSITAS GADJAH MADA	Vol. 1, No.1, September 2008
Volume 1, Nomor 1, September 2008	ISSN: 1978-4880
PENGELOLA BULETIN KHAZANAH	DAFTAR ISI
<p>Pelindung: Rektor Universitas Gadjah Mada. Penasehat Ahli: Suhartono, Julianto Ibrahim. Penanggung Jawab: Machmoed Effendhie. Pemimpin Redaksi: Ari Basuki. Anggota Redaksi: Suwami, Al. Anung Nugroho, Uly Isnaeni Effendi, Muslichah, Zaenudin. Sekretariat: Anna Rasmilati, Kumiatun. Bendahara: Zudimat, Filria Aguslina. Lay Out: Heru Subekti, Herman Setyawan. Distribusi: Heri Santosa, Agustinus Mugiyono, Isti Maryatun</p>	<p style="text-align: center;">Prakata</p> <p>Dari Redaksi 2</p> <p style="text-align: center;">Opini</p> <p>Arsip dan Arsiparis Indonesia (Sebuah Catatan Kecil) <i>Machmoed Effendhie</i> 3</p> <p>Sistem Kearsipan di Indonesia <i>Waluyo</i> 12</p> <p>Eksplorasi Arsip untuk Penelitian dan Transfer Pengetahuan bagi Masyarakat <i>Ari Basuki</i> 20</p> <p>Hak Cipta dan Kebutuhan Informasi; Perlakuan terhadap Arsip Statis di ANRI <i>Kihanta dan Bambang P. Widodo</i> 27</p> <p style="text-align: center;">Resensi Buku</p> <p>Memahami Dasar Pemikiran dan Penyelenggaraan Arsip Universitas <i>Machmoed Effendhie</i> 35</p> <p style="text-align: center;">Informasi</p> <p>Arsiparis UNS berkunjung ke Arsip Universitas Gadjah Mada 41</p> <p>Magang Dosen Muda Dikti 41</p> <p>Kepala Arsip UGM diundang BPPI Wiayah IV Yogyakarta 42</p> <p>Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Kearsipan Kunjungi UGM 43</p>
Diterbitkan oleh: Arsip Universitas Gadjah Mada	
Alamat Redaksi : Sekip Gedung Unit V lantai 1 Yogyakarta Tel: (0274) 902151, 902152 Fax: (0274) 902152 Wetsite: arsip.ugm.ac.id, e-mail: arsip@ugm.ac.id	
Gambar Sampul Depan: Gedung Pusat UGM tahun 1956	
<p>KHAZANAH diterbitkan tiga kali setahun sebagai media sosialisasi dan pembahasan dalam bidang kearsipan. Memuat artikel, berita kegiatan dan resensi buku seputar kearsipan. Redaksi mengundang para penulis untuk mengirimkan naskah berupa kajian lapangan, studi pustaka, hasil seminar, atau opini bebas. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan yang akan dimuat sepanjang tidak mengubah isinya.</p>	

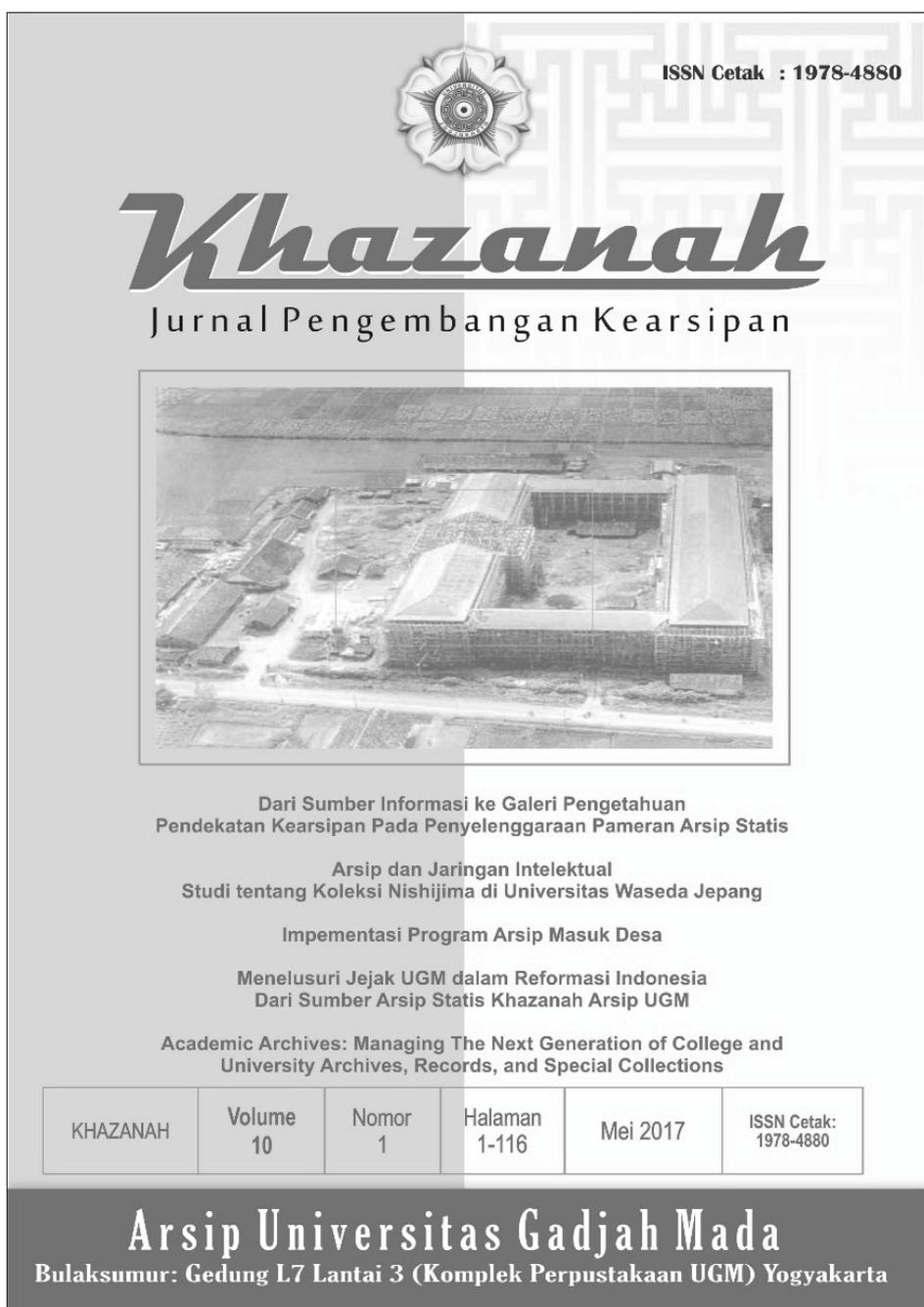
Gambar 4. Daftar Isi Khazanah Vol. 1 September 2008

ISSN : 1978-4880	<i>Khazanah Buletin Kearsipan, Vol. 4, No. 1 Maret 2011</i>
DAFTAR ISI	Vol. 4, No. 1, Maret 2011
ISSN 1978-4880	<i>Khazanah Buletin Kearsipan, Vol. 4, No. 3 November 2011</i>
DAFTAR ISI	Vol. 4, No. 3, November 2011
Prakata	Prakata
Dari Redaksi 2	Dari Redaksi 2
Opini	Opini
Pengembangan Manajemer Kearsipan Perguruan Tinggi <i>Yohannes Suraja</i> 3	Mengoptimalkan Peran Arsip Universitas dengan <i>Archival Metrics</i> <i>Herman Setyawan</i> 3
Pemanfaatan Blog Tematik Kearsipan <i>www.duniaarsip.com</i> sebagai Media Penyebaran Informasi Kearsipan <i>Ades Hendra Maryadi</i> 14	Upaya Pemerintah Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kearsipan <i>Anna Nunuk Nuryani</i> 11
Manajemen Arsip Dinamis Berbasis Teknologi Informasi <i>Ahmad Rizani</i> 25	Tellistik
Tellistik	Menelusuri Jati Diri Universitas Gadjah Mada dalam Lembaran Arsip <i>Zaenudin</i> 21
Peran UGM dalam Pelestarian Pesut Mahakam <i>Muslichah</i> 42	Sejarah Dibalik Nama dan Tanggal Kelahiran Universitas Gadjah Mada <i>Muslichah</i> 32
Resensi Buku	Resensi
Menapak Jejak Kearsipan <i>Zaenudin</i> 46	Mengurus Arsip Gereja <i>Suprayitno</i> 38
Informasi	Informasi
Pelepasan Pegawai 49	Proses Implementasi ISO 9001:2008 di Arsip UGM 44
Regrouping Tahap V 49	Magang D3 Kearsipan UGM di Arsip UGM 45
Akuisisi Arsip di Lingkungan UGM 50	UGM Pertahankan Predikat Pengelola Kearsipan Terbaik Kemdiknas Tahun 2011 46
Penilaian Arsip Indaktif Direktorat Renbang 51	Pendampingan dan Pengembangan <i>Records Center</i> 48
Arsip UGM Terima Kunjungan Arsiparis LPI 51	Dies Natalis, Syawalan dan Penyerahan Piagam Kompetisi Unit Kearsipan Terbaik Tingkat Kemdiknas 49
Arsip UGM Terima Hibah Aplikasi SIKD dari ANRI 52	Kepala Bidang Baru di Arsip UGM 50
	1

Gambar 5. Daftar Isi Khazanah Vol. 4 Nomor 1 Maret dan Nomor 3 November 2011

Tahun 2017, Arsip UGM memutuskan untuk menerbitkan Khazanah sesuai dengan perijinan pertamanya yaitu sebagai jurnal. Nama yang digunakan untuk terbitan ini sesuai dengan nama yang diajukan dan disetujui pertama kali oleh PDII LIPI yaitu Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan ini diterbitkan dalam dua versi yaitu online

dan cetak. Sejak 2017 juga dilakukan perubahan jumlah berkala terbitan. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan diterbitkan 2 kali dalam setahun yaitu Mei dan November. Khazanah menyajikan 5 artikel dalam 3 kolom yaitu 3 artikel pada Kolom Opini, 1 artikel pada Kolom Telisik, dan 1 artikel pada Kolom Resensi.



Gambar 6. Cover Khazanah Vol. 10 Nomor 1 Mei 2017

Khazanah selama ini didistribusikan ke internal dan eksternal UGM. Internal UGM meliputi pimpinan unit kerja, perpustakaan dan arsiparis di lingkungan UGM. Eksternal UGM meliputi lembaga kearsipan nasional, lembaga kearsipan tingkat propinsi, lembaga kearsipan tingkat kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri dan swasta tidak hanya di pulau jawa, kementerian, dan lembaga-lembaga lain baik BUMN maupun swasta yang menjadi relasi

Arsip UGM. Penyebaran Khazanah cetak menggunakan jasa pos untuk eksternal UGM, sedangkan internal UGM dikirimkan oleh petugas ekspedisi dan jasa pengiriman Gama Logistik UGM. Meskipun Khazanah belum diterbitkan secara online akan tetapi format PDF Khazanah sudah di-upload di laman Arsip UGM www.arsip.ugm.ac.id sejak tahun 2011 sehingga dapat diakses secara online oleh masyarakat luas.



Gambar 7. Khazanah di Laman lamaArsip UGM

Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan diterbitkan untuk membantu mengembangkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan dan hasil-hasil kajian maupun penelitian di bidang kearsipan dalam rangka mengembangkan ilmu kearsipan di Indonesia.

Artikel-artikel yang disajikan dalam Khazanah diharapkan dapat menjadi sarana belajar dan berbagi informasi dan pengalaman di bidang kearsipan.

**DARI SUMBER INFORMASI KE GALERI PENGETAHUAN
PENDEKATAN KEARSIPAN PADA PENYELENGGARAAN
PAMERAN ARSIP STATIS**

Adhie Gesit Pambudi, S.Sos, M.A.

**Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Sekretariat Utama ANRI
(g351t@yahoo.com)**

INTISARI

Dalam konsepsi kearsipan, pameran arsip statis sebenarnya bukan merupakan kegiatan fungsi inti dari sebuah lembaga kearsipan. Namun demikian, pameran arsip statis dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai apabila pameran arsip statis dapat mentransformasikan arsip sebagai sumber informasi menjadi sumber pengetahuan. Penelitian ini mengelaborasi prinsip dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam penyelenggaraan pameran arsip statis yang nantinya dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat. Penelitian ini hanya membahas pada pendekatan kearsipan dalam penyelenggaraan pameran arsip dan tidak membahas aspek lain seperti desain atau estetika.

Kata kunci: arsip statis, pemanfaatan arsip, pameran arsip statis

ABSTRACT

Conceptually, archival exhibition is not a part of core functions of an archival organization. However, it could give an enormous benefit for the community when it could transform archives from just a source of information into a source of knowledge. This study elaborates principles and ideal stages that should be conducted by archival institution in organizing archival exhibitions so that it could give knowledge to the audiences. It focuses on a proper archival management approach in conducting archival exhibition rather than other aspects such as design or estétique.

Keywords: archives, archives publication, archival exhibition

PENGANTAR

Dewasa ini, manfaat dari arsip khususnya arsip statis dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan usia. Selain sebagai memori kolektif dan warisan dokumenter, arsip statis merupakan sumber primer dalam penulisan sejarah sebuah bangsa (Jeurgens, C, 2009). Arsip juga dijadikan sumber bahan pembelajaran di dunia pendidikan utamanya terkait mata pelajaran sejarah (Spraggs, G., 2008). Lembaga kearsipan sebagai insitusi kebudayaan yang memiliki fungsi pengelolaan arsip statis harus dapat menjaga kelestarian dan

meningkatkan akses arsip statis kepada pengguna arsip (Rhee, H. L., 2015). Upaya yang dilakukan lembaga kearsipan dalam mempublikasikan khazanah arsip statis dilaksanakan dalam kegiatan pemanfaatan arsip statis yang salah satunya diselenggarakan melalui pameran.

Saat ini, pameran arsip statis sering dijadikan kegiatan unggulan dan populer yang diselenggarakan secara rutin oleh lembaga kearsipan (Howgill, E., 2015). Pameran arsip statis bahkan juga diselenggarakan di level internasional yang dilakukan melalui kerjasama yang melibatkan

lembaga kearsipan dari berbagai negara (Gelfand, A, 2013). Di sisi lain, pameran arsip statis dewasa ini tidak hanya disajikan secara langsung menggunakan etalase, tetapi juga seringkali ditayangkan melalui jaringan internet (Reid, G. A, 1996-2001).

Tujuan utama penyelenggaraan pameran arsip statis adalah untuk meningkatkan pengetahuan (*to educate*) kepada publik melalui penyajian khazanah arsip yang dimiliki lembaga kearsipan (Aubitz, S, et. al., 1990). Kegiatan pameran, arsip statis harus dapat bertransformasi dari sekedar sumber informasi (*information*) menjadi sumber pengetahuan (*knowledge*). Bahkan bukan tidak mungkin pameran arsip statis menjadi rujukan penulisan historiografi. Hal ini disebabkan karena pameran memiliki peran vital sebagai penghubung antara khazanah dan publik terutama dalam menyebarluaskan pengetahuan yang terkandung dalam arsip (Khoon, L.C., et. al, 2008).

Namun demikian, pameran arsip statis yang dilakukan oleh lembaga kearsipan tidak selalu dapat mencapai tujuan utamanya yaitu menjadikan arsip statis sebagai sumber pengetahuan. Kegagalan ini disebabkan karena kurangnya *archival mind-set* (pola pikir secara kearsipan) yang digunakan oleh penyelenggara pameran. Sementara itu, *archival mind-set* merupakan hal yang fundamental dalam penyelenggaraan pameran (Gordon, H, M. 1994). Hal lain penyebab kegagalan adalah penentuan target *audiens* yang kurang tepat yang kemudian mengakibatkan manfaat dari pengetahuan yang terdapat pada pameran tidak sampai ke pihak yang tepat (Lester, P, 2007). Pada proses penyajian, peran kurator yang tidak optimal dalam menyajikan konteks materi arsip juga menjadi penyebab kegagalan yang dominan (Edmonson, R., 2016).

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka dapat diambil hipotesis bahwa pameran arsip statis memiliki peran dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun demikian, apabila penyelenggaraannya yang tidak dilakukan secara

benar, akan mengakibatkan tujuan utama pameran tidak tercapai. Lalu, bagaimana penyelenggaraan pameran arsip statis oleh lembaga kearsipan agar dapat menjadi sumber pengetahuan? Pembahasan pertanyaan tersebut akan diuraikan dalam tulisan ini.

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengelolaan arsip statis pada umumnya dan mengetahui penyelenggaraan pameran oleh lembaga kearsipan agar arsip statis dapat menjadi sumber pengetahuan pada khususnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional yang mengelola arsip statis di level nasional.
2. Lembaga Kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi yang mengelola arsip statis sesuai dengan wilayah kewenangannya.
3. Arsiparis sebagai profesional di bidang kearsipan khususnya yang melakukan pengelolaan arsip statis.
4. Kurator sebagai profesional di bidang permuseuman dan penyelenggaraan pameran.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna serta sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Adapun paradigma yang digunakan adalah konstruktivis dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi terhadap sumber pustaka buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek substansi kearsipan dalam upaya peningkatan kualitas substansi penyelenggaraan pameran arsip statis. Penelitian ini

tidak akan membahas faktor-faktor lain seperti teknik komunikasi, estetika, desain dan hal lainnya yang berada di luar lingkup kearsipan (*archivistiek*).

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan berbagai teori sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran penulisan. Dalam ilmu kearsipan (*archival science*), arsip memiliki pengertian yang sangat beragam (Dryden, J. 2004). Definisi arsip bisa merujuk kepada dokumen/fisik arsip, unit kearsipan, organisasi kearsipan, profesi kearsipan, bangunan penyimpanan arsip, atau koleksi publikasi ilmiah (Pearce-Moses, 2005). Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis (*archives*) menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 memiliki pengertian sebagai arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis merupakan proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Menurut *The Society of American Archivists* (SAA), pengelolaan arsip statis adalah pengelolaan umum terhadap program untuk melakukan penilaian dan akuisisi, pengaturan dan deskripsi, preservasi, autentikasi, dan menyediakan akses terhadap arsip yang bernilai guna permanen (Gosh, M, 2010).

Menurut Pearce-Moses, pameran merupakan sebuah penyajian materi yang terorganisasi (Pearce-Moses, 2005). Sedangkan pameran arsip statis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam rangka mempublikasikan khazanah arsip yang dimiliki (Lester, P, 2007). Pameran dapat digolongkan sebagai jenis akses arsip statis secara proaktif karena pada umumnya penyelenggaraannya diprakarsai oleh lembaga kearsipan (Edmonson, R., 2016:24).

Pameran menjadi alat untuk menggugah ketertarikan publik terhadap khazanah arsip, memperluas *audiens*, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya dokumenter mereka (Lerette, B. T., 2002:8). Namun demikian, pameran arsip statis bukan merupakan bagian dari fungsi inti (*core functions*) dari lembaga kearsipan dalam melakukan pengelolaan arsip statis. Keberhasilan penyelenggaraan berbagai kegiatan pameran arsip akan menjadi tidak berarti (*meaningless*) apabila sebuah lembaga kearsipan gagal dalam melaksanakan kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan layanan akses arsip statis yang merupakan *core functions* lembaga kearsipan (Gordon, H, M. 1994:4-5). Namun demikian, hal ini tidak menjadikan pameran arsip statis sebagai kegiatan pelengkap. Pameran arsip statis dapat menjadi kegiatan strategis apabila kehadirannya dapat memberikan pengetahuan kepada pengunjung sekaligus mendorong penyerahan arsip statis oleh entitas pencipta arsip, pengolahan arsip statis, peningkatan preservasi arsip statis, dan penyediaan akses dan layanan arsip statis.

Pameran arsip statis memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan pameran yang diselenggarakan oleh Museum dan Perpustakaan. Perbedaan yang paling menonjol adalah pameran kearsipan tidak boleh meninggalkan prinsip dasar kearsipan yaitu *provenance* dan *original order*. Berbeda dengan arsip, museum menggunakan

pendekatan *collection policy* dan obyek budaya sebagai dasar penyelenggaraan pameran dengan isu *original* dan *provenance* tidak menjadi faktor determinan. Berbeda dengan kedua saudaranya, pameran perpustakaan lebih mengutamakan pendekatan tema daripada *provenance* karena karakteristik bahan pustaka yang bervariasi (Gordon, H, M. 1994:31).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tujuan Utama: Memberikan Pengetahuan

Pada dasarnya setiap penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk apapun, pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan ini sangat berpengaruh pada penentuan tema yang akan digunakan dan target *audiens* yang akan menjadi sasaran kegiatan. Demikian pula dengan pameran arsip statis, tujuan pameran ini biasanya ditentukan oleh manajemen dan harus benar-benar didefinisikan jelas dan konkret. Adapun tujuan utama (*primary objective*) dari setiap penyelenggaraan pameran arsip statis adalah memberikan pengetahuan (*knowledge*) kepada pengunjung yang mendatangi galeri pameran (Keith, P, 2014:29). Sebuah pameran harus dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan sejarah dan warisan budaya bangsa (Khoo, L.C., et. al, 2008:9). Tujuan ini harus selalu menjadi landasan fundamental penyelenggaraan pameran arsip statis.

Ketika sebuah pameran arsip statis tidak dapat menjawab tujuan utama, maka esensi penyelenggaraannya menjadi tidak berarti. Hal ini disebabkan tujuan pemanfaatan arsip statis adalah menyajikan arsip statis dari yang bersifat informasi menjadi sebuah pengetahuan bagi pengunjung. Pameran tidak hanya sekedar menampilkan material arsip, tetapi semestinya mengilustrasikan atau menggambarkan gagasan atau sebuah proses yang terjadi di balik keberadaan material tersebut. Lebih jauh, pameran harus dapat memberikan pemahaman

kepada pengunjung tentang materi yang dipamerkan dan hubungannya dengan kehidupan mereka.

Namun demikian, untuk dapat mengubah informasi arsip menjadi pengetahuan dalam bentuk pameran bukan merupakan hal yang mudah. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya tentang masa lampau melalui penerbitan naskah sumber, misalnya akan jauh lebih mudah karena narasi yang dituliskan dapat membentuk pengetahuan pembaca.

Selain memberikan pengetahuan kepada pengunjung sebagai tujuan utama, pameran arsip statis secara praktis juga bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip statis. Oleh karena itu, pameran arsip statis hendaknya dapat meningkatkan kesadaran penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Dengan demikian, kegiatan pameran memiliki peran dalam mendukung kegiatan akuisisi oleh lembaga kearsipan. Kegiatan pameran harus dapat menciptakan efek persuasif kepada masyarakat khususnya pencipta arsip untuk menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan. Hal ini dilakukan dengan cara menyajikan arsip hasil akuisisi sebagai penghargaan kepada pencipta arsip yang menyerahkan arsip mereka kepada lembaga kearsipan (Rabins, J, 1980:31).

Pameran arsip statis dapat mendorong kegiatan pengolahan arsip statis oleh lembaga kearsipan. Hal ini disebabkan proses penelusuran materi dalam rangka pameran sangat bertumpu pada kualitas sarana penemuan kembali arsip statis yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan arsip statis. Semakin banyak khazanah yang sudah diolah dan memiliki sarana penemuan kembali, maka akses terhadap khazanah arsip statis lembaga kearsipan menjadi semakin tinggi.

Penyelenggaraan pameran arsip statis juga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan preservasi arsip statis. Kualitas fisik dan informasi

materi arsip statis yang ditampilkan dalam pameran bisa menggambarkan performa lembaga kearsipan dalam melakukan preservasi arsip statis seperti penyimpanan, restorasi, digitalisasi, dan *risk assesment*. Hal ini disebabkan kondisi arsip merupakan syarat mutlak bagi lembaga kearsipan untuk menampilkan arsip statis dalam pameran.

Penyelenggaraan pameran juga diharapkan mendorong penggunaan arsip statis oleh pengguna arsip dalam rangka penelitian dan riset. Oleh sebab itu, semestinya pameran juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke ruang baca dan peminjaman arsip statis di lembaga kearsipan. Pameran adalah wahana yang dapat memotivasi manusia untuk belajar tentang masa lalu dan sejarah. Dengan demikian, tidak salah apabila penyelenggaraan pameran arsip statis dapat mempengaruhi penulisan historiografi sebuah bangsa.

Namun demikian, lembaga kearsipan juga tidak dilarang untuk menentukan tujuan lain setelah tujuan utama. Lembaga kearsipan dapat menentukan tujuan lain (*secondary objectives*) yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pameran seperti menjadikannya sebagai alat diplomasi kebudayaan (*cultural diplomacy*), sarana hiburan (*entertainment*), pengenalan/pengakuan (*acknowledgement*), pencitraan (*imaging*), pengenalan tentang kearsipan statis (*archival works*), dan lain-lain.

Penentuan Jenis Pameran: Konsep Dasar

Hal yang paling mendasar yang dilakukan pada persiapan penyelenggaraan pameran adalah menentukan jenis pameran yang akan dilaksanakan. Secara konseptual menurut Heather Marrie Gordon, terdapat empat jenis pameran yang dapat diselenggarakan oleh lembaga kearsipan antara lain: (Gordon, H, M. 1994:40-110)

1. Pameran Tematis

Pameran jenis ini sangat sering diselenggarakan oleh lembaga kearsipan

ataupun museum. Secara garis besar, pameran tematis bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengunjung tentang sebuah subjek/tema tertentu dari perspektif sejarah. Di sisi lain, pameran tematis juga harus dapat menyajikan alur cerita yang menarik namun disajikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai secara intelektual. Pameran tematis menitikberatkan pada subjek/tema tertentu yang dibatasi oleh ruang lingkup yang ditentukan oleh lembaga kearsipan. Ruang lingkup ini menjadi batasan yang digunakan dalam menentukan materi dan teknik penyajian yang digunakan dalam pameran. Batasan yang dapat digunakan dalam pameran tematis dapat berupa topik, kurun waktu, lokasi geografis, peristiwa, tokoh, dan indikator lain yang dianggap spesifik oleh lembaga kearsipan. Karena sifatnya yang spesifik, lembaga kearsipan harus dapat menghindari untuk menampilkan materi-materi yang memungkinkan sebuah pameran keluar dari tema yang diusung.

2. Pameran Peringatan

Pameran arsip statis jenis ini dilaksanakan untuk memperingati sebuah peristiwa dalam sejarah. Pameran ini juga digunakan untuk merayakan hari jadi sebuah organisasi atau merayakan hari besar baik yang bersifat kenegaraan, keagamaan, dan lain sebagainya. Pameran ini menitikberatkan pada peristiwa atau kejadian di masa lalu yang menjadi tonggak sejarah sehingga layak diberikan penghormatan oleh generasi masa kini. Tantangan terbesar bagi lembaga kearsipan dalam menyelenggarakan pameran ini adalah menentukan teknik penyajian materi yang menarik terhadap hal yang bersifat rutin diperingati setiap tahunnya. Oleh sebab itu, lembaga kearsipan harus dapat eksplorasi terhadap khazanah arsip yang dimiliki dan menampilkannya dengan metode

yang baru agar tidak terjadi kebosanan bagi para pengunjung. Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga kearsipan dalam menyelenggarakan pameran peringatan adalah menghindari pemilihan materi yang cenderung mengangkat subjek sejarah yang berkaitan dengan hal yang diperingati/dirayakan. Hal ini akan menimbulkan kebingungan bagi para pengunjung karena jenis pameran akan cenderung berubah menjadi tematis.

3. Pameran Institusional

Pameran ini digunakan untuk mempromosikan lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip statis dan khazanah arsip statis yang dimiliki. Hal yang membedakan pameran jenis ini dengan pameran kelembagaan pada umumnya adalah pada tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang khazanah arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi, dan dilayankan oleh lembaga kearsipan. Salah satu contoh dari pameran ini adalah pameran yang menampilkan khazanah arsip statis milik sebuah lembaga kearsipan yang baru saja diakuisisi (*new acquisition*). Hal ini menunjukkan peran lembaga kearsipan sebagai penyelamat dan pelestari memori kolektif bangsa. Pameran ini juga menekankan pada penyebarluasan informasi tentang misi organisasi dan kegiatan kearsipan tertentu. Namun demikian, pameran jenis ini pada umumnya hanya menarik untuk kalangan tertentu. Untuk *audiens* yang tidak memiliki kepentingan dengan lembaga kearsipan atau dunia kearsipan, pameran ini cenderung membosankan. Oleh sebab itu, lembaga kearsipan yang menyelenggarakan pameran jenis ini harus dapat mengemas informasi yang disajikan agar timbul ketertarikan dari pengunjung dan dapat memberikan pengetahuan kepada audiens.

4. Pameran Fungsional

Pameran jenis ini menitikberatkan pada penyebarluasan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan. Salah satu aspek utama yang sering diangkat dalam pameran ini adalah pengelolaan arsip statis yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan. Selain itu, pameran ini juga dapat mengangkat peran arsiparis dalam penyelenggaraan kearsipan. Sama halnya dengan pameran institusional, pameran jenis ini pada umumnya hanya menarik untuk kalangan tertentu yang memiliki kepentingan dengan lembaga kearsipan atau dunia kearsipan, pameran ini cenderung tidak menarik bagi masyarakat secara umum.

Penentuan Target *Audiens*: Segmentasi

Penentuan/spesifikasi target *audiens* atau publik sasaran menjadi kunci keberhasilan sebuah pameran arsip statis. Target *audiens* akan muncul setelah tujuan penyelenggaraan pameran ditentukan. Diversifikasi publik sasaran oleh lembaga kearsipan dapat dilakukan dengan berdasarkan latar belakang usia, pendidikan, pekerjaan, geografis, dan lain sebagainya. Sebuah pameran arsip statis tidak akan dapat menjangkau seluruh jenis khalayak (Lester, P, 2007:9). Oleh sebab itu, lembaga kearsipan harus menentukan target *audiens* yang tersegmentasi (*segmented audience*).

Lembaga kearsipan sebaiknya tidak mencampur target *audiens* yang memiliki perbedaan atau karakteristik yang menonjol. Sebuah pameran yang memiliki target *audiens* kalangan profesional tertentu seperti klub pengacara kemungkinan besar materinya tidak akan sesuai apabila pameran tersebut dikunjungi oleh kalangan pelajar dari usia sekolah dasar. Oleh karena itu, lembaga kearsipan juga akan menyesuaikan tempat dan waktu penyelenggaraan pameran sesuai dengan kebutuhan target audiens (Khoon, L.C., et. al, 2008:8).

Penyusunan *Storyline* (Alur Cerita): *Milestone Sejarah*

Perlu ditekankan bagi lembaga kearsipan, penyelenggaraan pameran arsip statis bukanlah merupakan kegiatan yang instan dan sederhana. Dibutuhkan proses intelektual yang tajam agar tujuan utama penyelenggaraan pameran dapat tercapai yaitu mengubah informasi menjadi pengetahuan. Tema yang diangkat dalam pameran arsip statis berkaitan dengan sejarah atau kejadian di masa lampau. Oleh sebab itu, lembaga kearsipan harus merekonstruksi tema yang ditentukan melalui sebuah *storyline* yang disusun berdasarkan *timeline* sejarah (Gordon, S.T, 2008:38). Dengan demikian, terciptalah konteks yang dapat menceritakan arsip yang akan ditampilkan secara kronologis dari perspektif sejarah. Penyusunan *storyline* dilakukan dengan mempertimbangkan aspek *milestone* dari segala peristiwa yang terjadi dalam sejarah yang berkaitan yang akan diangkat. Pengetahuan konteks perspektif kesejarahan ini dapat diperoleh melalui riset yang ilmiah dengan menggunakan berbagai sumber dari mulai arsip, bahan pustaka, dan terbitan sejawan. Dalam penyusunan *storyline* harus terdapat *starting point* dan *ending point* yang jelas karena hal ini merupakan ruang lingkup tema atau peristiwa yang disajikan.

Selain aspek sejarah, penyusunan *storyline* juga mempertimbangkan perspektif kearsipan utamanya terkait dengan pencipta arsip (*creating agencies*) yang terlibat dalam tema yang diangkat. Dengan demikian, pameran arsip statis juga mempertimbangkan *principle of provenance* (prinsip asal usul) dalam proses penyelenggaraannya (Gordon, H, M. 1994:34).

Penelusuran Materi Arsip: Sistematis dan Komprehensif

Dalam penyelenggaraan pameran, lembaga kearsipan harus melakukan penelusuran materi arsip statis secara sistematis dan komprehensif. Oleh

karena itu, pengetahuan yang mendalam (tidak hanya bersifat umum) terhadap khazanah arsip statis (*archival holdings*) yang dimiliki oleh sebuah lembaga mutlak harus dimiliki. Pengetahuan tentang khazanah arsip statis tidak dapat didapatkan secara instan. Perlu pendekatan sistematis untuk bisa memahami kekayaan khazanah arsip statis sebuah lembaga kearsipan. Hal pertama yang harus diketahui adalah skema pengaturan khazanah arsip statis di sebuah lembaga kearsipan (*arrangement in the depository level*). Lembaga kearsipan pada umumnya melakukan pengaturan arsip statis sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang mereka tetapkan. Pengaturan arsip statis di sebuah lembaga biasanya dilakukan secara kronologis, hierarkis, level organisasi, ataupun kombinasi dari beberapa sistem tersebut (Holmes, O. W, 1964:24).

Selain itu, penelusur harus memahami jenis-jenis sarana penemuan kembali yang dimiliki oleh lembaga kearsipan seperti inventaris, daftar arsip, dan *guide* arsip statis. Tidak hanya itu, penelusur harus memahami relasi antara sarana penemuan kembali tersebut (Yakel, E., 2003:65). Untuk dapat melakukan penelusuran arsip yang efektif, penyelenggara pameran harus mengetahui fungsi dari setiap pencipta arsip yang khazanah arsip statisnya terdapat di lembaga kearsipan. Fungsi tersebut akan menjelaskan jenis arsip yang tercipta dari pencipta arsip tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan tentang administrasi pemerintahan dari periode arsip yang tertua hingga yang terbaru.

Selain itu, pengetahuan lain yang dibutuhkan dalam penelusuran arsip adalah tentang sistem kearsipan yang digunakan dalam khazanah arsip statis. Dengan pengetahuan tentang sistem kearsipan yang mendalam, proses penemuan kembali akan menjadi semakin cepat. Pengetahuan dasar tentang konsepsi *records group*, *fonds*, *series*, *files*, dan *item* yang diterapkan pada sarana penemuan arsip statis merupakan aspek fundamental yang harus dimiliki

untuk menelusur arsip dalam rangka pameran (Holmes, O. W, 1964:25).

Penyeleksian Materi Pameran: Imparsialitas

Kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh lembaga kearsipan adalah pada proses penyeleksian arsip hasil penelusuran yang kemudian akan ditampilkan dalam pameran. Pada umumnya, lembaga kearsipan sering mengesampingkan bahwa pameran arsip statis dapat mempengaruhi penulisan sejarah dan historiografi ataupun opini masyarakat tentang suatu peristiwa atau fenomena tertentu dalam sejarah. Lebih jauh, hal ini dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya bangsa (Keteelar, E., 2007:344).

Proses seleksi arsip yang akan dipamerkan harus benar-benar dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti fakta sejarah, imparsialitas, *self-censorship* dan sebagainya. Selain itu, penyeleksian arsip harus dilakukan dengan tidak hanya mempertimbangkan tampilan sebuah arsip yang terlihat lebih menarik daripada arsip yang lainnya. Penyeleksian arsip juga sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan sejarah dan kearsipan yang kuat khususnya terkait tema yang diangkat untuk dapat disajikan secara sistematis dan metodologis melalui pertimbangan konsepsi historiografis (Gelfand, A, 2013:54).

Penyajian Arsip: Tidak Mengandalkan Deskripsi

Tujuan untuk memberikan pengetahuan harus dipegang teguh dalam penyelenggaraan pameran arsip statis. Oleh sebab itu, teknik penyajian arsip tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika. Aspek utama yang harus diperhatikan adalah penyajian informasi arsip. Semakin lengkap informasi yang disajikan dalam pameran maka pengetahuan yang diperoleh pengunjung akan semakin meningkat.

Hal yang perlu diperhatikan adalah arsip tidak dapat bercerita ketika ia berdiri sendiri tanpa disertai konteks. Oleh karena itu, biasanya arsip ditampilkan beserta keterangan yang memberikan pengetahuan bagi pengunjung. Pada umumnya, lembaga kearsipan hanya mengandalkan deskripsi arsip yang terdapat pada sarana penemuan kembali arsip statis baik berupa daftar, inventaris atau *guide* arsip statis. Namun, perlu disadari bahwa sarana penemuan kembali tersebut hanya menyajikan informasi arsip belum menjadi sebuah pengetahuan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyusunan sarana penemuan kembali arsip statis dilakukan oleh arsiparis yang berpedoman pada konteks penciptaan, proses administrasi lembaga pencipta, dan sistem kearsipan yang digunakan. Oleh sebab itu, konteks yang muncul dalam deskripsi adalah konteks secara kearsipan. Untuk dapat meningkatkan status deskripsi dari sekedar informasi menjadi sebuah pengetahuan, perlu adanya tambahan keterangan yang disusun dengan mempertimbangkan aspek sejarah sesuai dengan jenis dan tema yang diangkat dalam pameran agar pengunjung tidak mengalami kebingungan secara kontekstual. Oleh sebab itu, peran dari arsiparis sebagai kurator pameran arsip statis dalam menginterpretasikan konteks sangat tinggi (Edmonson, R., 2016:25).

KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pameran arsip statis bukan merupakan *core function* bagi lembaga kearsipan. Namun demikian, keberadaannya dapat memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat ataupun lembaga kearsipan apabila penyelenggaraannya dilakukan melalui proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah

kearsipan serta dibekali dengan pengetahuan kesejarahan yang kuat.

2. Penyelenggaraan pameran arsip statis harus selalu berpegang teguh pada tujuan utama yaitu memberikan pengetahuan kepada pengunjung dan tidak hanya bersifat informasional.
3. Penyelenggaraan pameran memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat dan penulisan sejarah. Oleh sebab itu, lembaga kearsipan harus benar-benar mempertimbangkan segala faktor yang mempengaruhi dalam proses penyeleksian materi pameran baik yang datang dari luar atau dari dalam organisasi.
4. Penyelenggaraan pameran memperhatikan berbagai aspek seperti tema yang jelas secara ruang lingkup, *audiens* yang tersegmentasi, penelusuran yang sistematis, penyeleksian yang mempertimbangkan aspek sejarah dan imparialitas, serta penyajian yang memperhatikan aspek kontekstual.

Dari kesimpulan tersebut, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap tahapan penyelenggaraan pameran harus dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah kearsipan agar tujuan pameran untuk memberikan manfaat pengetahuan bagi pengunjung dapat tercapai sekaligus memberikan dampak positif terhadap pengelolaan arsip statis yang dilakukan oleh lembaga kearsipan.
2. Penyelenggaraan pameran sebaiknya melibatkan SDM Kearsipan yang memiliki kompetensi tinggi tidak hanya dalam bidang sejarah, tetapi juga menguasai sistem kearsipan baik di masa lalu maupun masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aubitz, S, et. al., 1990, Developing Archival Exhibitions, *Technical Leaflet Series, Number 5* (USA: Mid-Atlantic Regional Archives Conference).
- Dryden, J. 2004. "What's in a Word: The Fuzziness of Archival Terminology", *Journal of Archival Organization*, Vol. 2(1/2), 2004. (USA: The Haworth Press). p. 147-151.
- Edmonson, R., 2016, *Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles* (Paris: UNESCO)
- Gelfand, A, 2013, "If We Build It (and Promote It) They Will Come: History of Analog and Digital Exhibits in Archival Repositories", *Journal of Archival Organization*, Vol. 11, Issue. 1-2, p. 49-82.
- Gordon, S.T, 2008, "Heritage, Commerce, and Museal Display: Toward a New Typology of Historical Exhibition in the United States", *The Public Historian*, Vol. 30, No. 3, p. 27-50.
- Gosh, M, 2010, *Archives and e-records management in Canada: a state of the art report* (Canada: The York University).
- Holmes, O. W, 1964, "Archival Arrangement Five Different Operations at Five Different Levels", *The American Archivist*, Vol. 27, No. 1, p. 21-42.
- Howgill, E., 2015, "New methods of analysing archival exhibitions", *Archives and Records*, Vol.36, No. 2, p. 179-194.
- Jeurgens, C, 2009, "Archieven tussen geschiedenis, erfgoed, en volkenkunde", *Archievenblad*, September 2009, p. 28-30.
- Keith, P, 2014, *Folding the Exhibition*, (Barcelona: MACBA)
- Keteelar, E., 2007, "Muniments and monuments: the dawn of archives as cultural patrimony", *Archivaria*, Vol. 7, Issue 4, p. 343-357.
- Khoon, L.C., et. al, 2008, "An Overview of Online Exhibitions", *DESIDOC Journal of Library and Information Technology*, Vol. 28, No. 4, July 2008, p. 7-21.
- Lester, P, 2007, "Is the virtual exhibition the natural successor to the physical?", *Journal of the Society of Archivists*, Vol. 27, Issue 1, p. 85-

101.

- Pearce-Moses, 2005, R. A Glossary of Archival and Records Terminology (Chicago: The Society of American Archivist).
- Rabins, J, 1980, "Archival Exhibits: Considerations and Caveats", *Georgia Archive*, Vol. 8, No. 2, pp. 29-40.
- Reid, G. A "Digital Exhibition: The Powys Digital History Project, 1996-2001", *Journal of the Society of Archivists*, Vol. 22, Issue. 2, p. 161 – 176.
- Rhee, H. L., 2015, "Reflections on Archival User Studies", *Reference and User Services Quarterly*, June 2015, p. 29-42.
- Spraggs, G., 2008, *Using Archives in Higher Education History Teaching*, (Somerset: Society of Archivists)
- Yakel, E., 2003, "AI: Archival Intelligence and User Expertise", *The American Archivist*, Vol. 66 (Spring/Summer 2003), p. 51-78.

Thesis:

- Gordon, H, M. 1994. Archival Exhibition: Purposes and Principle, MA Thesis (Vancouver: University of British Columbia).
- Lerette, B. T., 2002, Archival Materials Exhibited in

an Art Museum: A Case Study of Museum-Library Collaboration, *Master Thesis* (USA: University of North Carolina at Chapel Hill)

Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*

ARSIP DAN JARINGAN INTELEKTUAL

Studi tentang Koleksi Nishijima di Universitas Waseda Jepang

Arif Rahman Bramantya, S.S., M. Hum.

Program Studi Kearsipan Sekolah Vokasi UGM

(arif.rahman.b@mail.ugm.ac.id)

INTISARI

Arsip dapat dikatakan "benda mati" jika kita lihat dari sisi fisik. Di sisi lain, arsip dapat dikatakan "hidup" jika kita lihat dari segi informasi yang terkandung di dalamnya. Arsip dapat menjelaskan di mana pun, kapan pun dan dengan tujuan apapun, karena arsip memiliki nilai pembuktian, nilai informasi dan nilai intrinsik. Singkatnya, arsip merupakan sumber pengetahuan jika dilihat dari sudut pandang akademis. Arsip terkait dengan pendudukan Jepang di Indonesia sangat terbatas. Saat ini, studi yang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia juga semakin berkurang. Akan tetapi, studi tentang pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 80-an begitu banyak dan bervariasi. Koleksi Nishijima adalah salah satu sumber pengetahuan berharga yang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sayangnya, banyak orang tidak menggunakan koleksi tersebut sebagai sumber untuk studi Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan perspektif baru tentang material tersebut terkait dengan pendudukan Jepang di Indonesia yang terkandung dalam Koleksi Nishijima. Jaringan intelektual terbentuk melalui Koleksi Nishijima. Pada akhirnya, studi tentang Koleksi Nishijima melalui metode historis dapat menjadi landasan awal untuk meningkatkan kesadaran sejarah yang dapat berpengaruh pada peradaban (Indonesia).

Kata kunci: Arsip, Nishijima Collection, jaringan intelektual, pengetahuan.

ABSTRACT

Archives can be said to be "inanimate" if we look it from the physical side. On the other hand, archives can be said to be "a living thing" if we look it in terms of the information that is contained in. Archives can explain anywhere, anytime and any purpose, because archives have evidential value, informational value and intrinsic value. In short, archives is a source of knowledge if we look it through academic view point. Archives in relation to the Japanese occupation in Indonesia is very limited. Nowadays, the study related to the Japanese occupation in Indonesia is also decrease. However, the study about the Japanese occupation in Indonesia in the 80s was massive and varied. Nishijima Collection is one of the valuable sources of knowledge related to the Japanese occupation in Indonesia. Unfortunately, many people do not use the collection as source for their Indonesian study. The result of this study provides a new perspective on the materials related with the Japanese occupation in Indonesia contained in Nishijima Collection. Intellectual network was formed through Nishijima Collection. Eventually, the study about Nishijima Collection through the historical method can be an initial foundation to raise the historical awareness that will be able to affect the civilization (of Indonesia).

Keywords: Archives, Nishijima Collection, intellectual network, knowledge.

PENGANTAR

Arsip dan peristiwa sejarah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari memori kita, karena di dalam arsip memuat informasi kronologis yang dapat dipergunakan untuk kepentingan akademis dalam bidang penelitian dan penulisan melalui serangkaian metode yang melingkupinya. Pengertian arsip menurut Undang-Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2009 adalah:

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Arsip pada masa pendudukan Jepang tergolong langka di Indonesia. Hal ini dikarenakan pihak Jepang telah memusnahkan dokumen-dokumen tersebut setelah perang berakhir. Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia banyak dilakukan oleh sejarawan ataupun peneliti asing dalam bentuk penulisan disertasi, antara lain George McTurnan Kahin, Benedict Anderson, George S. Kanahale, Harry J. Benda, dan lain sebagainya. Sejarawan atau peneliti Indonesia yang bergelut dengan arsip pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pun cukup banyak, sehingga mengakibatkan pengetahuan mengenai zaman tersebut menjadi sangat luas sebagai akibat dari pengalaman dan kejadian masa lalu. Karya-karya yang dihasilkan mengenai zaman pendudukan Jepang di Indonesia pun sangat masif dan studi sejarah hampir selalu tergantung pada dokumen yang dibaca ataupun didengar dari saksi sejarah.

Studi mengenai sejarah pendudukan Jepang di Indonesia dirasa masih kurang untuk melengkapi

historiografi Indonesia saat ini. Masih banyak yang dapat dikaji dari sumber-sumber berbahasa Jepang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sumber-sumber tersebut terdapat di Universitas Waseda (Soedjatmoko, dkk. (ed), 1995: 178-183). Tidak dapat dipungkiri bahwa realitas sejarah di tengah krisis proklamasi kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang memiliki sejumlah fakta menarik bahwa proklamasi kemerdekaan juga dipengaruhi oleh orang-orang Jepang salah satunya adalah Shigetada Nishijima, bawahan Laksamana Muda Tadashi Maeda (*Nihon Housou Kyoukai* (NHK), 1991).

Jika ditinjau lebih lanjut, hubungan antara Jepang dan Indonesia pascakemerdekaan menunjukkan korelasi yang baik. Hubungan persahabatan antara keduanya semakin kuat berlandaskan pada hubungan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan kerja sama melalui pengkajian lebih lanjut mengenai arsip yang berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia ataupun arsip pascakemerdekaan yang saat ini berada di Jepang perlu dilakukan. Sebagai hasilnya, kerja sama dalam tukar menukar *copy* dokumen yang dilakukan oleh Universitas Waseda dengan pihak Indonesia di tahun 1974 patut kita apresiasi.

Sistem informasi yang efisien dan modern sangat diperlukan dalam dunia kearsipan, terutama dalam pencarian arsip. Disamping itu, sistem informasi yang efisien dan modern dapat diwujudkan bila ada kerja sama yang baik antara penyedia informasi dengan para *user*. Arsip sebagai sumber informasi sudah selayaknya dikelola dengan baik dan benar sesuai kaidah kearsipan karena arsip merupakan informasi yang sah dan sangat penting. Mengacu pada salah satu fungsi arsip yang merujuk pada nilai kesejarahan, maka arsip dapat dipergunakan untuk penulisan dan penelitian

akademis. Informasi yang terkandung di dalam arsip diharapkan mampu menggambarkan kondisi ketika arsip tersebut diciptakan. Arsip juga dapat menggambarkan realitas sosial yang terjadi pada masanya. Oleh karena itu, dalam penelitian akademis (sejarah), metode sejarah mutlak diperlukan.

Melalui *short program* yang diselenggarakan oleh *Waseda Institute of Asia Pasific Studies* (WIAPS), *Graduate School of Asia Pasific Studies* (GSAPS), Universitas Waseda, Jepang, pada bulan Februari tahun 2015, di bawah arahan Prof. Hayase Shinzo selaku kepala bidang studi Indonesia (*Area Studies*) menggantikan Prof. Goto Kenichi (emiritus), penulis berkesempatan untuk berdiskusi dan melakukan penelitian arsip pada masa pendudukan Jepang. Penelitian difokuskan untuk mengkaji Koleksi Nishijima (*The Nishijima Collection*) terkait dengan pembahasan mengenai tokoh intelektual Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dalam mengkaji Koleksi Nishijima, tidak dapat dipungkiri bahwa keterkaitan masalah antara emosi pribadi dan emosi kolektif membuat penelitian sejarah lebih menarik. Oleh karena itu, dalam usaha untuk mendapatkan konteks sejarah kritis, sejarawan dituntut untuk berhati-hati agar sejarah tidak dilihat secara parsial atau mengambil salah satu episode tertentu. Sejarah harus dilihat sebagai sebuah proses holistik dengan menyadari unsur subjektifitas, intersubjektifitas dan pemihakan (Bambang Purwanto, Asvi Warman Adam, 2013: 2-13). Hasil dari *short program* ini telah menghasilkan karya ilmiah berjudul *Laksamana Muda Tadashi Maeda: Menembus Larangan Sekutu untuk Kemerdekaan Indonesia 1918-1947* (Tesis Arif Rahman Bramantya, 2016).

Sadar arsip dan kesadaran sejarah tidak terlepas oleh keberadaan arsip sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Gerakan sadar arsip pun tidak terlepas dari pentingnya kegiatan pengarsipan dan kerja dokumentasi. Seseorang yang melakukan gerak tubuh dalam upaya untuk mendokumentasikan

sesuatu hal merupakan salah satu metode dalam pendisiplinan tubuh. Dokumentasi merupakan kerja inti demi membumikan budaya sadar arsip (Arif Rahman Bramantya, 2016: 9-11). Kerja pengarsipan yang dilakukan oleh tim dari Universitas Waseda terkait Koleksi Nishijima dengan kerja dokumentasi dan pengumpulan dokumen sejarah merupakan bentuk nyata dari gerakan sadar arsip dan sebagai bentuk kesadaran akan sejarah.

Studi ini ingin melihat siapa sebenarnya Shigetada Nishijima dalam konteks historis dan sejauh mana Koleksi Nishijima dapat dipergunakan sebagai sumber informasi, menarik untuk melihat jaringan intelektual yang dibangun antara Universitas Waseda dengan pemerintah Indonesia terkait dengan koleksi tersebut.

Landasan Teori

Jaringan intelektual dapat dibangun dengan adanya kerja sama. Kerja sama dalam pemanfaatan sumber sejarah menjadi fondasi utama untuk membangun peradaban yang semakin berkembang. Oleh karena itu, konsep kerja sama akan digunakan untuk menganalisis tulisan ini sebagai analisis dasar. Kerja sama merupakan suatu kegiatan atau usaha (perniagaan dan sebagainya) yang ditangani oleh dua belah pihak atau lebih (KBBI, 2012: 681). Pada dasarnya hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Selain itu, dalam kamus politik internasional, konsep tentang hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak atau antara dua negara (Krisna, 1993: 18). Tujuan dari kerja sama internasional antara lain; mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara, mencegah konflik yang mungkin terjadi, memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka dan mempererat hubungan antar negara. Dapat dipahami bahwa kerja

sama yang dilakukan oleh Universitas Waseda dengan pihak Indonesia melalui tukar menukar *copy* dokumen bertujuan untuk mempererat hubungan antar negara dan sebagai upaya membentuk jaringan intelektual.

Selain itu, untuk menganalisis sejauh mana Koleksi Nishijima dapat dimanfaatkan, konsep akses arsip juga akan digunakan. Akses arsip berhubungan dengan *physical access*, *legal access* dan *intellectual access*. *Physical access* berkaitan dengan proses penilaian dan akuisisi, serta didasari alasan konservasi. *Legal access* berkaitan dengan batasan atau privasi terhadap arsip. *Intellectual access*, berkaitan dengan kinerja kearsipan, pemrosesan, sarana penemuan kembali, kompetensi arsiparis dan fasilitas pendukung serta hambatan atau rintangan akses.

Terkait dengan pelayanan akademis, akses terhadap arsip menjadi sarana utama dalam penelitian dan penulisan. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana undang-undang untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip (UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Pengelolaan arsip statis merujuk pada proses pengendalian arsip secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional dan pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan arsip merupakan kegiatan dalam rangka memanfaatkan arsip baik yang dilakukan oleh pengelola dan pengguna.

Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi para pengguna. Selain itu, akses arsip statis pada lembaga kearsipan dilaksanakan demi

kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip serta didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan. Akses arsip statis adalah ketersediaan arsip statis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi. Sedangkan aksesibilitas arsip statis adalah keterkaitan untuk menggambarkan seberapa mudah pengguna arsip mendapatkan data atau informasi arsip statis, mempergunakan arsip dan memahaminya. Layanan arsip statis merupakan penyediaan arsip statis kepada pengguna arsip statis yang sah, termasuk pengggandaan arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketersediaan akses arsip statis dilakukan melalui prosedur yang transparan kepada semua pengguna arsip statis tanpa diskriminasi apapun baik itu kebangsaan, latar belakang, usia, kualifikasi atau kepentingan penelitiannya. Persyaratan teknis terkait dengan ketersediaan sarana penemuan kembali arsip dalam Koleksi Nishijima baik berupa daftar arsip, inventaris arsip, dan guide arsip pun harus jelas. *Finding aids* merupakan sebuah sarana yang dapat dipergunakan untuk mencari dan menemukan informasi atau menelusuri arsip (Machmoed Effendhie, dkk., 2012).

Daftar arsip statis adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat sekurang-kurangnya uraian informasi deskripsi arsip statis antara lain: nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsipnya. Inventaris arsip adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran. Sedangkan, guide arsip statis adalah sarana bantu

penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi mengenai khazanah arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan dan uraian informasi yang disusun secara tematis (Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis).

PEMBAHASAN

Shigetada Nishijima dalam Realitas Sejarah.

Mengkaji Koleksi Nishijima tidak terlepas dari pembelajaran sejarah dan bukti keberadaan arsip. Mengapa dalam pembelajaran selalu diawali dengan sejarah? Karena pemahaman yang setengah-setengah akan membentuk pribadi dengan pikiran yang sempit dan dangkal dan sejarah berperan sebagai dasar pemahaman dari ilmu apapun yang kita pelajari.

Pembahasan tokoh Shigetada Nishijima dalam realitas sejarah tidak terlepas dari sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai pada titik klimaks pembacaan naskah Proklamasi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 menjadi satu-satunya sejarah yang sangat penting dan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa terdapat dua versi mengenai keterlibatan tokoh Jepang dalam perumusan naskah Proklamasi. Versi pertama menyebutkan bahwa tidak ada orang Jepang yang terlibat dalam perundingan seperti yang dituliskan oleh Mohammad Hatta dan Ahmad Subardjo (Mohammad Hatta, 1970: 56-62; Ahmad Subardjo, 1972: 104-108; Ahmad Subardjo 1978: 331-334). Versi kedua menyebutkan bahwa perumusan naskah proklamasi melibatkan orang Jepang seperti disebutkan Nishijima dalam kesaksiannya, wawancara tim NHK Jepang dengan Shigetada Nishijima dalam *NHK Supesharu Shirisu Ajia to Taiheiyō Senso Dai Ikkai Jakaruta no Ichiban Netsui Nichi, Indoneshia Dokuritsu Sengen* (NHK *Special Series*, Asia dan Perang Pasifik, Hari yang Paling Menegangkan Jakarta, Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia), (*Nihon Housou Kyōkai* (NHK), 1991; *Kompas* tanggal 16 Agustus 2001).

Nishijima adalah salah satu dari beberapa orang kepercayaan Laksamana Muda Tadashi Maeda yang sangat penting dan berpengaruh dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain cakap dalam berbagai bahasa, diketahui bahwa sebelum memasuki Batavia, ia merupakan seorang penganut paham Komunis. Karena tindakannya tersebut, ia dimasukkan ke dalam penjara dan mendapat siksaan. Nishijima dapat keluar dari penjara dikarenakan adanya konsesi politik dengan pemerintah Jepang, yakni dengan menjadi agen pemerintah dan bersedia untuk keluar dari paham Komunis (Hasil wawancara Yako Kozano dengan Shigetada Nishijima).

Nishijima merupakan lulusan sarjana Universitas Tokyo. Ia direkrut oleh Angkatan Laut Jepang untuk mengembangkan Jepang di Hindia-Belanda dan bertugas untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kondisi dan situasi lokal. Ia hanya memiliki status sipil di Angkatan Laut Jepang dan akan dipromosikan sebagai pemimpin (Meta Sekar P.A, 2008: 136).

Shigetada Nishijima merupakan orang sipil yang menjadi bawahan Tadashi Maeda. Ia fasih dalam bahasa Indonesia dan Belanda, kelahiran kota Maebashi, prefektur Gunma, 4 Juni 1911. Sebelum pendudukan Jepang, ia pernah tinggal di Surabaya untuk bekerja di Chiyoda Hyakkaten dan kemudian pindah ke cabang Bandung. Karena pergaulannya sangat erat dengan tokoh pemuda Indonesia, ia ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan mendekam di kamp tahanan yang dihuni sekitar 500 orang (*Kompas* tanggal 16 Agustus 2001; *JawaPos* tanggal 21 Agustus 1994; Anderson, 1988: 468). Selama pendudukan Jepang di Indonesia, ia masuk dalam struktur organisasi penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang di Jakarta atau dikenal dengan Jakarta *Kaigun Bukanfu*, di bidang intelijen dan *local indigeous* (Nishijima,

1981: 253). Ia dibaiat oleh Tan Malaka dengan nama Hakim. Setelah Jepang tunduk pada Sekutu, Nishijima dipulangkan ke Jepang dan mendapat posisi penting sebagai pimpinan dalam kelompok penelitian di Universitas Waseda untuk mengembangkan studi area, terutama studi tentang Indonesia.

Koleksi Nishijima: Kerja Pengarsipan dan Kerja Intelektual.

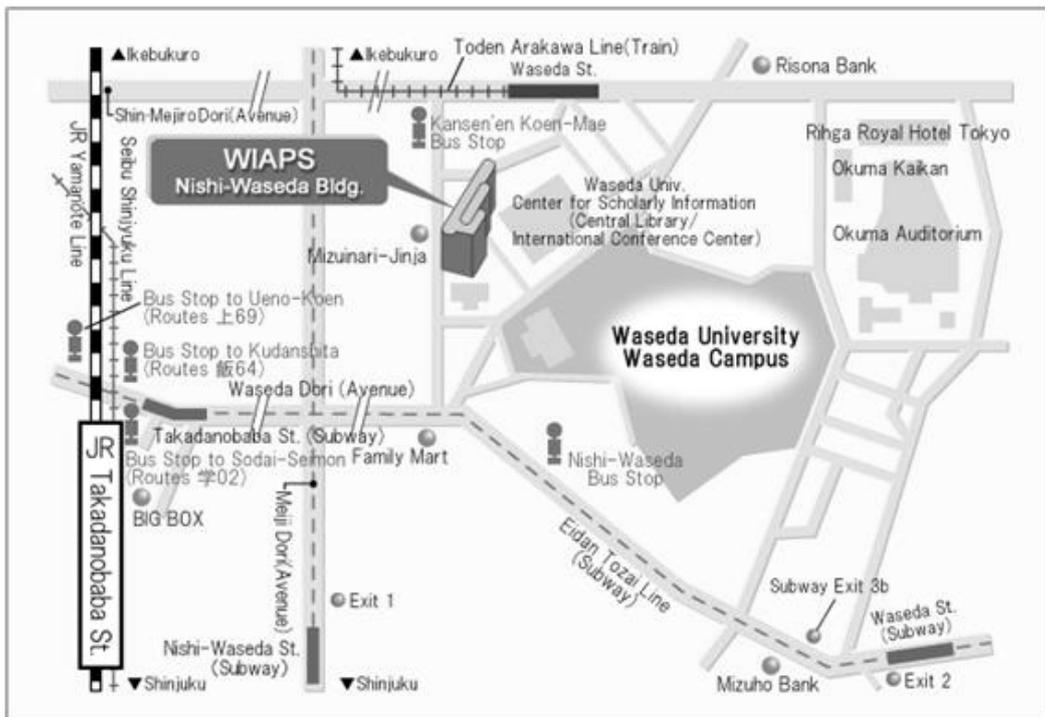
Studi tentang Indonesia di Universitas Waseda berkembang sekitar tahun 1955-an dengan dibentuknya Lembaga Penelitian Ilmu Sosial (*Okuma Institute of Social Science*). Untuk mengembangkan studi tentang Indonesia di Universitas Waseda, kerja intelektual telah dilakukan di tahun 1956 oleh lembaga tersebut. Berkaitan dengan sejarah pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, dengan subsidi dari Yayasan Rockefeller, hasil penelitian dari tim tersebut ditulis dengan melihat beberapa perspektif antara lain perspektif Barat, perspektif Indonesia, dan perspektif Jepang. Shigetada Nishijima bersama dengan Koichi Kishi (Alumni Universitas Waseda), dkk., menulis karya akademis berjudul *Pengaruh Pemerintahan Militer Jepang terhadap Kemerdekaan Indonesia* dan diterbitkan di tahun 1959 dengan judul *Indonesia ni Okeru Nihon Gunsei no Kenkyuu* (Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia) (Soedjatmoko, Mohammad Ali, G.J Resink, G. Mct. Kahin (ed), 1995: 185-186). Karya tersebut diterjemahkan dalam beberapa bahasa dan telah berkontribusi dalam dunia akademis.

Berselang 15 tahun kemudian, upaya mengembangkan studi Indonesia yang dilakukan oleh tim dari Universitas Waseda melalui Nishijima terus berlanjut. Koleksi Nishijima merupakan salah satu hasil dari kerja pengarsipan dan kerja intelektual yang didonasikan untuk Universitas Waseda. Koleksi Nishijima merupakan kumpulan sumber sejarah administrasi militer pada zaman pendudukan Jepang. Dapat dikatakan bahwa Koleksi Nishijima merupakan sumber informasi yang penting bagi para sejarawan atau peneliti dalam dunia akademis internasional. Koleksi Nishijima yang disimpan di Universitas Waseda sangat beragam sehingga dapat menjangkau berbagai tema penelitian. Koleksi Nishijima terdiri dari kurang lebih 400 judul. Kerja sama antara sejarawan dan masyarakat Indonesia yang didonasikan oleh Nishijima merupakan kerja nyata. Pada bulan Juni tahun 1971, Koleksi Nishijima diserahkan kepada Lembaga Penelitian Ilmu Sosial Universitas Waseda dan kemudian diklasifikasi secara bertahap. Proses klasifikasi memakan waktu kurang lebih 3 tahun dan selesai pada bulan Februari 1973. Koleksi Nishijima terdiri dari 130 judul dalam Bahasa Inggris, 40 judul dalam Bahasa Belanda, 200 judul dalam Bahasa Indonesia, dan 40 judul dalam Bahasa Jepang.

Saat penulis berada di Tokyo, Koleksi Nishijima disimpan di *Waseda Institute of Asia Pasific Studies (WIAPS)*, *Graduate School of Asia Pasific Studies (GIAPS)*, Universitas Waseda (*Waseda Daigaku Daigakuin Ajia Taiheiyou Kenkyuuka*), 1 Chome 21-1 Nishiwaseda, Shinjuku, Tokyo 169-0051, Jepang. Sarana penemuan kembali (*Finding aids*) dalam pencarian Koleksi Nishijima berupa katalog. Katalog Arsip merupakan kumpulan akses khasanah arsip statis yang dibedakan berdasarkan periodisasi dan media arsipnya



Gambar 1. Nishiwaseda Building
 Sumber: www.waseda.jp



Gambar 2. Peta WIAPS Nishiwaseda Building
 Sumber: www.waseda.jp

Interrogation of Rear Admiral MAEDA Takashi
By A.P.M. Andrievich at Stralsund prison 15th April 1947

13

Q. How do you explain that those members of the Preparatory Committee were present at your house at about 3 o'clock that night (15th/16th August 1945)?

A. I don't know how they arranged their coming to this meeting, before we left my house and went to Gen. Nishimura (with Soekarno and Hatta) they stressed the point that they wanted to have a meeting, that night just after coming back from Gen. Nishimura.

I thus agreed to use my house for this purpose.

I saw that Soekarno then gave some instructions to some people and I suppose that these were instructions to call the members of the committee to my house.

Yoshida, Saito and Nakatani also went to Gen. Nishimura's house.

Q. Who was present during the conference between Soekarno and Gen. Nishimura?

A. 1. The Chief of the Chikubu (Police) he was former Governor of Komatsu
2. Tokumasa (Chief of Home-affairs) Matsubachō
3. Miyoshi
4. Saito
5. Nakatani
6. Capt. Nakamura. I am not sure
7. Whether Lt. Col. Nagura Akira Chief of Planning Dept (Kikokukajo) was present I am not sure

Q. Has Gen. Nishimura made a remark about an unofficial meeting or tea-party or something similar?

A. No.

Q. Has you ever given any financial support to the Indonesian Independence movement or to Indonesian individuals connected.

A. No, Sir

Q. To what organizations belonged those young men?

A. Gijyūen, students of medical school, English Language.

I got this information in the evening of the 16th Aug. from Yoshimura and Yoshimura when I had sent to collect information.

Yoshimura and Yoshimura were present during the meeting that followed when Soekarno and Hatta came to my house at about eleven o'clock.

Yoshimura came into my house together with Soekarno and Hatta. Nishimura was already present there before they came in, also Miyoshi, Saito and Nakatani of the Political Section of Komatsu were present. Yoshimura was with Soekarno when they went to fetch Soekarno and Hatta.

When I went later on to Gen. Nishimura with Soekarno and Hatta, we went in the same car.

During the second meeting that night at my residence (the meeting of the Preparatory Committee)

- 2 -

Q. What was the share of Sendanbu in connection with the events of 15, 16, 17th August?

A. I don't think that Sendanbu had any contacts in connection with the matter, I can say so nearly sure.

was signed, Takashi Maeda.

A.P.M. Andrievich.

Gambar 3. Interrogation Report of Rear Admiral Maeda April 16th 1947
Sumber: Nishijima Collection AD 12

The image shows a grid of 12 pages from an interrogation report. The pages contain text in both English and Japanese. The text is dense and appears to be a transcription of an oral interview. Some pages have handwritten notes or markings. The layout is organized into a grid, with each page containing a portion of the overall report. The text includes names of individuals, dates, and descriptions of events, consistent with the caption provided.

Gambar 4. Ditto, Interrogation Report of Rear Admiral Maeda April 16th 1947
Sumber: Nishijima Collection AD 13

Sementara itu, dokumen pemerintah terdiri dari 15 volume terkait dengan administrasi militer di Asia Selatan, 53 volume terkait dengan pemerintahan militer di Jawa, 43 volume terkait dengan wilayah administrasi Angkatan Laut Jepang, 9 volume terkait dengan administrasi militer di Kalimantan Utara, 20 volume terkait dengan kemerdekaan Indonesia dan 25 volume lain-lain. Koleksi Nishijima juga terdiri dari 17 volume rekaman suara (*Sound Recording*), 24 volume microfilm terkait dengan dokumen pemerintah militer di Sumatra dan surat kabar yang diterbitkan di Jawa dan 51 volume dokumen dari *Indische Collectie Rijkinstituut voor Oorlogsdocumentatie*.



Gambar 5. Diskusi dengan Prof. Goto Kenichi dan Yako Kozano
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Penulis juga berkesempatan untuk berkunjung di *National Institute for Defense Studies (NIDS)* dan *The Diplomatic Record Office of the Ministry of Foreign Affairs*. Seperti lembaga penelitian pada umumnya, NIDS juga melakukan penelitian dengan orientasi pada kebijakan keamanan dan sejarah militer. Selain itu, NIDS terlibat dalam kegiatan pengarsipan administrasi dokumen militer, pencatatan, dokumentasi dan publikasi serta merupakan salah satu pusat penelitian sejarah militer yang sangat penting di Jepang. Penekanan utama NIDS terletak pada penyebaran informasi dan sebagai lembaga unggulan yang berurusan dengan kebijakan keamanan di Jepang.

Di bawah arahan Dr. Kyoichi Tachikawa, Kepala Pusat Sejarah Militer NIDS penulis mendapat banyak informasi yang didapatkan mengenai koleksi yang disimpan. Koleksi arsip yang disimpan di NIDS meliputi sejarah militer, antara lain dokumen-dokumen dari Departemen Angkatan Darat Jepang, dokumen dari Departemen Angkatan Laut Jepang dan hasil-hasil studi yang dilakukan oleh peneliti dari NIDS. Secara pribadi, menarik untuk melihat kesaksian dari perwira militer Jepang selama perang yang dituangkan dalam buku saku meskipun cukup sulit untuk membacanya, karena tulisan tangan para perwira militer tersebut mengacu pada tulisan Jepang kaligrafi.

Pelayanan Akademis dan Kerjasama

Arsip harus disimpan dan dikelola dengan baik melalui pertimbangan bahwa arsip dapat memberikan jejak sejarah melalui tulisan-tulisan sejarah. Selain itu, arsip juga memiliki keunggulan sebagai pengingat abadi karena manusia memiliki keterbatasan ingatan. Arsip juga dapat memberi informasi sebagai penentu kebijakan, arsip dapat membantu dalam penelitian, dan arsip dapat menjadi bukti hukum. Pertanyaannya kemudian, dapatkah arsip digunakan sebagai media pembelajaran? Berkaitan dengan proses pembelajaran di kalangan sivitas akademika, mahasiswa memerlukan pengalaman dalam mencari dan memahami sumber-sumber sejarah. Pengalaman kerja di lapangan (penelitian arsip) akan membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran terutama dalam pembuatan makalah dan penulisan tugas akhir. Melalui kunjungan ke lembaga kearsipan atau ke penyedia layanan informasi publik, selain dosen pembimbing mengarahkan kerja teknis penelitian, mahasiswa juga langsung memperoleh penjelasan dari arsiparis yang bersangkutan dan dapat berkonsultasi secara langsung. Penguasaan terhadap apa saja yang tersimpan di dalam lembaga tersebut dan bagaimana

cara mahasiswa memperoleh sumber-sumber tersebut tergantung pada pelayanan akademis yang diberikan.

Pada prinsipnya, *Political Interest*, *Judicial Interest*, dan *Academic Interest* merupakan kepentingan dasar dalam pengelolaan arsip. Terkait dengan *Academic Interest*, kajian sejarah sebagai dasar dalam penyusunan strategi, sarana introspeksi diri, dan perencanaan masa depan menjadi pilar utama. Pelayanan akademis dalam menunjang penelitian dan penulisan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penelitian, penulisan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat (Sri Margana, 2010: 16-17). Pelayanan akademis terkait dengan akses arsip yang berada di Jepang terbilang cukup mudah, tentu melalui korespondensi dengan pihak terkait dan harus mempersiapkan kelengkapan dokumen seperti passport, tanda pengenal, surat ijin, dan lain sebagainya.

Universitas Waseda sebagai salah satu universitas tertua yang menyimpan dokumen-dokumen berharga mengenai pendudukan Jepang di Indonesia telah bekerja sama dengan pihak pemerintah Indonesia. Melalui serangkaian korespondensi yang telah dilakukan oleh tim dari Perpustakaan 45 menyatakan bahwa sebagai bentuk nyata dalam hubungan kerjasama, rektor Universitas Waseda Sukenaga Murai akan mengirim delegasinya ke Indonesia. Pihak Universitas Waseda dalam bulan Maret tahun 1974 telah mengirimkan utusan ke Jakarta yakni Prof. Shigeru Katsumura dan asistennya yakni Goto Kenichi. Prof. Shigeru Katsumura pada saat itu menjabat sebagai Direktur *Institute of Social Science* Universitas Waseda. Di samping mengadakan perundingan, kerja sama akademis dalam tukar menukar *copy* dokumen sejarah juga telah dilakukan. Disamping itu, kunjungan tersebut bertujuan untuk pengamatan langsung tentang studi Jepang di Indonesia. Tim dari Indonesia segera dibentuk

dengan formasi sebagai berikut; sebagai penasihat yaitu Letjen. Ali Sadikin dan Mohamad Rivai, sebagai koordinator yaitu Brig.Jen.Pol Moedjoko, dan 5 anggota terdiri dari Prof. Dr. Moestopo, Prof. Sunario, S.H, Brig. Jen. Sudarto, Dra. S.K Trimurti, Drs. Maskoer Sumodihardjo dan Sumardjo. Tim segera menghadap Menteri Luar Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Adam Malik (Dewan Harian Nasional Angkatan 45, 1974: 26).

Perpustakaan 45 (Gedung Juang 45) memiliki koleksi dokumen mengenai zaman pendudukan Jepang di Indonesia dengan adanya Koleksi Nishijima sebagai hasil dari hubungan kerjasama antar dua negara. Perlu diketahui bahwa untuk melengkapi historiografi Indonesia saat ini, terutama penelitian pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, sumber-sumber Jepang sangat diperlukan. Pada umumnya sejarawan atau peneliti mengalami kesulitan dalam mengakses dan mencari sumber-sumber Jepang. Dengan adanya Perpustakaan 45 yang menyimpan Koleksi Nishijima, hal tersebut tentu akan menguntungkan para sejarawan ataupun peneliti dan menganggap bahwa Koleksi Nishijima merupakan informasi berharga.

Salah satu tema penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah mengenai tokoh besar yang berpengaruh dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia yakni Laksamana Muda Tadashi Maeda. Arsip yang berkaitan dengan Tadashi Maeda merupakan salah satu bagian dari Koleksi Nishijima. Kumpulan arsip dari *Indische Collectie Rijkinstituut voor Oorlogs-documentatie* misalnya, banyak memuat mengenai hasil interogasi dari para militer Jepang sesudah Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya.

KESIMPULAN

Realitas sejarah menyebutkan bahwa sebelum dan semasa perang, Shigetada Nishijima termasuk dalam orang-orang pilihan yang direkrut untuk

kepentingan pemerintah Jepang. Sebelum perang Asia Timur Raya pecah, ia merupakan seorang agen pemerintah Jepang. Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia pun masuk dalam struktur Jakarta *Kaigun Bukanfu* di bawah pimpinan Laksamana Muda Tadashi Maeda dan merupakan salah satu orang yang berpengaruh dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah perang Asia Timur Raya berakhir, Nishijima merupakan sosok intelektual yang mendapat posisi penting di Universitas Waseda. Awal kerja intelektual mengenai studi area (*Area Studies*) dimulai di tahun 1956 oleh Universitas Waseda. Kerja pengarsipan yang diupayakan oleh Universitas Waseda tidak lain merupakan kerja intelektual. Produk dari kerja tersebut salah satunya adalah Koleksi Nishijima yang dapat diakses di Perpustakaan 45.

Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya arsip selalu menganggap penting suatu hal yang mungkin dipandang oleh sebagian orang remeh dan tidak bermanfaat sama sekali. Namun, yang sebenarnya remeh dan tidak bermanfaat justru memiliki nilai. Kerja kearsipan yang berangkat dari realitas kehidupan bermasyarakat dan memiliki visi untuk masa depan merupakan warisan yang syarat akan pengetahuan. Produk kerja kearsipan berupa Koleksi Nishijima secara sadar diwariskan dalam ranah kepentingan bersama, sehingga akan dapat mengembangkan jaringan intelektual (pengetahuan) secara berkelanjutan yang merupakan inti dari jalinan persahabatan. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dapat diketahui melalui koleksi tersebut, tentu dengan mengeksplorasinya, sehingga tampak bahwa arsip yang semula dapat dikatakan benda mati dapat menjadi sebuah informasi berharga dan akan memunculkan fakta baru.

Dapat dikatakan bahwa keberadaan bukti-bukti sejarah yang menjadi subyek penelitian tergantung pada kerja pengarsipan yang berlandaskan pada gerakan sadar arsip dan kesadaran sejarah. Melalui

kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam tukar menukar *copy* dokumen, setidaknya telah membuat hubungan antara Indonesia dan Jepang berjalan semakin erat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Kepala ANRI No 28. Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.

Buku dan Artikel

Anderson, Benedict. 1988. *Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Bramantya, Arif Rahman. “Sebuah Catatan: Jejak Perumusan Naskah Proklamasi dalam Arsip Privat Puisi Laksamana Muda Maeda”. 2016. *Arsip: Harmoni, Persahabatan, dan Solidaritas*. Majalah Arsip Media Kearsipan Nasional, Edisi 69.

-----, “Revolusi Mental, Gerakan Sadar Arsip dan Kesadaran Sejarah”. 2016. *Revolusi Mental bidang Kearsipan*. Majalah Arsip Media Kearsipan Nasional, Edisi 70.

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Harian Nasional Angkatan 45. *Gema Angkatan 45. Yang Belum Diceritakan Tentang Laksamana Maeda*. 17 Februari 1974.

Djojoadisuryo, Ahmad Subardjo. 1978. *Kesadaran Nasional : Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Effendhie, Machmoed, dkk. 2012. *Panduan Akses dan Layanan Kearsipan*. Revisi. Yogyakarta: Arsip UGM.

Hatta, Mohammad. 1970. *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas.

Krisna, Didi. 1993. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo.

Margana, Sri. “Arsip Statis: Pengelolaan dan Pemanfaatan”. 2010. *Khazanah Buletin Kearsipan* Vol. 3, No. 1.

Nishijima, Shigetada. 1973. *The Nishijima Collection. Materials on the Japanese Military Administration in Indonesia*. Tokyo: Waseda University.

-----1981. *Zohou Indoneshia Dokuritsu Kakumei Hakim Nishijima no Shougen*. Tokyo: Rokuseisha.

Purwanto, Bambang dan Asvi Warman Adam. 2013. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Soedjatmoko, Mohammad Ali, dkk. 1995. *Historiografi Indonesia, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumber tidak diterbitkan

Arif Rahman Bramantya. 2016. *Laksamana Muda Tadashi Maeda: Menembus Larangan Sekutu untuk Kemerdekaan Indonesia 1918-1947*. Tesis. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada.

Surat Kabar

Jawa Pos 21 Agustus 1994. *Tokoh Tua Jepang tentang Proklamasi Kita*.

Kompas 16 Agustus 2001. *Hasil wawancara Basyral Hamidy Harahap dengan Shigetada Nishijima*.

Film Dokumenter:

Nihon Housou Kyoukai (NHK). 1991. *NHK Supesharu Shirisu Ajia to Taiheiyou Senso Dai Ikkai Jakaruta no Ichiban Netsui Nichi, Indoneshia Dokuritsu Sengen*.

IMPLEMENTASI PROGRAM ARSIP MASUK DESA

Drs. Burhanudin Dwi Rohmatun

Arsiparis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

INTISARI

Program Arsip Masuk Desa (AMD) merupakan program yang dicanangkan oleh ANRI sejak tahun 2009. Tujuan Program AMD adalah meningkatkan peran arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa. Sasaran Program AMD adalah meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pada pemerintah desa yang sesuai dengan kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

Materi kearsipan yang disampaikan dalam Program AMD meliputi Pembuatan Naskah Dinas, Pengurusan Surat, Penataan dan Penggunaan Arsip, serta Penyusutan Arsip. Adapun lingkup yang menjadi obyek AMD adalah arsip yang tercipta pada Pemerintah Desa/ Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kelurahan. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Program AMD bersumber pada ketidakmerataan potensi, kondisi, dan sumber daya, antara lain kesenjangan antar desa yang dimiliki Pemerintah Desa di bidang anggaran, SDM, dan perbedaan sosial budaya. Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan dalam implementasi Program AMD antara lain perumusan konsep yang jelas, pemetaan kondisi dan sumber daya desa, serta penyiapan SDM dan anggaran.

Kata kunci: arsip, arsip masuk desa

ABSTRACT

The Village Archives Program (Arsip Masuk Desa/AMD) is a program launched by ANRI since 2009. The objective of AMD Program is to increase the role of archives in administering village government administration in order to improve services to the village community. AMD Program targets are the increasing quality of archival management in village government in accordance with archival rules and legislation.

Archival courses presented in the AMD Program includes the Making of Official Scripts, Letters Management, Arrangement and Use of Archives, and Disposal of Archives. The scope that became the object of AMD is the archive created in the Village Government, Village Consultative Board (Badan Permusyawaratan Desa/BPD), and Kelurahan. The obstacles faced in the implementation of the AMD Program stem from the inequalities of potential, conditions, and resources, including village-to-village gaps in the areas of budget and human resources, and socio-cultural differences. Alternative solutions that can be implemented in the implementation of the AMD Program include the formulation of a clear concept, mapping the condition and resources of the village, as well as the preparation of human resources and budget.

Keywords: archives, village entrance archives

PENGANTAR

Dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah, pembangunan kearsipan menjadi salah satu bidang pembangunan nasional dalam aspek perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan merupakan amanat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Fadhilah, Khoerun Nisa, 2012).

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk bidang kearsipan, aktor utama pembangunan adalah manusia. Demikian juga dalam membangun sistem kearsipan melalui Program Arsip Masuk Desa (AMD). Oleh karena itu, *human capital* merupakan modal utama pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Ada beberapa aspek yang dapat diambil dari upaya membangun *human capital* dalam rangka Arsip Masuk Desa. Dari pendapat Laura W. Perna a, Kata Orosz, dan Zakir Jumakulov ada salah satu aspek yang dapat diambil dalam pembangunan kearsipan adalah *Integration of new knowledge into the prevailing culture* (Zakir Jumakulov, Laura W. Perna, Kata Orosz, 27-1-2017). Hal ini disebabkan membangun kearsipan di Indonesia, termasuk melalui program AMD, adalah menawarkan dua sisi yaitu ilmu pengetahuan dan perubahan kultur. Arsip Masuk Desa (AMD) tentu bukan program yang bersifat latih. Kalaupun sebutannya menyerupai AMD (ABRI Masuk Desa) di era orde baru, tentu hal itu sebagai suatu kebetulan. Akan tetapi jelas keduanya memiliki perbedaan yang

sangat jauh. Istilahnya saja yang sama-sama menggunakan kosa kata 'masuk desa'.

ABRI Masuk Desa berangkat dari konsep Dwi Fungsi ABRI, terlepas dari aroma politik yang menjadi muatan AMD-nya 'prajurit' yang jelas saat itu terkonspek sebagai upaya pemberdayaan tentara dan masyarakat desa dalam suatu kebersamaan yang disebut dengan istilah "ABRI Manunggal dengan rakyat". Tentara tidak hanya menempa diri di *camp* pelatihan dan barak militer, tetapi sekaligus mengupayakan untuk mengeliminasi kemiskinan dan 'ketertinggalan desa'. Sudah tentu selain hal tersebut merupakan upaya memajukan desa juga merupakan pembinaan teritorial.

Meskipun bidang garapannya di daerah pedesaan, AMD berangkat dengan konsep yang berbeda dengan AMD milik tentara. Kalau ABRI Masuk Desa lebih berhubungan dengan masyarakat desa secara langsung, Arsip Masuk Desa memiliki cakupan yang lebih terbatas. Tentara masuk desa lebih cenderung pada upaya menggerakkan masyarakat untuk membangun desa dalam berbagai bidang, terutama masalah yang terkait dengan hal-hal yang bersifat fisik. Adapun Arsip Masuk Desa lebih menekankan cara menciptakan tertib arsip di kantor pemerintah desa. Artinya, untuk arsip masuk desa memiliki cakupan yang terbatas pada lingkup pemerintah desa. Walaupun bukan berarti hal tersebut hanya untuk kepentingan pemerintah desa tetapi secara hakiki juga menyangkut kepentingan masyarakat desa. Dalam konteks ini masyarakat tidak secara langsung dilibatkan untuk membenahi tata kearsipan di lingkungan pemerintah desa.

Hal yang harus dipahami adalah bahwa dalam Program ABRI Masuk Desa secara riil anggota tentara datang ke desa untuk bekerja membangun desa bersama-sama dengan masyarakat. Bukan berarti Arsip Masuk Desa adalah datangnya berkarung-karung arsip dari kota ke desa. Arsip Masuk Desa juga bukan berarti bahwa di desa tidak

ada arsip. Bukan pula berarti di desa belum ada sistem kearsipan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sederhana apapun di desa pasti sudah ada arsip, dan juga ada sistem yang digunakan untuk mengelola arsip tersebut. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa dalam konteks ini yang dimaksud dengan Arsip Masuk Desa adalah upaya untuk meningkatkan peran arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa pada khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa harus ada program Arsip Masuk Desa (AMD)? Pertanyaan ini tidak hanya sekedar dengan mengajukan standar normatif apa tujuan Arsip Masuk Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 08 Tahun 2009 tentang Program Arsip Masuk Desa. Perka tersebut menyatakan tujuan AMD sebagai upaya untuk meningkatkan peran arsip desa untuk peningkatan pelayanan prima pada masyarakat. Lebih dari itu mesti berpijak pada permasalahan yang muncul dalam pengelolaan arsip secara nasional, lebih khususnya di desa.

Seperti telah diketahui bahwa secara umum pengelolaan arsip di Indonesia masih jauh dari kondisi ideal. Pengelolaan arsip yang selama ini dilaksanakan masih jauh dari kemungkinan tersedianya arsip secara cepat, tepat, dan lengkap. Hal ini berarti masih jauh juga dari kondisi yang mampu menjamin keselamatan arsip. Pelaksanaan tata kearsipan masih jauh dari tujuan kondisi ideal yaitu sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, namun juga untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa desa merupakan ujung tombak dalam kehidupan bernegara. Dikatakan demikian karena desa merupakan pemerintah yang langsung berhadapan dengan rakyat. Dalam kaitannya dengan layanan

masyarakat, dituntut kehati-hatian. Saat ini dalam setiap transaksi yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat harus disertai bukti secara transparan. Kehidupan modern menuntut alat-alat bukti intelektual yang dapat memahami lingkungan secara mendalam dan penuh arti sehingga tidak terikat dan terpaku pada rasa kekinian (Soedjatmoko, 1980: 28). Ketertiban desa akan memberi kontribusi positif bagi ketertiban pengelolaan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, sekalipun Arsip Masuk Desa lebih ditujukan kepada pemerintah desa tetapi memiliki dampak terhadap perkembangan masyarakat desa pada umumnya. Logika ini didasarkan pada tuntutan kondisi yang menuntut akuntabilitas aparat desa dalam melaksanakan tugas layanan pada masyarakat.

Pertimbangan lain adalah bahwa kegiatan pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai pemerintahan daerah 'otonomi tingkat III'. Istilah 'daerah tingkat III' memang tidak dikenal dalam tata kenegaraan Indonesia tetapi secara riil desa merupakan suatu pemerintahan yang memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa memiliki otonomi untuk mengelola keuangan, baik belanja maupun pendapatan. Pemerintahan desa juga memiliki Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan lembaga 'legislatif' desa. Mengingat arti penting arsip mestinya desa harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang timbul di masyarakat, sebab hal yang fundamental dalam penyelenggaraan negara adalah adanya kemampuan institusi penyelenggara negara untuk dapat secara maksimal mengakomodasi kepentingan masyarakat (Ashiddiqie, Jimly, 2010: v).

Sekalipun tidak sama dengan pemerintahan desa, kantor lurah di perkotaan juga memiliki fungsi sama, yaitu sebagai ujung tombak yang langsung berhadapan dengan rakyat. Kantor lurah, dan juga kalurahan tidak memiliki otonomi sebagaimana desa. Akan tetapi sebagai lembaga yang berhadapan

langsung dengan masyarakat dalam hal layanan, kantor lurah memiliki tingkat risiko yang tidak jauh berbeda dengan pemerintahan desa. Apabila pemerintahan desa berhadapan dengan masyarakat yang relatif bersahaja, kantor lurah berhadapan dengan masyarakat yang kritis dengan permasalahan yang jauh lebih kompleks dibanding dengan permasalahan masyarakat desa. Harus menjadi pemahaman bersama bahwa sampai saat ini, banyak persoalan yang melingkupi birokrasi pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan publik (Simamora, Janpatar, 2013).

Sebagai suatu lembaga yang memiliki risiko 'tertekan' dari atas dan dari bawah, bukti-bukti rekaman kegiatan pemerintahan desa maupun kelurahan sewajarnya untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Kecerobohan dalam pengelolaan arsip di desa maupun kelurahan berarti menimbun potensi terjadinya konflik di masa yang akan datang. Dalam hal ini secara teoritis kantor desa, sebagai perwujudan dari lembaga publik di era modern dituntut adanya pengelolaan arsip secara modern pula. Hal ini disebabkan kehidupan modern menuntut kecepatan informasi. Bagi sebuah organisasi informasi merupakan salah satu sumber data yang memiliki peran strategis (Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono, 2005: 7-8). Boone menyebut informasi sebagai "*data relevant to the manager in making decision*" (Boone, Louis E, 1984: 453). Arsip merupakan salah satu sumber informasi. Apalagi tingkat pendidikan serta tingkat sensitibilitas masyarakat ada kecenderungan semakin meningkat.

Pemahaman tentang arsip perlu disamakan. Hal ini penting karena secara umum, permasalahan yang menimpa suatu negara boleh jadi bermula dari penggunaan istilah-istilah administrasi pemerintahan negara yang tidak jelas, rancu, ambivalen, multitafsir atau kontradiktif (Sudrajat, Tatang, 2016). Selama ini secara awam arsip hanya dipahami sebatas pertinggal, surat yang sudah purna pakai, atau dipahami juga sebatas pertinggal surat yang dikirim.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan Program AMD, kendala apa saja yang muncul dan alternatif apa yang ditawarkan agar program ini dapat berjalan?

Tulisan ini berusaha menganalisis salah satu program nasional yang terkait dengan bidang administrasi publik. Sebagai bidang yang tidak memiliki 'popularitas' yang cukup memadai, Program AMD tentu memiliki permasalahan yang sangat dimungkinkan tidak terakomodasi oleh para penggagasnya. Apalagi apabila program ini hanya 'numpang' popularitas ABRI Masuk Desa, Koran Masuk Desa, atau program lain yang pernah ada pada zaman orde baru.

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambaran tentang Desa

Desa dapat dipahami sebagai desa sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Istilah desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala desa (Sasrawan, Hedi, 20-01-2017). Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut *kampung* (Banten, Jawa Barat) atau *dusun* (Yogyakarta) atau *banjar* (Bali) atau *jorong* (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya KepalaKampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Pambakal di Kalimantan Selatan, Hukum Tua di Sulawesi Utara, Lurah Desa (Yogyakarta).

Sejak berlaku otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung (<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, 20-1-2017). Begitu pula segala istilah dan institusi di desa

dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan terhadap asal-usul dan adat istiadat setempat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa ahli memberikan pengertian desa yang berbeda-beda tetapi dari berbagai pengertian tersebut sebenarnya memiliki benang merah yang sama. R. Bintarto memberi pengertian desa sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sutarjo Kartohadikusumo menyatakan desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. Adapun William Ogburn dan MF Nimkoff menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas. Misra memberi batasan desa sebagai suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.” Menurut Paul H Landis, desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut (Fergiyono, Nico, 21-1-2017):

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa;
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan;
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Secara legal formal sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukan bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas, termasuk kewenangan dalam mengelola keuangan. Kepala Desa, yang di juga disebut lurah desa bukan staf dari camat, tetapi pejabat publik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam perkembangannya, desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Adapun Kewenangan desa meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, lurah desa dibantu perangkat desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, yang di Yogyakarta disebut *carik*, dan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa, sebagian mulai dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil,

atau dengan mekanisme pengangkatan sekretaris desayang memenuhi syarat menjadi Pegawai Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Selain sekretaris desa lurah desa juga dibantu Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk melayani dan mengayomi kepentingan masyarakat di wilayahnya.

Desa juga memiliki lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini merupakan lembaga 'legislatifnya' desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Sumber pendapatan desa terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya, dan partisipasi, hasil gotong royong; 2) Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota; 3) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan 6) Pinjaman desa. Adapun APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa

dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Arsip yang Tercipta di Desa

Untuk lebih memberikan gambaran tentang arsip perlu untuk dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pengertian arsip. Dari berbagai referensi dapat ditarik pengertian bahwa arsip merupakan informasi yang terekam (*recorded information*). **International Council on Archives (ICA)** menyebutkan:

“Recorded information document(s) regardless of form of medium created received and maintained by an agency, institution, organization, or individual in pursuance of its legal obligations or in the transaction of business”

Bidang kearsipan merupakan bidang yang sebenarnya lahir seiring dengan dikenalnya sistem administrasi tertulis. Demikian halnya dengan orang yang mengelola arsip. Sejak awal munculnya arsip, bidang ini lebih akrab dengan dunia pemerintahan. Hal ini dirunut dari asal kata arsip itu sendiri. Secara etimologis istilah arsip berasal dari bahasa Yunani “*arche*” yang berarti “*permulaan*”, menjadi “*ta archia*” selanjutnya menjadi “*archeon*” yang berarti “*gedung pemerintahan*”, dan kemudian dalam bahasa Latinnya berbunyi “*archivium*”. (Martono, Budi, 1994:9)

Arsiparis Belanda, S.Muller (1848-1922) dan R.Fruin (1857-1955) dalam bukunya yang berjudul *Handleiding Voor het Ordenen en Beschrijven van Archiven* diterbitkan tahun 1898 yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh arsiparis Amerika, Arthur H. Leavitt, dengan judul *Manual for Arrangement and Description of Archives* (1940). Kata “*archieff*” diartikan segenap dokumen tertulis, gambar dan badan cetakan yang secara resmi diterima atau dihasilkan oleh suatu badan administrasi atau

oleh salah seorang pejabatnya dan sebegitu jauh dokumen-dokumen ini dimaksudkan untuk tetap berada dalam pemeliharaan badan-badan atau pejabat yang bersangkutan.

Sir Hilary Jenkinson dalam bukunya *A Manual of Archives Administration* (Oxford 1922), *archives* diartikan sebagai dokumen yang disusun atau digunakan selama transaksi administratif dan eksekutif (pemerintah ataupun swasta) yang membentuk sebagian, dan kemudian dipelihara di tempat pemeliharaan guna memenuhi kebutuhan informasi oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas transaksi itu dan penggantinya yang sah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kegiatan pemerintahan paling bawah. Walaupun demikian permasalahan tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan pada tataran yang lebih tinggi. Perbedaan terletak pada tingkat kompleksitas serta bobot permasalahannya. Hal yang menjadikan pemerintahan desa menjadi cukup strategis adalah karena langsung berhadapan dengan rakyat. Napas kehidupan pemerintahan desa dengan mudah akan tercium oleh rakyat desa. Setiap gerak kepala desa beserta perangkatnya akan selalu dalam pengawasan rakyatnya. Hal yang menguntungkan bagi aparatur desa adalah karena rakyat menempatkan mereka sebagai tokoh yang mendapat kesetiaan dan penghormatan yang cukup tinggi dari rakyatnya.

Ragam permasalahan di desa akan mempengaruhi ragam informasi dari arsip yang tercipta. Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintahan desa, baik yang tercermin dari program kerja maupun yang muncul di masyarakat, di-cover oleh beberapa bidang. Secara umum pemerintahan desa dibagi menjadi Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pembangunan, dan Bagian keuangan. Di luar empat bagian tersebut adalah kepala desa dan sekretaris desa atau *carik*. Beberapa arsip yang tercipta antara lain:

1. Arsip korespondensi

Arsip yang termasuk dalam klasifikasi arsip ini adalah arsip yang tercipta akibat adanya kegiatan surat menyurat, baik dengan instansi pemerintah, perusahaan, organisasi swasta, maupun perorangan.

2. Arsip Keuangan

Arsip keuangan merupakan arsip yang tercipta sebagai akibat adanya transaksi keuangan. Ada dua macam arsip keuangan, yaitu arsip korespondensi keuangan dan arsip administrasi keuangan.

3. Arsip Tanah

Arsip tanah adalah arsip yang berkaitan dengan masalah tanah. Bukan hanya menyangkut tanah kas desa tetapi juga tanah dari rakyat desa setempat. Arsip ini merupakan arsip vital desa. Dikatakan demikian karena desa memiliki otoritas dalam kaitannya dengan masalah tanah. Jual, beli, sewa, pewarisan, dan sebagainya sepanjang itu terkait dengan tanah menjadi urusan pemerintah desa.

Dilihat dari bentuk medianya, arsip pemerintah desa didominasi oleh arsip dengan media kertas. Arsip dalam bentuk lain, seperti foto maupun produk teknologi informasi merupakan arsip yang masih cukup langka, terkecuali untuk desa-desa yang berada di daerah perkotaan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program AMD

Gambaran pelaksanaan program AMD yang telah digulirkan oleh pemerintah dapat dilihat dari konsep AMD, materi yang disampaikan, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kondisi desa sebagai objek AMD.

Konsep Program AMD

Arsip masuk Desa merupakan suatu langkah strategis yang memiliki arti penting bagi upaya tertib administrasi. Dinamika masyarakat yang memiliki kecenderungan semakin kritis, semakin membutuhkan bukti-bukti yang bersifat resmi. Tuntutan ini salah satunya hanya dapat ditempuh dengan adanya tertib arsip.

Masyarakat desa diasumsikan sebagai masyarakat yang bersahaja, penuh nilai kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Di sisi lain, masyarakat desa juga diasumsikan sebagai masyarakat yang belum memiliki manajemen administrasi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. Transaksi dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam urusan pembangunan dan pemerintahan, dilakukan tanpa disertai adanya kelengkapan administrasi yang memadai. Banyak hal yang dilaksanakan hanya didasarkan pada azas kepercayaan dan kekeluargaan.

Program AMD dimaksudkan sebagai suatu langkah besar menuju perbaikan administrasi pemerintahan di lapis paling depan yang secara langsung dengan masyarakat. Program pemerintah melalui Arsip Nasional RI (ANRI) ini dilaksanakan dengan standar kearsipan yang cukup memberikan kemudahan dan keselamatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Perka ANRI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program AMD, tujuannya adalah meningkatkan peran arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa. Sasaran Program AMD adalah meningkatnya pengelolaan arsip pada pemerintah desa yang sesuai dengan kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kegiatan Program AMD meliputi:

1. Sosialisasi kearsipan kepada Lembaga Kearsipan

Daerah tingkat provinsi dan kabupaten;

2. Penyusunan pedoman umum pengelolaan arsip pemerintah desa;
3. Pembangunan aplikasi pengelolaan arsip pemerintah desa;
4. Diklat pengajar kearsipan (TOT) dan diklat teknis pengelolaan arsip bagi sekretaris desa;
5. Bimbingan teknis kearsipan bagi perangkat desa;
6. Implementasi pengelolaan arsip pemerintah desa; dan
7. Evaluasi.

Sedangkan *Output* yang diharapkan dalam pelaksanaan Program AMD adalah:

1. Terwujudnya perangkat desa yang memahami tentang pentingnya arsip;
2. Tersusunnya pedoman pengelolaan arsip pemerintah desa;
3. Terbangunnya aplikasi pengelolaan arsip pemerintah desa;
4. Tersedianya infrastruktur yang handal dalam rangka mendukung program arsip desa; dan
5. Tersedianya perangkat desa yang mampu mengelola arsip pemerintah desa.

Outcome yang diharapkan dalam implementasi Program AMD adalah:

1. Terselenggaranya pemerintah desa yang baik, bersih dan akuntabel;
2. Terwujudnya tata kearsipan desa yang baik dan benar;
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan berbasis arsip kepada masyarakat;
4. Terjaminnya akurasi data yang berbasis masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
5. Terlestarikannya arsip-arsip yang memiliki pertanggungjawaban nasional.

Materi Arsip Masuk Desa

Materi kearsipan yang disampaikan dalam berbagai kegiatan Program AMD adalah sebagai berikut:

1. Tata Naskah Dinas

Materi tata naskah dinas merupakan materi yang membahas bagaimana naskah dinas dibuat. Materi ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kota. Terkait dengan jenis dan format naskah dinas didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Materi ini juga membahas mengenai: 1) Penyusunan naskah dinas (penyusunan naskah dinas, pengklasifikasian naskah dinas, penggandaan, sarana kelengkapan naskah dinas, dan pengetikan); 2) Penggunaan lambang dan stempel; 3) Kewenangan dan pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas.

2. Pengurusan Naskah Dinas

Pada materi pengurusan naskah dinas dibahas mengenai pengendalian naskah dinas masuk dan keluar. Materi ini meliputi: 1) Asas dan tanggung jawab pengurusan naskah dinas; 2) Prosedur pengurusan naskah dinas yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengendalian, dan pendistribusian naskah dinas, baik terhadap naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar di unit kearsipan dan unit pengolah.

3. Penataan dan Penggunaan Arsip

Materi Penataan dan penggunaan arsip dibahas mengenai peralatan, penataan berkas, dan temu balik arsip.

a. Peralatan

Dalam pelaksanaan penataan berkas membutuhkan peralatan yang secara khusus dirancang untuk membantu dalam

penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Peralatan yang dimaksud adalah peralatan yang tidak sekedar menyimpan arsip dan mempermudah penyimpanan maupun penemuan kembali, tetapi aman bagi keselamatan fisik arsip.

b. Prosedur Penataan Berkas

Sebelum dilakukan penataan, arsip yang ada harus dikelompokkan dalam bentuk berkas. Penyimpanan tidak dilakukan per *item* tetapi setidaknya per berkas (*file*). Ada beberapa bentuk berkas, yaitu yang didasarkan pada kegiatan (biasanya untuk arsip hasil surat menyurat/surat masuk keluar yang ditimbulkan dari kegiatan dari instansi), berkas berdasarkan kesamaan perihal (biasanya arsip hasil surat menyurat yang ditimbulkan dari kegiatan instansi lain, atau arsip yang tumbuh secara rutin di instansi itu sendiri seperti cuti, usul kenaikan pangkat dsb.), berdasarkan jenis (untuk produk peraturan perundang-undangan), dan *file* pegawai.

Dalam kegiatan penataan berkas harus dilakukan dengan prosedur pemberkasan yang benar dan dilaksanakan secara konsisten. Hal ini akan menentukan kualitas dari penataan berkas itu sendiri. Adapun prosedur penataan berkas meliputi:

- 1) pemeriksaan arsip (*inspecting*)
- 2) pengindeksan arsip (*indexing*)
- 3) pemberian kode (*coding*)
- 4) tunjuk silang (*cross reference*)
- 5) penyortiran (*sagregating*)
- 6) pelabelan (*labeling*)
- 7) penyimpanan berkas (*filing*)

c. Temu Balik

Kegiatan penemuan kembali arsip didasarkan pada adanya permintaan dari pengguna. Ketepatan dan kelengkapan menemukan kembali arsip sangat tergantung pada sistem pemberkasan yang digunakan. Para pengguna arsip biasanya menyebutkan nama masalah, nama badan, perihal, atau nomor sesuai kepentingannya atau apa yang diingatkannya.

4. Penyusutan Arsip

Materi penyusutan arsip meliputi pembahasan mengenai prosedur pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip. Arsip Pemerintah Desa pada hakikatnya merupakan arsip negara yang harus dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian halnya dengan penyusutan arsip, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintah daerah kabupaten. Pada prinsipnya arsip inaktif yang memiliki retensi kurang dari 10 tahun dapat dimusnahkan oleh Pemerintah Desa selaku pencipta arsip setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang diberi wewenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun arsip yang memiliki retensi 10 tahun atau lebih setelah memasuki masa inaktif wajib dipindahkan ke lembaga kearsipan kabupaten.

Materi tentang penyusutan arsip ini penting disampaikan di tingkat pemerintah desa karena tidak tertutup kemungkinan pada pemerintah desa terdapat arsip bernilai guna permanen atau arsip statis. Hal ini karena adanya dinamika dalam tata pemerintahan di Indonesia. Di beberapa daerah dilakukan penggabungan beberapa desa (dulu disebut kelurahan) menjadi satu desa (satu kelurahan). Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak desa yang merupakan gabungan dari beberapa kelurahan yang ada sebelumnya. Sebagai contoh Desa

Sumberagung yang merupakan gabungan antara Kelurahan Bulus, Kelurahan Barongan, dan Kelurahan Sumber. Demikian juga Kecamatan Pleret di Bantul DIY merupakan gabungan antara Kecamatan Gondowulung dan Kecamatan Pleret. Contoh yang cukup menarik adalah Kecamatan Imogiri yang merupakan peleburan dua kecamatan yang semula merupakan dua wilayah dari dua Provinsi yang berbeda, yaitu Kecamatan Imogiri Yogyakarta (Wilayah Kabupaten Bantul DIY) dengan Kecamatan Imogiri Surakarta (Wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah). Adanya dua wilayah yang berada di tengah-tengah Kabupaten Bantul ini sebagai dampak sejarah Mataram yang dibagi menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta yang masing-masing memiliki wilayah di daerah Imogiri. Inilah yang disebut daerah *enclave*. Daerah *enclave* juga terdapat di daerah Kotagede, yang semula dibagi menjadi Wilayah Kotagede Yogyakarta dan Wilayah Kotagede Surakarta. Perubahan tata pemerintahan ini mesti menciptakan arsip yang memiliki nilai guna statis.

Masih banyak kasus yang memungkinkan pemerintah desa memiliki arsip statis, baik yang berkaitan dengan peran desa pada waktu perjuangan, adanya peristiwa penting, kunjungan pejabat negara, dan kasus penting lain yang memiliki nilai strategis bagi daerah. Terhadap arsip-arsip yang memiliki nilai guna statis, pemerintah desa wajib menyerahkan kepada lembaga kearsipan kabupaten.

Materi pengelolaan arsip dalam Program AMD ini target yang disampaikan meliputi pembuatan naskah dinas, pengurusan surat, penataan dan penggunaan arsip, serta penyusutan arsip. Adapun lingkup yang menjadi obyek AMD adalah arsip yang tercipta pada pemerintah desa/kelurahan, dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), maupun kelurahan.

Secara lebih rinci dalam Program AMD ini tidak mengacu pada tata kearsipan suatu kementerian tetapi memberikan alternatif bagi desa setempat sesuai dengan kondisi yang ada pada desa. Dalam pengurusan surat sarana pencatatan yang digunakan diantaranya kartu kendali, buku agenda, atau sarana lain baik secara manual maupun elektronik disesuaikan dengan kebutuhan desa. Demikian halnya kode klasifikasi, menyesuaikan dengan kode klasifikasi maupun Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berlaku pada Pemerintah Daerah setempat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Globalisasi yang didukung dengan revolusi di bidang teknologi informasi selain memberikan dampak bagi kecepatan arus informasi juga memberikan kemudahan bagi proses 'pengkopian' kebijakan (Nin~o-Zarazu' a, Miguel,20-1-2017). Kebijakan yang diterapkan di suatu negara dengan mudah ditransfer bahkan ditiru oleh negara lain, kebijakan suatu daerah dijiplak daerah lain, atau kebijakan pada bidang tertentu dimodifikasi di bidang lain.

Dalam kaitannya dengan arsip di era global ini, tidak banyak yang menyadari bahwa arsip merupakan kebutuhan hidup bagi manusia. Dapat dikatakan bahwa arsip merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang keempat, selain pangan, sandang, dan papan (Dwi Rokhmatun, Burhanudin, 2012: 11). Dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun institusi, baik dalam lingkup global maupun lokal sama sekali tidak dapat mengabaikan keberadaan arsip.

Sebagai kebutuhan hidup manusia di jaman modern, tentu arsip menjadi komponen yang tidak bisa ditinggalkan untuk berbagai kepentingan. Urusan yang terkait dengan masalah kehidupan bernegara, bermasyarakat, maupun kepentingan

bisnis selalu membutuhkan arsip. Artinya arsip akan hadir dalam setiap urusan manusia, baik yang berkaitan dengan urusan yang bersifat pribadi, organisasi publik, maupun bisnis.

Kehidupan suatu organisasi senantiasa memerlukan informasi dalam mendukung kinerjanya. Informasi merupakan salah satu sumber data yang memiliki peran strategis bagi sebuah organisasi (Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono, 2005: 7-8). Boone menyebut informasi sebagai "*data relevant to the manager in making decision*" (Boone, Louis E, 1984: 453). Program AMD secara mendasar sebenarnya merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan arsip desa secara efektif dan efisien. Program ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintahan desa, termasuk kelurahan, untuk mengelola arsip di lingkungan pemerintahan desa sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih mendasar lagi adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya guna menjamin perlindungan hak-hak keperdataan rakyat. Penyelenggaraan kearsipan pemerintahan desa yang andal merupakan bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional. Hal ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Penyelenggaraan kearsipan secara baik dan benar akan menjamin terwujudnya *good governance*. Penyelenggaraan tata kearsipan desa yang baik akan mendukung transparansi, memberikan jaminan ketersediaan informasi yang valid, dan akuntabel. Ruh dari *good governance* adalah menempatkan birokrasi pemerintah sebagai pelayan, sehingga dituntut adanya perubahan orientasi ke arah birokrasi sebagai pelayan publik. (Wicaksono, Kristian Widya, 2006: 51) Keberhasilan transaksi di semua aspek tergantung pada efektivitas manajemen (Ogunlela, Gabriel Oyebanjo and Lawrence Mpele Lekhanya, 2016).

Pemerintahan Desa dalam hal penyelenggaraan

urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penyelenggara administrasi pemerintahan yang bermuara pada penciptaan berbagai jenis arsip sebagai akibat dari kegiatan yang dilaksanakan. Arsip-arsip tersebut berfungsi sebagai sumber informasi manajemen pemerintahan desa dan merupakan memori kolektif daerah, serta bagian dari memori kolektif bangsa. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki otonomi, pemerintah desa tidak sekedar melaksanakan kebijakan dari penyelenggara pemerintahan yang lebih tinggi, baik pemerintah kabupaten maupun pusat, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan kebijakan tersebut dengan kultur yang ada di masyarakatnya. Hal ini karena bagaimanapun antara otonomi dengan kultural memiliki relevansi untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pemerintahan (Kagitcibasi, Cigdem, 2005: 403-422). Harus dipahami bahwa budaya memiliki kaitan dengan budi dan akal manusia (Hutagalung, Nimrot Parasian, dkk, http://ebookinga.com/pdf/jurnal-internasional-tentang-budaya_14-7-2016). Artinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat diintegrasikan dengan budaya masyarakat di mana kebijakan tersebut diterapkan karena akan mempengaruhi kreatifitas dan upaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Permasalahan Desa

Otonomi daerah yang digulirkan pasca reformasi diharapkan menjadi langkah pembaharuan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga

diharapkan mampu memberdayakan potensi daerah, termasuk potensi desa yang ada pada masing-masing daerah. Realitasnya, setelah masyarakat Indonesia berada dalam era otonomi daerah, berbagai problem bermunculan dan implemenasi atas konsep otonomi itu memunculkan banyak konflik baik vertikal maupun horizontal (Malta, Husain, <http://jurnal-ekonomi.org/>, 13-7-2016). Tidak sebatas persoalan ekonomi, tetapi pembangunan dari aspek administrasi pemerintahan pada tataran terbawah pun memiliki permasalahan yang terkait dengan kondisi tersebut. Tidak tertutup kemungkinan pada penyelenggaraan pemerintahan desa pun akan dipengaruhi oleh orientasi politik kepala desa apakah sejalan dengan kepala daerah atau tidak. Apabila asumsi ini benar maka ketimpangan antara desa satu dengan yang lain selain di sebabkan oleh potensi desa juga akan lebih diperparah dengan perlakuan yang berbeda karena ketidaksesuaian orientasi politik antara kepala desa dengan kepala daerah.

Berdasarkan gambaran dari uraian tersebut, dimungkinkan bahwa kondisi antara desa satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukan sebatas sebutan atau jabatan kepala desanya saja tetapi juga menyangkut kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya. Desa lebih terkonsentrasi untuk wilayah bukan perkotaan, tetapi kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya desa akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kenyataannya ada desa yang memiliki wilayah daerah perkotaan, seperti Desa Caturtunggal di Sleman DIY, wilayahnya meliputi daerah perkotaan di sebelah timur laut Kota Yogyakarta. Terdapat pusat-pusat bisnis, lembaga pemerintah pusat maupun daerah, dan perguruan-perguruan tinggi besar seperti UGM, UII, UPN, UIN di wilayah Desa Caturtunggal.

Hal tersebut akan lebih terlihat ketika dibanding dengan wilayah desa lain di wilayah Gunung Kidul DIY. Beberapa wilayah desa di Gunung Kidul dapat

dikatakan sebagai desa 'miskin'. Bahkan ketika terjadi kekosongan lurah desa, tidak satu pun warga yang berminat melamar menjadi lurah desa. Selain karena kondisi geografisnya merupakan daerah pegunungan yang gersang dan sulit untuk mendapatkan sumber mata air, kondisi sosialnya juga terbelakang. Kondisi ini yang lebih memprihatinkan lagi misalnya di Desa Lapataman Kabupaten Sumenep. Digambarkan oleh petugas arsip dari lembaga kearsipan setempat bahwa desa tersebut sulit dijangkau (Umar, Fatimah, 14-1-2017). Selain itu, gambaran balai desa juga jauh dari gambaran sebuah kantor. Bahkan ketika dilakukan pembinaan dari lembaga kearsipan dilakukan di rumah lurah desa setempat. Arsipnya pun tidak sebanyak yang diperkirakan, apalagi sarana penataan dan penyimpanannya.

Gambaran tersebut akan menjadi sangat tidak berimbang kalau pemetaan dilakukan di desa-desa di Jawa dan di luar Jawa. Antara desa satu dengan desa lain di Jawa dalam berbagai aspek tidak merata. Apalagi dibanding dengan kondisi desa-desa yang ada di pedalaman Kalimantan dan Papua. Jangankan membayangkan gedung balai desa dengan berbagai kelengkapan administrasi atau arsip yang tercipta dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk menuju ke desa yang ada di sana pun tak terbayangkan orang tetap bisa mengenakan pakaian dinas yang lengkap. Medan yang cukup berat, jarak yang jauh, ditambah kemungkinan gangguan di perjalanan adalah gambaran betapa kondisi desa di pedalaman Kalimantan dan Papua tidak sebanding dengan yang ada di Jawa.

Gambaran tentang kesenjangan ini perlu dikemukakan bukan dalam rangka menilai kemajuan dan keterbelakangan tetapi sebagai suatu *warning* bagi program AMD. Artinya Program AMD tidak bisa dipukul rata. Konsep teknis AMD perlu untuk disesuaikan dengan kondisi desa setempat. Peluncuran program dengan konsep 'belakang meja' adalah suatu *kekonyolan* dan kesia-siaan yang justru

akan menimbulkan kesenjangan baru.

Akan berbeda dengan konsep AMD-nya TNI, dapat dilaksanakan untuk desa yang maju, dan dapat pula dilaksanakan untuk desa tertinggal yang akan memberikan manfaat. Tidak perlu konsep yang bertele-tele, karena AMD-nya TNI lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi desa.

Kendala dalam Pelaksanaan Program AMD

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sebagian besar menghadapi masalah terkait dengan administrasi dari transformasi masyarakatnya. Transformasi ke arah kemajuan, kemakmuran, keadilan, dan partisipasi. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pembangunan terutama masalah administrasi negara (Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja AR., 1984: 89). Alasannya adalah karena hal ini lebih bersifat praktis yaitu negara menjadi pemegang otoritas sekaligus wadah dari unsur-unsur modern dalam masyarakat. Konteks ini diasumsikan bahwa sebagian besar masyarakat negara-negara berkembang masih merupakan masyarakat tradisional serta unsur-unsur modern nonpemerintah masih sedikit jumlahnya. Keadaan demikian, aparatur negara berperan sebagai alat utama dalam mengelola atau sebagai administrator dalam usaha-usaha pembangunan. Faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional terletak pada kemampuan aparaturnya. Kondisi ini berlaku dari aparatur pemerintah tingkat pusat sampai aparatur desa. Dapat dikatakan bahwa bila aparaturnya handal maka akan membawa kemajuan pada sektor di lokasi tersebut.

Aparatur desa merupakan intisari dari potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada desa, sekaligus representasi sosial-budaya masyarakatnya. Tingkat pendidikan, pola pikir, etos kerja, serta tradisi yang melingkupinya akan direpresentasikan pada aparatur desa. Kondisi ini akan mempengaruhi pelaksanaan AMD. Apalagi program ini lebih banyak berkaitan

dengan pengelolaan catatan dan rekaman dari proses administrasi negara pada tingkat paling bawah yang menjadi titik lemah dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mewujudkan pengelolaan arsip yang sistemik bukan persoalan mudah. Selain faktor aparaturanya, sebenarnya permasalahan yang dihadapi dalam program AMD ini bersumber pada ketidakmerataan potensi, kondisi, dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Desa. Apabila program ini diperlakukan secara nasional dalam standar yang sama, maka permasalahan tersebut akan semakin rumit. Kesenjangan potensi, kondisi, maupun sumber daya yang ada antara desa-desa yang ada di Jawa dengan yang ada di luar Jawa, khususnya pulau-pulau terpencil. Demikian juga apabila dibandingkan dengan kelurahan, yang relatif berada di wilayah perkotaan.

Kondisi Balai Desa sebagai 'ibukota' Desa di Indonesia dapat dikatakan sebagian besar di bawah rata-rata. Untuk pemerintah desa yang kondisinya berada di atas rata-rata, apapun bentuk program AMD relatif dapat memberikan respon positif terhadap program AMD. Akan tetapi bagi desa yang berada pada garis rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata menakar keberhasilan program AMD sama dengan mengharap 'tumbuhnya jamur di musim kemarau'. Ketidakmerataan ini bukan hanya menyangkut satu aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tetapi menyangkut berbagai aspek.

SDM desa dari kepala desa, sekretaris desa, hingga perangkat lain lebih cenderung menjadi sosok yang lebih mengedepankan kewibawaan dibanding kompetensi teknis. Sekalipun basis pendidikan telah disyaratkan untuk memangku jabatan tersebut tetapi banyak juga yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini berbeda kasus untuk desa-desa yang berada di Pulau Jawa. Aspek SDM tidak dapat diukur dari satu sisi semata tetapi hal-hal yang berkaitan dengan wawasan dan motivasi akan mempengaruhi

pola pikir mereka. Kebersahajaan, jiwa gotong-royong, kejujuran, dan sikap saling percaya masyarakat desa menjadi kekayaan berharga mereka. Di sisi lain, hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang kontraproduktif apabila dikaitkan dengan administrasi modern yang senantiasa akrab dengan catat-mencatat. Sikap bersahaja, jiwa gotong-royong, serta sikap saling mempercayai dalam pola kehidupan masyarakat desa cenderung mengabaikan bukti-bukti tertulis. Transaksi yang dilakukan dalam kehidupan pemerintah desa kadang diwarnai kondisi tersebut. Kewibawaan yang dimiliki oleh pimpinan desa kadang menyebabkan masyarakat desa menjadi pihak yang tidak berdaya untuk menuntut bukti tertulis dalam pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Aspek lain yang mempengaruhi pola penyelenggaraan pemerintahan desa adalah motivasi untuk menerima perubahan. Kemapanan yang mereka rasakan menjadikan kehidupan mereka berada dalam kondisi yang relatif tenteram. Kondisi ini menempatkan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai rutinitas serta *status quo*. Artinya, apa yang setiap hari harus dihadapi oleh kepala desa berikut para aparat desa adalah tugas rutin yang memiliki pola yang sama dari hari ke hari. Demikian juga masyarakat memahaminya dalam pengertian yang tidak jauh berbeda. Pada kondisi ini, penyelenggaraan tata kearsipan akan mengalami kendala. Selain pada aspek penciptaan, perubahan pada aspek sistem tidak mudah untuk dilakukan. Keengganan beralih dari *status quo* ke tata kearsipan yang lebih berbasis pada sistem dianggap sebagai suatu beban. Hal ini akan lebih rumit ketika dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa di lingkup pemerintahan desa memiliki SDM yang sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Pelaksanaan Program AMD bagaimanapun sederhananya membutuhkan SDM. Dari segi kuantitas desa memiliki SDM yang sangat terbatas. Hal ini terkait dengan kemampuan desa untuk

menggaji karyawan. Banyak desa yang memberikan gaji bagi para aparatnya maupun karyawannya dengan tanah kas desa. Oleh karena itu, untuk mengangkat karyawan mesti mempertimbangkan kemampuan desa. Oleh karena itu, karyawan di lingkungan pemerintah desa sangat terbatas. Bisa jadi tidak setiap kepala bagian memiliki staf.

Kondisi lain yang berpotensi menjadi kendala bagi pelaksanaan AMD adalah ketidaksamarataan kemampuan anggaran. Seperti diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). Sekalipun tidak tertutup kemungkinan adanya anggaran lain, baik APBD, APBN, dana hibah dan sebagainya, tetapi diasumsikan bahwa desa membiayai dirinya sendiri. Aspek kemampuan keuangan akan menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program. Bagi desa-desa yang termasuk 'desa kaya' atau desa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata program apapun yang dilaksanakan pemerintah tidak akan menjadi beban. Bagi desa-desa yang berada di bawah garis rata-rata, kegiatan di luar pelaksanaan tugas rutin menjadi beban.

Program AMD merupakan program yang memerlukan pembiayaan. Arsip Nasional RI sebagai pemilik program sebatas meluncurkan program berikut pelatihan yang diperlukan, tidak sepenuhnya disertai dengan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Berbagai sarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan program ini hanya sedikit yang dipenuhi oleh ANRI. Demikian juga dengan lembaga kearsipan provinsi maupun kabupaten memberikan bantuan yang bersifat stimulan. Berbagai kelengkapan yang diperlukan selanjutnya menjadi beban bagi desa yang bersangkutan. Sekalipun tidak dalam jumlah yang besar tetapi bagi desa tertentu hal ini dianggap sebagai beban. Artinya program AMD hanya akan dapat diselenggarakan di desa-desa yang berkemampuan terbatas di awal tahun penyelenggaraan (tidak berkelanjutan).

Kemampuan keuangan erat kaitannya dengan keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana. Desa-desa di daerah maju secara sosial dan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sarana kearsipan seperti *filing cabinet*, rak, boks arsip, map, penyekat, bahkan perangkat komputer bukan menjadi kendala. Sebaliknya, bagi desa-desa yang hanya mengandalkan hasil bumi hal tersebut pengadaan sarana-sarana tersebut menjadi masalah. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidakadaan ruangan. Banyak pemerintah desa yang memiliki ruang kerja bagi para aparat desa yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menyediakan ruang untuk pengelolaan arsip. Keterbatasan mencakup berbagai aspek. Banyak desa yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan seadanya, bahkan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari desa mereka. Hal ini ditambah dengan arsitektur bangunan yang tidak memiliki konsep, lantai tidak disemen, dinding dari tumbuh-tumbuhan, serta atap yang bersifat ala kadarnya.

Kendala aspek administrasi dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa lebih cenderung pada *status quo*. Artinya, apa yang mereka kerjakan selama ini akan diterapkan dan diwariskan pada generasi berikutnya. Bekerja secara sistemik dianggap sebagai sesuai yang akan membebani mereka. hal-hal di luar yang memang prinsipil sangat sedikit perubahan yang dilaksanakan. Kondisi semacam ini tentu tidak kondusif bagi program AMD. Jangankan sistemnya, terhadap arsipnya pun mereka tidak meletakkan sebagai sesuatu yang cukup penting.

Selain kendala tersebut, kondisi riil pengelolaan arsip di desa juga perlu untuk dikemukakan. Hal ini menjadi dasar bagi upaya mengadakan perubahan terhadap sistem yang berlaku pada saat itu.

1. Pengendalian surat

Selama ini yang lazim digunakan untuk

pengendalian surat di lingkungan pemerintah desa adalah buku agenda. Surat dicatat berulang kali, baik di sekretariat maupun pada masing-masing bagian. Model agendanya sangat sederhana, dengan tidak disertai kode klasifikasi maupun indeks surat maupun indeks berkasnya. Buku agenda juga digunakan sebagai buku ekspedisi.

2. Penyimpanan Arsip

Hampir tidak ada sistem dalam penyimpanan arsip di kebanyakan pemerintah desa. Hanya pada pemerintah desa yang memang telah memperhatikan bidang kearsipan yang menerapkan sistem penyimpanan arsip. Mayoritas pemerintah desa penyimpanan berkasnya tidak ada sistem tertentu yang ditentukan. Mereka meletakkan arsip di atas meja kerja. Arsip tersebut ketika telah selesai digunakan kemudian dipindahkan ke gudang. Gudang ini bukan gudang arsip tetapi gudang yang berisi berbagai barang yang perlu disimpan. Pengecualian untuk arsip yang dianggap arsip vital, terutama arsip-arsip tanah dan arsip keuangan. Terhadap arsip ini pemerintah desa memperlakukan sebagai arsip yang perlu disimpan secara khusus. Arsip tersebut tidak disimpan menjadi satu dengan arsip lain tetapi disimpan di lemari tersendiri. Jangan diasumsikan dengan lemari khusus yang memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Lemari kayu yang cukup tua dengan sistem pengamanan yang sangat sederhana adalah tempat khusus yang kebanyakannya digunakan untuk menyimpan arsip-arsip bernilai vital ini.

3. Penyusutan

Bagi kebanyakan pemerintah desa istilah penyusutan identik dengan pemusnahan arsip. Tidak ada sistem maupun prosedur yang diperlukan dalam kegiatan penyusutan arsip

yang mereka lakukan. Satu-satunya pertimbangan yang digunakan adalah arsip yang dimusnahkan tidak diperlukan lagi dalam kegiatan pemerintah serta pemanfaatan ruangan. Walaupun demikian kebanyakan juga tidak serta merta memusnahkan arsip yang tidak lagi mereka gunakan.

Kendala program AMD bukan hanya dari aspek obyek AMD tetapi juga lembaga pembina. Apabila program ini hanya bergantung pada Arsip Nasional RI (ANRI) maka ANRI akan 'kehabisan energi', sedangkan lembaga kearsipan daerah yang ada belum memiliki sumber daya yang merata. Apabila dipaksakan hal ini justru akan menjauhkan program ini dari keberhasilan. Artinya, dengan kondisi yang ada saat ini apabila lembaga kearsipan daerah dipaksa untuk melaksanakan program ini akan banyak mengalami kendala, sekalipun mereka sudah mengikuti pendidikan dan latihan. Keterbatasan SDM, sarana, dan anggaran adalah kendala yang memiliki kemungkinan kuat untuk menghambat keberhasilan program ini.

I. Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan program AMD tidak bisa dilakukan dengan pola 'pukul rata'. Strategi dan materi yang digunakan dalam program AMD mesti harus disesuaikan dengan kondisi desa yang menjadi sasaran program AMD. Tujuan program AMD adalah sebagai upaya penyelamatan arsip dari tingkat *grassroot* sehingga pelaksanaan program ini perencanaan yang matang. Konsep yang jelas, strategi yang tepat, materi yang sesuai kebutuhan menjadi kunci keberhasilan program ini. Beberapa langkah alternatif yang mesti harus dilakukan terkait dengan hal tersebut adalah:

1. Perumusan konsep secara jelas

Peluncuran suatu program kerja seperti Program AMD ibarat seperti persiapan perang. Memenangkan pertempuran tidak cukup hanya ditopang kecanggihan senjata, atau hanya kehandalan tentara, tetapi berbagai aspek akan saling memberi kontribusi bagi keberhasilan untuk memenangkan pertempuran. Berdasarkan asumsi tersebut maka dalam pelaksanaan Program AMD perlu dirumuskan secara matang hal-hal yang terkait dengan program tersebut. Konsep harus dirumuskan secara jelas, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi/pengawasan. Konsep yang dirumuskan perlu memperhatikan kondisi riil di lapangan. Tanpa konsep yang jelas program ini tidak akan berjalan maksimal, bahkan akan menjadikan dunia kearsipan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa semakin terpinggirkan dan menjadi beban.

2. Pemetaan

Bergerak di medan pertempuran memerlukan peta agar penyerangan dapat dilakukan secara tepat, baik sasaran maupun kekuatan yang diperlukan. Demikian halnya dengan pelaksanaan Program AMD. Indikasi adanya ketidakmerataan kondisi desa yang cenderung tidak berimbang maka perlu adanya langkah pemetaan. Pemetaan ini diperlukan untuk merumuskan klasifikasi desa yang menjadi sasaran program. Dengan pemetaan ini maka dapat dilakukan model sosialisasi maupun bimbingan teknis secara tepat. Desa yang masuk dalam kondisi sangat memadai tidak akan disamakan dengan desa yang memiliki kondisi sangat tidak memadai.

Selain pengklasifikasian desa sesuai dengan kondisinya diperlukan juga pembakuan paket Program Pembinaannya. Dalam hal ini masing-masing klasifikasi desa diberikan paket pembinaan sesuai dengan klasifikasinya. Paket

pembinaan ini dibuat berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing klasifikasi desa.

Untuk keperluan ini, dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok desa yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang lebih mengetahui kondisi desa di wilayahnya. Dalam rangka pemetaan ini dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu :

a. Desa Klasifikasi A

Desa yang masuk klasifikasi A adalah desa yang benar-benar memiliki sumber daya yang mandiri, baik yang menyangkut SDM, anggaran, prasarana dan sarana, dan kesiapan sistem. Kemandirian ini diperlukan, selain akan memberikan kemudahan dalam sosialisasi hal yang jauh lebih penting adalah keberlanjutan dari program ini. Kriteria kemandirian ini dapat dirumuskan oleh lembaga kearsipan daerah. Dari SDM disyaratkan bagi desa yang memiliki petugas arsip secara khusus dan dengan basis pendidikan petugas setidaknya SMA. Selanjutnya dari aspek anggaran desa yang masuk klasifikasi A adalah desa yang dapat menganggarkan secara khusus untuk bidang kearsipan. Adapun dari ketersediaan prasarana dan sarana, desa yang masuk klasifikasi A adalah desa yang memiliki ruang yang dapat digunakan secara khusus untuk ruang simpan arsip serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana. Hal yang tidak bisa diabaikan adalah adanya sistem administrasi kearsipan yang telah dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Apapun sistem yang ada, setidaknya menjadi embrio bagi pelaksanaan sistem selanjutnya. Termasuk klasifikasi ini adalah kantor lurah. Hal ini menjadi pertimbangan karena kelurahan cenderung terletak di wilayah perkotaan.

Selain dari kondisi desanya, desa yang masuk klasifikasi A dapat dilaksanakan Program AMD Paket 1. Pada paket 1 selain menekankan pengelolaan

arsip secara sistemik, juga dikenalkan kearsipan dengan basis teknologi informasi.

b. Desa Klasifikasi B

Untuk klasifikasi ini dikelompokkan desa yang memiliki tempat yang dapat dijadikan ruang simpan arsip, tidak memiliki sarana kearsipan, dan terbatas SDM-nya. Keterbatasan ini tidak menghambat bagi upaya peningkatan pengelolaan arsip dengan suatu catatan tugas ini dapat disampirkan pada SDM yang ada. Klasifikasi ini diberikan materi paket 3 yang menekankan pada upaya pengelolaan arsip secara sistemik, serta stimulan sarana.

c. Desa Klasifikasi C

Desa yang masuk ke klasifikasi C adalah desa yang memiliki ruang kerja terbatas, tidak memiliki sarana kearsipan sama sekali, dan SDM terbatas yang tidak memungkinkan untuk disampirkan tugas lain. Pada klasifikasi ini diberikan paket 3 yang lebih menekankan pada materi teknis yang benar-benar aplikatif, seperti pencatatan surat serta penataan berkas secara benar.

d. Desa Klasifikasi D.

Untuk klasifikasi ini dimasukkan desa yang sama sekali tidak memiliki sumber daya yang memadai. Ruang kerja aparat tidak memadai, sarana tidak memadai, dan kekurangan SDM. Untuk klasifikasi terakhir hal yang perlu dilakukan dalam program Arsip Masuk Desa paket 4 yang lebih menekankan sosialisasi serta penanaman pemahaman akan arti penting arsip.

3. Penyiapan Sumber Daya

Setelah dilakukan pemetaan langkah berikutnya adalah penyiapan sumber daya, baik yang terkait dengan personil, anggaran yang dibutuhkan, sarana, maupun panduan yang dibutuhkan. Persiapan ini sudah tentu mesti harus disesuaikan dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Pada langkah ini juga disiapkan penjadwalan yang tepat sehingga meminimalisasi kemungkinan terjadinya

penumpukan kegiatan, ketimpangan sasaran, ketidakmerataan, serta ketidaktepatan.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM pembina yang akan melaksanakan kegiatan Program AMD harus disiapkan dengan baik. SDM yang ditempatkan bukan sekedar dibagi atas dasar pemerataan tugas tetapi harus dipertimbangkan jumlah personil, waktu yang dibutuhkan, kemampuan personil, serta desa sasaran yang akan menjadi sasaran Program AMD. Pola penjadwalan tidak hanya atas dasar pemerataan tugas, apalagi pemerataan honorarium. Program AMD memerlukan perhitungan dari berbagai aspek secara cermat. Bukan hanya aspek teknis tetapi juga kemampuan SDM untuk dapat memahami sosiologi serta kultur masyarakat desa yang akan menjadi sasaran. Ketidakmampuan SDM menyesuaikan dengan sosio-kultural masyarakat desa maka dapat diibaratkan "naik perahu di atas pegunungan". Komunikasi dengan masyarakat desa, terutama yang berada di daerah kawasan pedesaan, tidak sekedar menyangkut kecanggihan berorasi. Kemampuan memahami dan menyesuaikan dengan budaya desa yang bersangkutan menjadi sarana yang sangat efektif bagi keberhasilan program ini. Masyarakat desa, termasuk aparat desa, yang relatif bersahaja tentu akan menunjukkan penolakannya apabila disuguhi hal-hal yang bersifat demonstratif, teoritis, dan eksklusif. Gambaran, contoh, ataupun hal-hal yang setiap hari mereka alami lebih bisa diterima daripada disuguhi hal-hal yang asing bagi mereka.

Demikian juga yang terkait dengan psikologi sosial masyarakat desa harus menjadi bekal bagi personil yang akan terjun ke desa. Sikap menggurui, serta menempatkan mereka sebagai obyek, mereka sama sekali tidak akan menentang tetapi tidak akan mendapat respon yang baik.

b. Anggaran

Bagi petugas yang akan melaksanakan Program Arsip Masuk Desa tentu tidak cukup dibekali hal-hal yang bersifat teknis di bidang kearsipan. Penyiapan logistik, baik yang terkait dengan operasional program maupun kotra prestasi bagi personil yang melaksanakan kegiatan ini perlu disiapkan secara matang. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan antara anggaran yang tersedia dengan rencana kegiatan secara keseluruhan.

Hal paling mendasar dalam menunjang AMD adalah membangun SDM. Manusia menjadi aktor utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibangun adalah SDM. Pembangunan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan SDM yang akan menjadi *agent of change*. (Syah, Muhibbin, 1995) Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang benar-benar meletakkan dasar pemikiran yang berorientasi untuk mampu mengadakan perubahan secara kultural, bukan sekedar tempat memperoleh gelar dan status.

Dalam rangka melakukan langkah 'revolusioner' dalam mewujudkan *reformasi birokrasi* desa diperlukan seorang kepala desa yang benar-benar mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki kharisma, bersih, kemauan keras untuk menumbuhkan *needs for achievement*, visioner, dan bukan partisan. Tanpa pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut sulit untuk melakukan perubahan. Secara teoritis pemimpin tidak dapat dibentuk atau dilahirkan tetapi pemimpin adalah anak jaman. Menurut Sugeng pemimpin yang demikian kadang tidak diketahui keberadaannya. (Sugeng, 2016) Dalam hal ini yang disebut dengan seorang pemimpin adalah pemberi semangat (*encourager*), motivator, inspirator, dan dinamisator. (Sugeng, Y, 2007)

KESIMPULAN

Program AMD merupakan program yang memiliki arti strategis bagi penyelamatan arsip di masa depan. Selain itu juga memiliki arti penting bagi pengelolaan arsip yang berdayaguna dan berhasilguna. Ini merupakan upaya antisipasi terhadap dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan yang muncul akibat dari perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat menuntut ketersediaan arsip yang cepat, tepat, dan lengkap. Program ini juga sebagai upaya mengejar ketertinggalan dalam pengelolaan administrasi negara, khususnya pada tataran paling bawah. Hal ini dikarenakan secara prinsip program arsip masuk desa adalah upaya modernisasi pengelolaan pilar utama dalam pelaksanaan administrasi negara berupa catatan atau rekaman kegiatan dalam bentuk arsip. Secara tidak langsung hal ini juga merupakan langkah dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara.

AMD sebagai program yang memiliki arti strategis tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga menjelma menjadi kegiatan yang kurang efektif. Kejelasan konsep, pemetaan terhadap kondisi desa yang ada di tanah air, kesiapan sumber daya manusia, anggaran, sarana, maupun metode akan menjadi komponen penentu kesinambungan program ini. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Program AMD bersumber pada ketidakmerataan potensi, kondisi, dan sumber daya, antara lain kesenjangan antar desa yang dimiliki Pemerintah Desa di bidang anggaran dan SDM, perbedaan sosial budaya. Alternatif solusi yang dapat dilaksanakan dalam implementasi Program AMD antara lain perumusan konsep yang jelas, pemetaan kondisi dan sumber daya desa, serta penyiapan SDM dan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly, 2010, "*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara pasca Reformasi*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Boone, Louis E., 1984, "*Principle of Management*". New York: Random House.
- Fadhillah, Khoerun Nisa, "*Pembangunan Kearsipan Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia*", Jurnal Kearsipan, Vol. 7, 2012, http://www.anri.go.id/assets/download/jurnal_kearsipan_Jurnal-Vol-7-2012.pdf, diunduh tanggal 21-1-2017, pukul 08.16.
- Fergiyono, Nico. "*Ciri-ciri Desa dan Kota*", <http://nicofergiyono.blogspot.co.id/2014/06/ciri-ciri-desa-kota.html>, diunduh tanggal 21-1-2017, pukul 08.05.
- Hutagalung, Nimrot Parasian, dkk. "*Globalisasi Budaya Ditengah Masalah Identitas Nasional*", <http://ebookinga.com/pdf/jurnal-internasional-tentang-budaya>, diakses tanggal 14-7-2016, pukul 12.07.
- Kagiticibasi, Cigdem, "*Autonomy and Relatedness in Cultural Context, Implications for Selt and Family*", Journal Of Cross-Cultural Psychology, Vol. 36No. 4, July 2005 403-422 DOI: 10.1177/0022022105275959, <http://jcc.sagepub.com/>, diakses tanggal 24-1-2017, pukul 11.30
- Malta, Husain "*Konglomareasi Internasional*", <http://jurnal-ekonomi.org/> diakses tanggal 13-7-2016 pukul 11.05.
- Martono, Budi, 1994, "*Penataan Berkas dalam Manajemen Kearsipan*". Jakarta: Sinar Harapan.
- Miguel Nin˜o-Zarazu' a, "*Aid, Education Policy, And Development*", <https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-development/most-downloaded-articles>, diunduh tanggal 20-1-2017, jam 23.10.
- Ogunlela, Gabriel Oyebanjo and Lawrence Mpele Lekhanya, "*Problems and Perspectives in Management*, Volume 14, Issue 1, 2016, <http://businessperspectives.org/>, diakses tanggal 13-7-2016 pukul 10.40.
- Perna, Laura W., Kata Orosz, dan Zakir Jumakulov, "*Understanding the human capital benefits of a government-funded international scholarship program: An exploration of Kazakhstan's Bolashak program*" International Journal of Educational Development, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059315000528> diunduh tanggal 27-1-2017, pukul 00.05.
- Rokhmatun, Burhanudin Dwi, 2012, "*Profesi Kearsipan, Memahami Profesi Kearsipan, karakteristik dan Syarat, Ketrampilan dan Pengetahuan, Kompetensi dan Kode etik Arsiparis*". Yogyakarta: Panduan.
- Sasrawan, Hedi. "*Pengertian Desa*", <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-des-a-artikel-lengkap.html?m=1>, diunduh tanggal 20-01-2017, pukul 20.00.
- Simamora, Janpatar, "*Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik*" Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Volume X Nomor 1 Tahun 2013.
- Soedjatmoko, 1980, "*Kesadaran Sejarah dan Pembangunan*", dalam Soemartini, ed. *Arsip dan Sejarah*, Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Sudrajat, Tatang. "*Konteks Politik Penataan Kelembagaan Negara*", Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan dan Praktik Administrasi Volume XIII Nomor 1 April 2016.
- Sugeng, 2016, "*Peran Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang baik, Good Governance*", Materi Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana S1 STISIP Kartika Bangsa yang tidak diterbitkan. Yogyakarta.
- Sugeng, Y., 2007, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". Malang: Universitas Widya Gama.
- Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono, 2005, "*Manajemen Kearsipan Modern*".
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja AR., 1984, "*Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*". Jakarta: Gunung Agung.
- Wicaksono, Kristian Widya, 2006, "*Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*". Yogyakarta: Graha Ilmu.

http://stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=748: konteks-politik-penataan-kelembagaan-negara&catid=70:volume-xiii-no1-tahun-2016&Itemid=63, diunduh 24-1-2017, pukul 22.15.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diunduh tanggal 20-1-2017 pukul 20.10.

Wawancara:

Wawancara dengan Fatimah Umar, pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, 14 Januari 2017.

**MENELUSURI JEJAK UGM DALAM GERAKAN REFORMASI INDONESIA
DARI SUMBER ARSIP STATIS KHAZANAH ARSIP UGM**

Musliichah, A.Md. S.IP., M.A.

Arsip Universitas Gadjah Mada

(musliichah@ugm.ac.id)

INTISARI

Peristiwa reformasi yang membawa perubahan besar dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia dapat digunakan sebagai proses pembelajaran. Mempelajari masa lalu bisa menjadi proses pembelajaran. Sejarah akan lebih efektif sebagai proses pembelajaran apabila tidak hanya sekedar dibaca tetapi dikaji dan diteliti. UGM sebagai universitas perjuangan yang lahir di kancan revolusi menjadi bagian dari alat perjuangan Bangsa Indonesia, terpanggil turut serta dalam gerakan perjuangan pada masa reformasi. Berdasarkan sumber-sumber arsip khazanah Arsip UGM dapat digambarkan gerakan reformasi yang terjadi di UGM, mencakup elemen-elemen yang terlibat di dalamnya yaitu dosen, mahasiswa, lembaga UGM, dan unit kerja UGM, serta karyawan; serta bentuk-bentuk kegiatan reformasi yaitu aksi demonstrasi, kajian, penyelenggaraan forum-forum ilmiah, menyampaikan sikap, penyampaian rekomendasi, dan pemberitaan.

Kata kunci: aksi reformasi, arsip statis, sumber sejarah, UGM

ABSTRACT

Events reforms brought major changes in the history of the Indonesian nation can be used as a learning process. Studying the past can be a learning process. History will be more effective as a learning process where not only read but studied and researched. UGM as universities struggle born in the midst of a revolution becomes part of the Indonesian nation struggles tool. UGM called to participate in the reform movement during the struggle. Research based on Arsip UGM Archives can be described what happened reform movement in the UGM; elements that are involved in it (student, lecture, UGM institutions and UGM units, and employees); and forms of reform activities like demonstrations, research, organization of scientific forums, statement, recommendations, and media announcement.

Keywords: archives, historical sources, reform action, UGM

PENGANTAR

Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada masa yang sangat sulit yaitu dalam kancan revolusi perang kemerdekaan. Kondisi UGM saat berdiri pada masa revolusi nasional adalah terjadi blokade yang sangat hebat, jumlah dosen jumlah sangat sedikit, alat-alat perkuliahan sangat sederhana, dan serba kekurangan. Segala keterbatasan dan kekurangan ini tidak menghalangi perjuangan UGM. Berkat

keuletan, kebijaksanaan dan ketulusan hati para pembangun dan pendukungnya, UGM berhasil didirikan. Pada tahun 1951 dinyatakan bahwa dalam diri UGM telah mulai tampak sifatnya sebagai sebuah pusat kebudayaan kebangsaan, sebagai sebuah bukti keuletan, kecerdasan, dan keluhuran Bangsa Indonesia. (Keputusan Presiden No. 253 Tahun 1951).

UGM lahir dalam kancah revolusi sebagai salah satu alat perjuangan Bangsa Indonesia. UGM sebagai universitas kerakyatan, universitas kebudayaan, dan universitas pancasila selalu diharapkan kontribusinya dalam pergerakan perjuangan Bangsa Indonesia. Tumbangnya orde baru diawali dengan gerakan reformasi. Gerakan yang muncul di awal tahun 1998 tersebut menjadi salah satu sejarah penting perjalanan Bangsa Indonesia. Lahirnya gerakan reformasi dipelopori oleh aksi mahasiswa UGM yang dilakukan terus-menerus sejak bulan Maret 1998. Aksi tersebut terus meluas, mendapat dukungan dari UGM baik para dosen maupun Pimpinan UGM. (Purwanto, dkk., 1999:124).

Peristiwa bersejarah yang terjadi sejak 19 tahun lalu dan berlangsung selama beberapa tahun tersebut tentu telah terdokumentasi dalam berbagai bentuk rekaman informasi/arsip. Rekaman jejak pergerakan UGM tersebut menjadi aset penting dalam proses pembelajaran bangsa Indonesia. UGM sejak tahun 2004 telah memiliki lembaga kearsipan perguruan tinggi bernama Arsip UGM. Tugas dan tanggung jawab Arsip UGM di antaranya adalah mengelola arsip-arsip statis terkait UGM yang dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Menelisik kembali sejarah perjalanan UGM dalam gerakan reformasi dari sumber-sumber sejarah yang ada di Arsip UGM menjadi salah satu upaya untuk refleksi dan introspeksi perjalanan perjuangan Bangsa, serta mengkaji sumber-sumber sejarah terkait reformasi yang dapat digunakan sebagai *guide* oleh para sejarawan, politikus, maupun peneliti bidang keilmuan lainnya.

UGM sebagai universitas perjuangan yang lahir dalam kancah revolusi menjadi salah satu elemen penting dalam gerakan perjuangan Bangsa Indonesia. Penelitian ini ingin mengetahui keterlibatan UGM dalam gerakan reformasi Indonesia, unsur-unsur UGM yang terlibat dalam gerakan tersebut dan sekaligus untuk mengetahui sumber-sumber sejarah terkait reformasi yang ada di UGM.

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran UGM baik secara kelembagaan maupun pribadi para sivitas akademika UGM dalam gerakan reformasi di Indonesia;
2. Mengetahui sumber-sumber sejarah terkait UGM dalam gerakan reformasi yang ada di Arsip UGM;
3. Menyediakan sumber informasi berbasis arsip dari khazanah arsip statis Arsip UGM (*guide* tematis tentang reformasi).

Metodologi

Objek penelitian ini adalah UGM baik secara kelembagaan maupun pribadi sivitas akademika UGM. Fokus penelitian ingin menganalisis tentang keterlibatan UGM dalam gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yaitu menyajikan pembahasan tentang peristiwa atau fenomena sosial yang melibatkan manusia yang hanya terjadi satu kali. (Kanumoyoso, 2017:5). Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan penentuan tema sejarah, pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi/penulisan sejarah (Kanumoyoso, 2017:5-44). Sumber untuk penelitian ini menggunakan sumber asli dan sumber primer berupa khazanah arsip statis yang ada di Arsip UGM, serta bahan pustaka yang relevan. Kritik sumber dilakukan secara ekstern dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber seperti dari arsip tekstual, arsip foto, dan pemberitaan media. Kritik sumber intern tidak dilakukan karena sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah khazanah arsip statis Arsip UGM (lembaga kearsipan perguruan tinggi di lingkungan UGM) sehingga telah terjamin otentisitasnya.

Penelitian ini membatasi pencarian sumber sejarah/heuristik pada sumber asli dan sumber primer hanya dari khazanah arsip statis Arsip UGM. Limitasi penelitian ini akan berakibat penyajian penulisan sejarah kurang lengkap dan komprehensif karena hanya ditulis berdasarkan sumber sejarah yang ada di Arsip UGM. Namun demikian, hal ini dilakukan dengan maksud khusus yaitu ingin menyajikan kajian sejarah yang sekaligus dapat menjadi *guide* tematis Arsip UGM tentang reformasi.

Kerangka Pemikiran

Mempelajari masa lalu bisa menjadi proses pembelajaran. Sejarah akan lebih efektif sebagai proses pembelajaran apabila tidak hanya sekedar dibaca tetapi dikaji dan diteliti (Kanumoyoso, 2017:5). “Tanpa kombinasi sejarah dan teori kita tidak mungkin bisa memahami masa lalu maupun masa kini.” (Burke, 2003:27). Oleh Karena itu, sejarawan dan teori sosial saling melengkapi, seperti yang dilakukan antropologiwan sosial, terutama Clifford Geertz dan Marshall Sahlins, yang memasukkan dimensi sejarah dalam kajian-kajiannya (Burke, 2003:25). Hal yang mendasari hubungan sejarah dengan teori sosial adalah cepatnya perubahan sosial sehingga yang mereka kaji adalah tentang perubahan dari waktu ke waktu dengan kata lain mengkaji sejarah (Burke, 2003:26-27). Sejarah tidak hanya sekedar menyajikan fakta-fakta sejarah tetapi juga memberikan makna atas fakta tersebut. Tidak ada sejarah yang dapat diinterpretasikan tanpa teori dan keyakinan metodologik implisit yang berkaitan satu sama lain yang memungkinkan untuk melakukan seleksi, evaluasi, dan bersikap kritis. (Thomas Khun dalam Maliki, 2012:17). Teori gerakan sosial yang dibawa oleh Habermas memberikan perspektif baru yang lebih luas karena menjelaskan asal gerakan ini dan dampak struktural yang akan ditimbulkan. (Agger, 2012: 356-357).

Gerakan reformasi yang digulirkan oleh kekuatan massa hingga membawa perubahan besar bagi Bangsa Indonesia merupakan gerakan sosial. Gerakan sosial (*social movement*) dalam Kamus Istilah Politik (Muhaimin, dkk. 1985:77) merupakan tindakan atau perbuatan terencana dengan beberapa derajat kesinambungan yang dilakukan oleh suatu kelompok secara terorganisir, dipersatukan oleh tujuan yang sedikit banyak terbatas, disertai program yang terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai perlawanan. Reformasi diartikan sebagai perbaikan terhadap suatu kesalahan, ketidakefisienan atau sesuatu yang tidak diinginkan secara perlahan-lahan, untuk menciptakan moral, kebiasaan, atau metode yang lebih baik (Muhaimin, dkk. 1985:228).

Peristiwa gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia dan berhasil menumbangkan orde baru merupakan bagian dari sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut telah membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting dalam proses pendewasaan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Meneliti dan mengkaji peristiwa reformasi menjadi salah satu upaya proses pembelajaran tersebut. Pengkajian sejarah reformasi dapat memanfaatkan sumber-sumber sejarah berupa arsip.

Pengungkapan dan penulisan sejarah tidak lepas dari peran serta para sejarawan. Kegiatan dilakukan melalui proyek-proyek penulisan sejarah militer, sejarah populer, sejarah lisan, dan sebagainya. Usaha lainnya yang berkontribusi dalam mengungkap sejarah adalah penerbitan arsip yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Upaya pemanfaatan arsip untuk mengungkap sejarah telah dilakukan tetapi masih banyak sebenarnya informasi sejarah yang tersimpan dalam arsip tetapi belum diketahui dan diungkap oleh khalayak. Oleh karena

itu, perlu adanya sinergi antara lembaga pengelola sumber informasi (lembaga kearsipan) dengan para sejarawan untuk membentuk jaringan informasi penulisan sejarah serta tukar menukar informasi (Kuntowijoyo, 1994).

Arsip, khususnya arsip statis, memiliki nilai guna sekunder yang mengandung nilai sejarah. Nilai tersebut meliputi:

1. Nilai *evidential* yaitu nilai guna yang menunjukkan keberadaan suatu organisasi atau lembaga serta bukti prestasi intelektual.
2. Nilai informasional yaitu informasi yang menunjukkan/membuktikan adanya suatu peristiwa bersejarah.
3. Nilai intrinsik yaitu nilai yang melekat (*inherent*) pada fisik arsip.

Lembaga kearsipan yang meliputi lembaga kearsipan pusat, lembaga kearsipan propinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi merupakan lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola arsip-arsip statis sebagai sumber sejarah. Lembaga kearsipan ini tidak hanya mengolah dan menyimpan arsip, tetapi juga harus mengembangkan program pemanfaatan dan pendayagunaan arsip untuk layanan publik (UU No. 43 Tahun 2009). Lembaga kearsipan berfungsi juga sebagai pusat informasi berbasis arsip. Pusat informasi menurut Simpson (Laksmi, dkk., 2011:70) adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan menyediakan data-data dan informasi yang terseleksi. Tujuan didirikannya pusat informasi menurut Evans (Laksmi, dll., 2011:70) adalah sebagai lembaga yang membantu transfer informasi dan perkembangan pengetahuan. Pusat informasi tidak hanya menangani dokumen saja tetapi juga data dan informasi di dalamnya. Artinya, tugas dan tanggung jawab tidak hanya pada penataan fisik semata tetapi juga pengolahan dan penyajian isi informasinya (Weisman dalam Laksmi, dkk., 2011:71).

PEMBAHASAN

UGM menyatakan dirinya sebagai Universitas terbesar di Indonesia sehingga merasa terpanggil untuk selalu tampil ketika menyaksikan peliknya berbagai persoalan Bangsa Indonesia. Hal ini telah menjadi tradisi yang terus dikembangkan oleh UGM. Dua dasawarsa setelah kemerdekaan Indonesia terjadi persoalan adanya usaha-usaha untuk menggantikan Pancasila yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara. UGM melalui pakarnya, Prof. Mr. Notonagoro, mengeluarkan karya monumental hasil penelitian yang menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai *taadsfundamental norm*. Karya Prof. Mr. Notonagoro tersebut kemudian menjadi landasan berpijak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Siaran Pers UGM 23 September 2003).

Peran UGM dalam upaya menangani krisis kehidupan berbangsa dan bernegara kembali ditunjukkan ketika Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap pimpinan Orde Baru. Masalah ini disusul dengan krisis ekonomi tak berkesudahan yang akhirnya menuntut reformasi di segala bidang pada tahun 1998. Menghadapi hal ini UGM kembali tampil menyuarakan aspirasi rakyat dengan reformasi damai. UGM mendukung empat hal yang menjadi tuntutan reformasi. Pertama, amandemen UUD 1945 yang dianggap memberikan *powerful presidency*. Kedua, penegakan hukum yang diwujudkan dalam membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, demokratisasi yang diejawantahkan dengan mencabut paket 5 undang-undang politik. Keempat, penghapusan dwi fungsi ABRI (Siaran Pers UGM 23 September 2003). UGM merupakan sebuah institusi besar yang didalamnya terdiri dari berbagai elemen. Keterlibatan UGM dalam gerakan reformasi tentu melibatkan elemen-elemen yang ada di UGM tersebut.

Dosen

Sivitas akademika UGM khususnya dosen secara pribadi banyak terlibat dalam gerakan reformasi ini. Salah satu bentuk keterlibatan para dosen ini adalah menjadi Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Pembentukan tim tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 198 Tahun 1998 tertanggal 7 Desember 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Dasar pertimbangan pembentukan tim ini adalah perkembangan arus reformasi terus meluas ke berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim yang bertugas merumuskan rekomendasi kebijaksanaan antisipatif untuk mempersiapkan berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Tim ini terdiri dari Dewan Penasehat, Tim Pelaksana, Kelompok Reformasi Ekonomi, Kelompok Reformasi Teknoindustri, Kelompok Reformasi Politik, Kelompok Reformasi Kelembagaan, Kelompok Reformasi Sosial Budaya, dan Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan.

Tim ini disebut sebagai Tim Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugas pokok tim ini adalah:

1. Menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta perkiraan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa;
2. Melakukan telaah dan kajian perkembangan global jangka menengah dan jangka panjang dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya serta berbagai peluang dan dampak terhadap kepentingan nasional;
3. Menyusun makalah (konsepsi) kebijaksanaan (*policy papers*) tentang perkiraan arah perkembangan transformasi tersebut untuk disampaikan kepada presiden; dan

4. Merumuskan rekomendasi serta pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi menuju masyarakat madani.

Tim ini beranggotakan tokoh-tokoh yang berintegritas dari berbagai bidang. Sivitas akademika UGM yang masuk dalam tim tersebut adalah:

1. Sofian Effendi sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana
2. M. Dawam Rahardjo sebagai Koordinator Kelompok Reformasi Ekonomi
3. Bambang Sudibyo sebagai Anggota Kelompok Reformasi Ekonomi
4. Ichlasul Amal sebagai Anggota Kelompok Reformasi Politik
5. Agus Dwiyanto sebagai Anggota Kelompok Reformasi Kelembagaan
6. Sjafrin Sairin sebagai Anggota Kelompok Reformasi Sosial Budaya
7. Erman Rajagukguk sebagai Anggota Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan.

Hasil kerja dari Tim Nasional tersebut dapat ditelusur dari khazanah arsip statis yang tersimpan di Arsip UGM adalah:

1. Kelompok Reformasi Politik yang dikoordinatori oleh Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pertemuan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 1999 di Jakarta. Pertemuan untuk konsolidasi tim dengan membahas tentang pemahaman tugas Kelompok Reformasi Politik dilanjutkan dengan curah pendapat. Pertemuan tersebut merumuskan:
 - a. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama Kelompok Reformasi Politik adalah:
 - 1) Bagaimana Indonesia yang baru akan diwujudkan dari dimensi politik?
 - 2) Paradigma apa yang akan digunakan dalam transformasi politik menuju masyarakat madani?

- 3) Analisa perkiraan strategis dari kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang akan ditempuh.
- b. Hasil pembahasan agenda akan dituangkan dalam *policy paper* yang akan disampaikan pada Presiden tanggal 26 Februari 1999. *Policy Paper* yang berhasil disusun oleh Kelompok Reformasi Politik diberi judul “Mengaktualkan Cita-Cita Republik: Reformasi Politik Menuju Masyarakat Madani”. *Paper* ini memberikan rekomendasi berupa:
- 1) Perlu peningkatan etika dan tata karma politik yang menghargai nilai-nilai kesetaraan serta ketaatan azas;
 - 2) Kesadaran elite dan massa terhadap arti pentingnya aturan main dan supremasi hukum harus dilembagakan;
 - 3) Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara bukan hanya ditujukan kepada massa, tetapi lebih ditujukan kepada elite;
 - 4) Manajemen diharapkan cukup lentur disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat Indonesia demi menjamin proses perubahan secara bertahap dan damai;
 - 5) Perlu langkah konkrit dalam membangun rasa percaya diri sebagai bangsa;
 - 6) Mendorong media massa untuk terus meningkatkan profesionalismenya;
 - 7) Perlu penerapan secara konsisten paradigm baru peran sosial politik ABRI demi membangun simpati publik terhadap pentingnya pengembangan profesionalisme TNI.
 - 8) Proses dialog hendaknya menjadi acuan semua pihak, baik intraelite maupun antara elite dan massa.
2. Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan

Salah satu anggota kelompok ini adalah Albert Hasibuan (Alumni UGM). Salah satu hasil kajian tim ini adalah mengajukan amandemen UUD 1945 dan pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung. Hasil kajian dan rekomendasi ini disampaikan di hadapan Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI pada tanggal 15 Juni 1999 di Jakarta. Hasil kajian amandemen UUD 1945 di antaranya berisi lima penyebab ketidakberhasilan UUD 1945, beberapa kekosongan dalam UUD 1945, tata cara pembaharuannya, materi pembaharuan UUD 1945, dan pengembangan konsepsi UUD 1945. Materi kedua yaitu tentang usulan gagasan pemilihan presiden melalui pemilihan langsung dijabarkan melalui landasan dan pokok pikiran pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung dan implikasi pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung terhadap UUD 1945 (Bahan presentasi Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan, 1999).
 3. Kelompok Reformasi Ekonomi

Kelompok ini diketuai oleh M. Dawam Rahardjo (UGM). M. Dawam Rahardjo selaku koordinator menyusun naskah akademik berjudul “Masyarakat Madani” sebagai bahan kajian untuk merumuskan usulan dan rekomendasi reformasi di bidang ekonomi. (Berkas reformasi, Rahardjo, tt)

Pada tahun 1999 Presiden BJ Habibie mengeluarkan Kepres No. 18 Tahun 1999 tertanggal 24 Pebruari tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Kepres ini diterbitkan untuk mengubah dan menyempurnakan susunan tim dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja tim. Dalam

perubahan tim ini, tokoh-tokoh UGM masih tetap diangkat sebagai tim baik sebagai koordinator maupun anggota.

Prof. Ichlasul Amal bersama dengan 8 tokoh lainnya yaitu Prof. Dr. Emil Salim, Prof. Dr. Moh. Kamil Tadjudin, Prof. Dr. Saparinah Sadli, Prof. Miriam Budihardjo, Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Dr. Todung Mulya Lubis, Dr. Daniel Dhakidae, dan Dr. Akmal Taher; secara bersama-sama mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Reformasi Pemilu yang berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan Borobudur No. 8. Terkait dengan proses pendirian yayasan tersebut kemudian 9 tokoh ini pada tanggal 9 September 1999 memberikan kuasa kepada Dra. Smita Notosusanto, MA. untuk menandatangani akte pendirian dan mewakili proses-proses lainnya (Berkas Reformasi 1999).

Kelembagaan: Sumbangan Gagasan

Kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah menjadi salah satu cara UGM untuk mengawal jalannya reformasi. Pada tanggal 14 Maret 2004, UGM mengeluarkan Deklarasi Dialog Kebangsaan: Program Aksi Meluruskan Aksi Reformasi. Deklarasi ini berisi sumbang saran dan kritik UGM dan para alumni yang terpanggil untuk mengawal perjalanan bangsa dalam pelaksanaan reformasi. UGM dan para alumni memandang telah terjadi kelambanan dan ketidakjelasan arah reformasi. Oleh karena itu, UGM menawarkan konsep yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam merumuskan program aksi reformasi. Enam poin yang dapat dijadikan pegangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reformasi tetap berpijak pada semangat percaya diri dan semangat kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila.
2. Reformasi ekonomi, sosial, dan budaya merupakan keniscayaan yang harus ditempuh melalui aktualisasi kepemimpinan bangsa yang hanya dapat dihasilkan melalui pemilu yang

jujur, adil, dan bersih. UGM dan alumni menghimbau segenap unsur bangsa untuk menjaga agar pemilu berjalan jujur, adil, dan bersih.

3. Presiden terpilih dalam menjalankan tugasnya harus mengemban amanat untuk melaksanakan program-program aksi reformasi yang dilandasi dengan semangat kebangsaan dan disiapkan dengan partisipasi seluruh komponen bangsa.
4. Pengembangan pendidikan harus berpilar pada pengembangan harga diri dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus membumi dan mengakar pada kepentingan bangsa.
5. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi prasarat mutlak bagi keberlanjutan reformasi. Perlu adanya keteladanan pemimpin bangsa di setiap lapisan yang didukung gerakan moral anti KKN.
6. Reformasi menuntut penguatan jati diri dan moral bangsa dengan penataan ulang kelembagaan dan hukum yang berkeadilan.

(Deklarasi Dialog Kebudayaan: Program Aksi Meluruskan Reformasi, 2004)

Tahun 2004, UGM menyusun konsep sebagai masukan kepada Presiden RI dalam rangka mengawal jalannya reformasi. Masukan tersebut disusun dalam sebuah buku dengan judul "Curah Gagasan Masyarakat Kampus: Rekomendasi untuk Presiden". Buku ini berisi masukan-masukan untuk Presiden RI di bidang sosial budaya, hukum, politik dan pemerintahan, ketahanan bangsa, pendidikan, ekonomi, riset dan tekno-industri, dan hubungan luar negeri. Buku ini disunting oleh sebuah tim yang terdiri dari Sofian Effendi, Marwan Asri, Marsudi Triatmodjo, Purwo Santoso, Siggih Hawibowo, Suryo Baskoro, Supra Wimbari, Eddy O.S. Hiariej, Armaidy Armawi, Nizam, Fahmi Rady, dan Siti Muti'ah Setyawati (Effendi, 2004).

Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik menuangkan ide dan gagasan serta kritik-kritik sosial politik dalam bentuk tulisan. Kumpulan tulisan-tulisan tersebut di antaranya dibukukan dengan judul “Kampus Biru Menggugah”. Buku ini diterbitkan oleh Kafisipolgama pada tahun 2004. Beberapa tema kritik dan gagasan yang terangkum dalam buku tersebut di antaranya tentang demoralisasi bangsa dalam perspektif media, jabatan presiden, demokrasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, korupsi, partai politik, desentralisasi keuangan daerah, otonomi daerah, terorisme, dan hubungan internasional (Bandoro dkk., 2004).

Kelembagaan: Pernyataan Sikap

UGM secara kelembagaan telah beberapa kali menyampaikan pernyataan sikap UGM dalam menghadapi kondisi Bangsa Indonesia saat reformasi bergulir. Tanggal 13 Mei 1998, sebelum terjadi tragedi aksi demonstrasi tanggal 18 Mei yang menimbulkan jatuh korban, UGM mengeluarkan pernyataan sikap. Pernyataan ini disampaikan oleh sebuah forum yang bernama “Forum Komunikasi Akademisi UGM”. Melihat kondisi krisis bangsa yang semakin larut dan berharap korban rakyat dapat diatasi, forum ini dengan memohon rida dan rahmat Allah mengajukan 4 sikap sebagai berikut:

1. Menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto;
2. Mendorong dan mendukung segala upaya pembentukan lembaga nasional yang independen dalam rangka pergantian kepemimpinan nasional yang aman dan damai;
3. Mendukung sepenuhnya gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan mengutuk segala bentuk kekerasan;
4. Menghimbau seluruh masyarakat agar tidak melakukan pengrusakan/tindakan anarkis. (Pernyataan Sikap Forum Komunikasi Akademisi UGM, 1998).

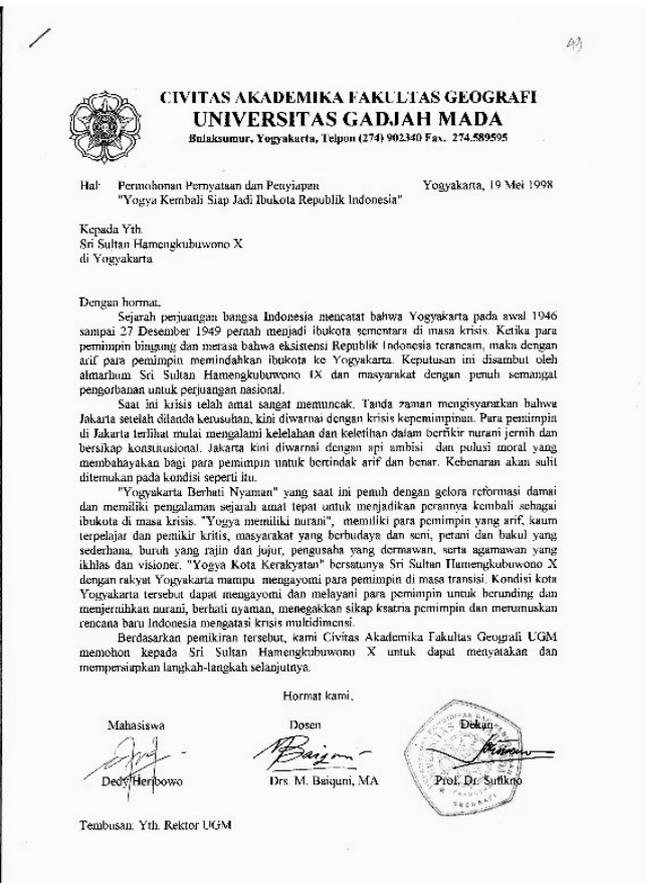
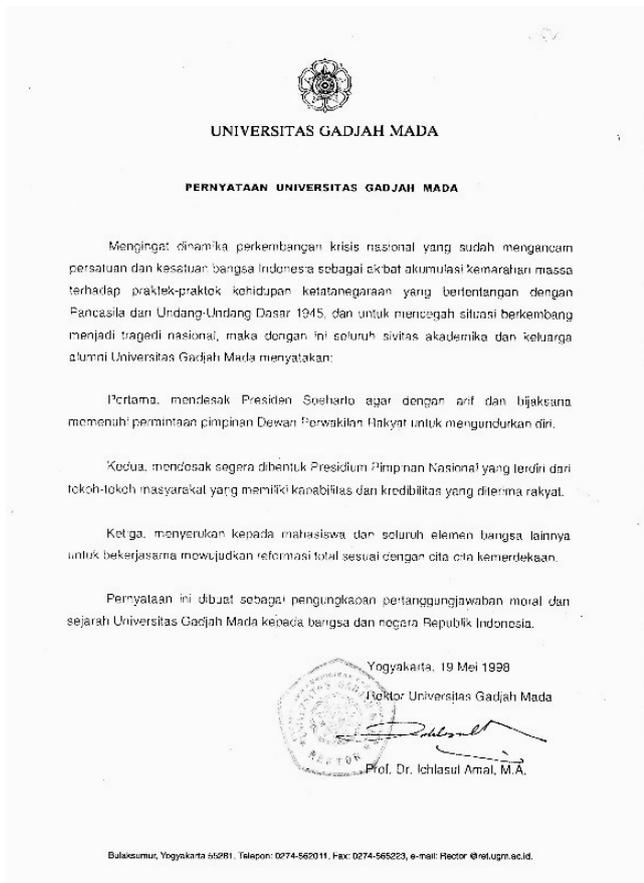
Forum Komunikasi Akademisi UGM pada

tanggal 18 Mei 1998 kembali membuat curah gagasan yang berjudul “Tidak Ada Reformasi Tanpa Perubahan Kepemimpinan Nasional”. Curah gagasan berupa tulisan 2 lembar halaman ini berisi beberapa sikap dan gagasan. Forum ini menyatakan memberikan penghormatan pada bendera setengah tiang, bukan sebagai hari berkabung nasional atau simbol permulaan kesedihan dan duka nestapa Bangsa Indonesia. Penghormatan bendera setengah tiang dimaksudkan oleh Forum Komunikasi Akademisi UGM, pertama sebagai bentuk ingin merasakan bahwa kesedihan ibu pertiwi telah sampai pada titik nadirnya dan bendera setengah tiang yang dikibarkan pada tanggal 18 Mei 1998 merupakan pertanda akan batas-batas kesabaran yang perlu ditoleransi. Kedua, bendera setengah tiang diartikan sebagai simbol semangat dan vitalitas bagi mahasiswa dalam perjuangan mereka untuk reformasi dan perubahan yang lebih hakiki. Penghormatan bendera setengah tiang bukan hanya ingin menyatakan bahwa para akademisi UGM bersama dengan para mahasiswa yang tengah berjuang untuk perubahan dan reformasi, tetapi juga mendorong para mahasiswa agar mereka tidak surut semangatnya sampai cita-cita reformasi tercapai. Namun demikian, akademisi UGM juga ingin mengingatkan gerakan perjuangan mahasiswa harus dilandasi prinsip perjuangan tanpa kebencian dan kekerasan, sebab dua prinsip itulah yang akan menjamin bahwa perjuangan mereka bernilai secara moral, anggun, dan suci. Ada dua hal yang harus direnungkan dengan sungguh-sungguh. Pertama, sangat penting untuk memahami paham mahasiswa yang menuntut reformasi total dan radikal akibat ketidakpercayaan pada kepemimpinan nasional sehingga menuntut adanya pergantian kepemimpinan nasional. Kedua, sikap mahasiswa ini meskipun tidak populer di mata penguasa, tetapi tetap tidak masalah karena akademisi UGM bekerja bukan semata-mata untuk kekuasaan atau untuk memperoleh keuntungan

dari kekuasaan. Justru yang harus dilakukan adalah saling mengingatkan untuk selalu memilih sikap tanpa pamrih, ikhlas, dan tidak mengharapkan apapun dari hasil perjuangan reformasi ini kecuali peningkatan matabat dan kesejahteraan seluruh rakyat. Sikap dan gagasan ini dibuat oleh Forum Komunikasi Akademisi UGM sebagai bentuk aksi keprihatinan yang dilakukan di Bulaksumur tanggal 18 Mei 1998 (Forum Komunikasi Akademisi UGM, 1998).

UGM secara resmi kelembagaan melalui Rektor UGM pada tanggal 19 Mei 1998 mengeluarkan pernyataan sikap dalam menyikapi krisis nasional yang mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Isi pernyataan sikap UGM tersebut adalah, pertama mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kedua, mendesak segera dibentuk Presidium Pimpinan nasional. Ketiga, menyerukan kepada mahasiswa dan seluruh elemen bangsa untuk bekerjasama mewujudkan reformasi total. Pernyataan tersebut dibuat sebagai bentuk pengungkapan pertanggungjawaban moral dan sejarah UGM kepada Bangsa dan Negara RI (Pernyataan UGM 1998).

Pernyataan sikap sebagai bentuk pertanggungjawaban moral menghadapi kondisi kritis saat itu juga dilakukan oleh fakultas di UGM. Sivitas akademika Fakultas Geografi UGM pada tanggal 19 Mei 1998 melayangkan surat kepada Sri Sultan HB X yang intinya memohon Sultan HB X membuat pernyataan Yogyakarta siap menjadi Ibu Kota Republik Indonesia dan menyiapkan segala persiapannya. Hal ini didasari atas keprihatinan kondisi Jakarta yang tidak kondusif sehingga para pemimpin sulit untuk berfikir jernih dan konstitusional. Yogyakarta dinilai sebagai tempat yang tepat untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia karena Yogyakarta berhati nyaman penuh dengan gelora reformasi damai. Yogyakarta memiliki nurani terbukti para pemimpinnya arif, memiliki kaum terpelajar dan pemikir kritis, dan masyarakatnya berbudaya. Yogyakarta kota kerakyatan karena bersatunya Sri Sultan HB X dengan rakyat Yogyakarta dapat mengayomi dan melayani para pemimpin untuk berunding dan menjernihkan nurani sehingga dapat merumuskan rencana baru Indonesia dalam mengatasi krisis multidimensi. Permohonan ini dilakukan dengan mengingat sejarah masa lalu yang telah membuktikan bahwa Yogyakarta telah menyelamatkan Indonesia pada saat krisis perjuangan tahun 1946 – 1949 dengan menjadi Ibu Kota RI (Surat Sivitas Akademika Fakultas Geografi UGM, 1998).



Gambar 1. Surat Pernyataan Sikap UGM dalam Reformasi
 Sumber: Khazanah Arsip Statis Arsip UGM

Forum-Forum Ilmiah

Tradisi ilmiah turut mewarnai gerakan reformasi di UGM. Banyak forum-forum ilmiah diselenggarakan untuk membahas, mengkaji, dan merumuskan jalannya reformasi. Beberapa forum ilmiah yang diselenggarakan di antaranya, tanggal 27 – 28 Januari 1999. UGM menyelenggarakan semiloka dengan tema “Refleksi Kritis terhadap Proses Reformasi”. Semiloka ini mengkritisi substansi reformasi dari berbagai bidang seperti globalisasi dan pembangunan ekonomi disampaikan T. Jacob, bidang ekonomi disampaikan Anggito Abimanyu, bidang hukum disampaikan Moh. Mahfud MD, refleksi reformasi multi dimensional disampaikan Ichlasul Amal, refleksi kritis jalannya reformasi disampaikan A.M.W. Pranarka, refleksi

reformasi dari tinjauan filsafat disampaikan Koento Wibisono Siswomihardjo (Kumpulan Makalah Semiloka Refleksi Kritis terhadap Proses Reformasi, 1999).

Tanggal 25-27 September 2003 bertempat di Ruang Sidang Balai Senat UGM diselenggarakan Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi. Seminar ini diikuti oleh 300 peserta dari akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, wakil Kagama, ketua partai politik, LSM, pers, dan berbagai institusi yang relevan. Seminar ini mengusung tema meluruskan jalan reformasi dari perspektif ideologi, moral dan pendidikan; sosial dan budaya; ekonomi; kebijakan sains dan teknologi untuk mendukung industri nasional; hukum, HAM dan demokrasi; dan *good governance* (Siaran Pers UGM 23 September 2003).

UGM menyelenggarakan Dialog Kebangsaan Program Aksi Meluruskan Reformasi pada tanggal 11 – 14 Maret 2004 di UGM yang dihadiri oleh 150 orang akademisi, alumni, dan praktisi. Dialog ini membahas hal-hal yang menjadi permasalahan krusial dalam mengawal jalannya reformasi. Dialog ini terdiri dari 5 komisi yaitu Komisi 1: Sosial Budaya, diketuai Sjafrin Sairin, Komisi 2: Pendidikan, diketuai oleh Kunto Wibisono, Komisi 3: Hukum yang Berkeadilan, diketuai Koesnadi Hardjasoemantri, Komisi 4: Ekonomi, diketuai oleh Mubyarto, Komisi 5: Pemerintahan, diketuai oleh Agus Dwiyanto, Komisi 6: Politik dan Hubungan Luar Negeri, diketuai oleh Sumaryo Suryokusumo, Komisi 7: Keamanan, diketuai Yahya Muhaimin.

Berbagai forum ilmiah membahas reformasi yang diselenggarakan merupakan panggilan UGM sebagai bukti pengabdian kepada bangsa. Hal ini disampaikan oleh Rektor UGM dalam sambutan pada acara Dialog Kebangsaan, seperti dikutip berikut ini :

“Mengenai UGM ini, Ir. Soekarno pernah menyatakan “Tanggal 19 Desember 1949 dipilih sebagai hari kelahiran UGM untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Meskipun telah diserang pada 19 Desember 1948 oleh Belanda tetapi dalam waktu satu tahun kita dapat membangun universitas. Universitas disamping pusat untuk mencerdaskan bangsa namun juga sumber inspirasi perjuangan bangsa”. Amanat tersebut yang menyebutkan bahwa UGM selain sebagai pusat mencerdaskan bangsa tapi juga dituntut untuk menjadi sumber inspirasi bangsa. Seminar Meluruskan Reformasi yang diikuti Dialog Kebangsaan Maret 2004, Konvensi Kampus Mei 2004 dan dialog ini merupakan jawaban apa yang diamanatkan Ir. Soekarno.” (Hardjasoemantri, 2004:98-99).

Forum-forum ilmiah yang membahas dan mengkaji reformasi tidak hanya diselenggarakan oleh UGM, tetapi juga oleh unit-unit kerja di lingkungan UGM.

1. P3PK menyelenggarakan Seminar Reformasi Negara Kepolisian atau Revolusi pada tanggal 7

Mei 1998;

2. MAP UGM menyelenggarakan Seminar Reformasi di dalam Administrasi Publik tanggal 16 Mei 1998;
3. Diskusi Panel Suksesi Kepresidenan dan Reformasi Hukum di Indonesia tanggal 28 Mei 1998;
4. Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) menyelenggarakan Seminar Internasional tentang Pendidikan Demokrasi dan Dialog Sipil-Militer pada tanggal 11 Juni 1998;
5. Pusat Studi Pancasila menyelenggarakan Diskusi Panel Pancasila dalam Perpektif Gerakan Reformasi tanggal 15 Juni 1998;
6. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM tanggal 29-30 Juni 1998 menyelenggarakan Seminar Strategi dan Upaya Penyusunan Agenda Politik dalam Reformasi;
7. PPH Kagama tanggal 8 Juli 1998 menyelenggarakan Seminar Nasional Refleksi atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai Dasar dan Arah Reformasi Nasional;
8. Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) UGM pada Tanggal 7 Juni 2003 menyelenggarakan seminar nasional di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta dengan tema “Reformasi Keuangan Darah: Teori dan Implementasi”.

Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa juga turut aktif dalam gerakan reformasi. Khazanah arsip statis yang ada di Arsip UGM tidak banyak yang menceritakan dan menggambarkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini dapat dipahami karena gerakan mahasiswa ini belum terdokumentasi dengan baik dan arsip-arsip bukti peristiwa gerakan reformasi dari kalangan mahasiswa ini belum diakuisisi. Beberapa sumber arsip yang ada

khususnya arsip foto, gerakan mahasiswa banyak dilakukan melalui aksi demonstrasi. Mahasiswa tidak hanya melakukan aksi turun ke jalan, tetapi juga terlibat dalam forum-forum ilmiah dan bergabung dengan aksi yang dilakukan oleh sivitas akademika UGM lainnya.

Sebuah buku sejarah yang ditulis dalam memperingati 50 tahun UGM, menyebutkan bahwa gerakan reformasi telah dipelopori oleh mahasiswa UGM sejak Maret 1998 melalui gerakan protes dan demonstrasi yang dilakukan terus menerus. Demonstrasi yang awalnya berskala kecil dan sporadis ini semakin meluas dan mendapat dukungan moral dari seluruh elemen kampus baik dosen

maupun pimpinan universitas (Purwanto, dkk., 1999:124). Berdasarkan foto-foto yang ada, mahasiswa UGM telah melakukan aksi demonstrasi menuntut perubahan sejak tahun 1996. Beberapa tuntutan mereka sama dengan agenda reformasi seperti menolak 5 paket UU (1996), dan menolak Soeharto sebagai Presiden RI hasil pemilu 1997 (1997).



Gambar 2. Demo Mahasiswa UGM Tahun 1996
Sumber: Khazanah Arsip Statis Arsip UGM



Gambar 3. Demo Mahasiswa UGM Tahun 1997
Sumber: Khazanah Arsip Statis Arsip UGM

Tanggal 3 dan 4 April aksi demonstrasi mahasiswa berujung bentrok dengan aparat keamanan yang mengakibatkan timbul korban dari pihak mahasiswa. Berbagai bahaya yang mengancam mahasiswa seperti jatuh korban dan penangkapan ratusan mahasiswa tidak meyurutkan laju gerakan mahasiswa. Hampir setiap hari mahasiswa UGM melakukan gerakan reformasi melalui berbagai cara seperti orasi, membangun tenda-tenda keprihatinan, hingga aksi mogok makan. (Purwanto, dkk., 1999:124-125).

Menanggapi semangat gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa ini, UGM secara kelembagaan dalam hal ini diwakili oleh Rektor UGM mendukung gerakan reformasi. Tepat pada tanggal 19 Mei 1998 saat terjadi peristiwa demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di antaranya di Yogyakarta, Rektor UGM mengeluarkan seruan dihadapan puluhan wartawan media cetak dan elektronik supaya aksi reformasi dilakukan dengan damai (Warta UGM, Mei 1998). Tanggal 20 Mei 1998 kembali dilakukan demonstrasi aksi reformasi di GSP UGM (sumber arsip foto No. AF4/SC.CR/1998-2H). Aksi-aksi tersebut juga didukung oleh dosen dan pegawai UGM.



Gambar 4. Mahasiswa UGM dan Pelajar Mengikuti Aksi Tahun 1998
Sumber: Khazanah Arsip Statis Arsip UGM



Gambar 5. Sri Sultan Hamengku Buwono X Menyampaikan Orasi dalam Aksi Tahun 1998
Sumber: Khazanah Arsip Statis Arsip UGM



Gambar 6. Dosen UGM Orasi dalam Aksi Tahun 1998
Sumber: Khazanah Arsip Statis Arsip UGM



Gambar 7. Pegawai UGM orasi dalam Demo 1998
Sumber: Khazanah Arsip Statis Arsip UGM

Gerakan ilmiah yang dilakukan mahasiswa UGM di antaranya Subiyantoro, Presiden Mahasiswa UGM Periode 1998/1999, menyampaikan makalah berjudul “Sedikit Saja tentang Reformasi Hukum” dalam dialog dengan peserta SPATI angkatan III di UGM tanggal 31 Oktober 1998. Mahasiswa Fakultas Geografi UGM juga terlibat dan turut serta menyatakan sikap mendorong Sri Sultan HB IX untuk menyatakan sikap Yogyakarta siap menjadi ibu kota RI. Surat sivitas akademika Fakultas Geografi yang dikirimkan ke Sri Sultan HB IX ini ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa, perwakilan dosen, dan Dekan Fakultas Geografi UGM.

Pemberitaan Media UGM

Warta UGM sebagai media komunikasi internal UGM yang diterbitkan oleh Bagian Humas UGM dalam beberapa edisinya memuat berbagai ulasan dan berita tentang reformasi. Warta UGM edisi Mei 1998 memuat berita dengan judul “Hanya dengan Melalui Reformasi Total, Kita Dapat Menciptakan Masyarakat Madani”. Berita ini merupakan ulasan peristiwa wisuda UGM periode III TA 1997/1998. Rektor UGM dalam sambutannya mengangkat tema tentang reformasi, dan judul berita tersebut merupakan kutipan dari pidato Rektor UGM. Warta UGM edisi Juli 1998 halaman pertama memuat berita berjudul “Reformasi Harus Konseptual, Gradual, Kontitusional, Terara, Terukur, dan Teratur. Berita ini berisi ulasan tentang kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ke UGM. Judul berita tersebut diambil dari isi sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan UGM saat bertemu dengan jajaran pimpinan UGM. Kabar UGM, sebagai tabloid dwi mingguan yang diterbitkan UGM pada edisi Oktober 2003 pada halaman pertama memuat berita berjudul “Bila UGM Menyikapi Jalan Reformasi”. Berita ini berisi kegiatan Seminar Nasional Meluruskan Jalan Refomasi yang diselenggarakan UGM.

KESIMPULAN

Berbagai sumber sejarah tentang reformasi yang ada di Arsip UGM menunjukkan bahwa UGM terlibat aktif dalam gerakan reformasi. Elemen-elemen yang terlibat dalam gerakan reformasi tersebut meliputi seluruh sivitas akademika UGM dan UGM secara kelembagaan. Elemen-elemen tersebut meliputi dosen, mahasiswa, karyawan, dan kelembagaan UGM. Para dosen UGM baik secara pribadi berperan dalam gerakan reformasi tergabung dalam Tim Nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan reformasi Indonesia, maupun dengan mendirikan organisasi sosial yang turut mengawal jalannya reformasi. Mahasiswa menjadi pelopor dalam gerakan reformasi ini dan gerakan mahasiswa ini akhirnya meluas dan mendapat dukungan dari seluruh sivitas akademika UGM. Karyawan UGM juga ikut dalam gerakan reformasi dengan ikut aksi demonstrasi dan turut menyampaikan orasi. Bentuk keterlibatan lainnya adalah dengan munculnya pemberitaan di media UGM yang dikelola oleh karyawan UGM seperti Warta UGM yang mengangkat topik berita tentang reformasi. Pemberitaan ini tentu diharapkan dapat menjadi api semangat gerakan reformasi yang diperjuangkan UGM. UGM secara kelembagaan mendorong gerakan reformasi dengan memberikan dukungan, kesempatan, dan fasilitas kepada seluruh sivitas akademika untuk aktif terlibat dalam gerakan reformasi ini. Secara kelembagaan bukti dukungan UGM terhadap gerakan reformasi diantaranya diwujudkan dengan pernyataan sikap UGM. Kelembagaan ini bukan hanya tingkat universitas tetapi juga tingkat unit kerja yang ada di UGM seperti fakultas dan pusat studi.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai taktik gerakan reformasi cukup beragam. Demonstrasi, mendirikan tenda keprihatinan, dan mogok makan adalah taktik yang banyak digunakan oleh mahasiswa. Pernyataan sikap dan membuat forum-forum ilmiah (dialog, seminar, semiloka)

pembahasan reformasi merupakan taktik yang dilakukan oleh UGM dan unit kerja (fakultas dan pusat studi) secara kelembagaan. Bentuk gerakan lainnya adalah melakukan kajian untuk merumuskan konsep dan rekomendasi kemudian hasil tersebut kemudian disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah dan terlibat dalam tim nasional reformasi, maupun mendirikan yayasan sosial. Penggunaan media tidak luput dari bagian gerakan reformasi. UGM menggunakan media baik media yang dikelola UGM maupun media massa untuk menyampaikan pesan-pesan reformasi dan publikasi reformasi. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada di Arsip UGM terlihat bahwa gerakan telah dimulai sejak tahun 1996 berupa demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi-aspirasi yang akhirnya menjadi tuntutan reformasi seperti pencabutan 5 UU yang dianggap membelenggu demokrasi dan penolakan Soeharto sebagai Presiden hasil pemilu 1997.

Sumber-sumber sejarah terkait reformasi ini khususnya yang menunjukkan keterlibatan UGM dalam gerakan reformasi banyak tersimpan di Arsip UGM. Sumber-sumber sejarah tersebut berupa sumber asli (arsip asli), sumber primer (hasil repro/penggandaan arsip), dan sumber sekunder (penyampaian peristiwa yang disampaikan oleh bukan pelaku utama). Bentuk sumber-sumber sejarah tersebut meliputi arsip tekstual (surat menyurat, pernyataan sikap, siaran pers, kliping media, makalah, hasil kajian) arsip foto kegiatan-kegiatan ilmiah dan demonstrasi, dan arsip rekaman suara hasil *oral history programme*.

DAFTAR PUSTAKA

Agger, Ben. 2012. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Cetakan ke tujuh. Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Albar, Muhammad Wasith dan M. Fauzi. 2017. *Penulisan Sejarah*. Kemdikbud, Jakarta.

Bandoro, Adik Bantarso, Eddie Siregar, M. Yogyanto. 2004. *Kampus Biru Menggugah*. KAFISIPOLGAMA: Yogyakarta.

Burke, Peter. 1993 *History and Social Theory*. Cetakan Pertama, Cornell University Press, New York. Terjemahan Mestika Zed dan Zulfami, 2003, *Sejarah dan Teori Sosial*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Effendi, Sofian. 2004. *Curah Gagas Masyarakat Kampus: Rekomendasi untuk Presiden*. Edisi ke 2. UGM Press, Yogyakarta.

Kanumoyoso, Bondan. 2017. *Metode Sejarah*. Kemdikbud, Jakarta.

Laksana, dkk. 2000. *Permainan Tafsir Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru*. Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Laksmi, Tamara Adriani Sosetyo-Salim, Ari Imansyah. 2011. *Manajemen Lembaga Informasi: Teori dan Praktik*. Penaku, Jakarta.

Maliki, Zainuddin. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. UGM Press, Yogyakarta.

Muhaimin, Jahja, dkk. 1985. *Kamus Istilah Politik*. Depdikbud, Jakarta.

Purwanto, Bambang., Djoko Suryo, dan Soegijanto Padmo. 1999. *dari Revolusi ke Reformasi: 50 Tahun Universitas Gadjah Mada*. UGM, Yogyakarta.

Sumber Arsip

- Keputusan Presiden RI No. 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (AS3/SC.RF/2)
- Siaran Pers UGM Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reormasi (AS3/SC.SP/3)
- Hasil Pertemuan Kelompok Reformasi Tim Nasional Reformasi (AS3/SC.RF/4)
- Bahan Presentasi Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan Tim Nasional Reformasi Tahun 1999 (AS3/SC.RF/3)
- Hasil Dialog Komisi Kebangsaan: Program Aksi Meluruskan Jalan Reformasi, 2004 (AS3/SC.RF/7)
- Deklarasi Dialog Komisi Kebangsaan: Program Aksi Meluruskan Jalan Reformasi, 2004 (AS3/SC.RF/7)
- Kumpulan Makalah Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, 2003 (AS/SC.RP.04/17)

8. Kumpulan Makalah Dialog Kebangsaan Program Aksi Meluruskan Reformasi, 2004 (AS/SC.RP.04/19)
9. Curah Gagas Masyarakat Kampus: Rekomendasi untuk Presiden, 2004. (AS/SC.RP.04/18).
10. Kumpulan Makalah Semiloka Refleksi Kritis terhadap Proses Reformasi, 1999. (AS/PP.MS/304)
11. Warta UGM Mei 1998 (AS/PA.WU/40)
12. Warta UGM Juni 1998 (AS/PA.WU/41)
13. Kabar UGM No. 21/Tahun I/1 Oktober 2003 (AS/PA.KU/15)
14. Foto-foto demonstrasi aksi reformasi di UGM
15. Foto-foto kegiatan ilmiah reformasi di UGM

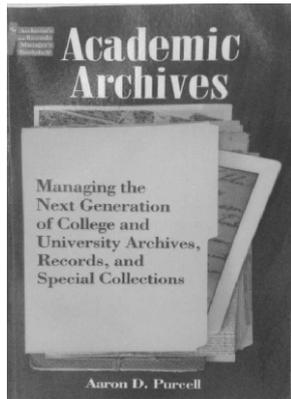
RESENSI

ACADEMIC ARCHIVES: MANAGING THE NEXT GENERATION OF COLLEGE AND UNIVERSITY ARCHIVES, RECORDS, AND SPECIAL COLLECTIONS

Suprayitno, S.I.P.

PNS Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta

(manager.records@gmail.com)



Judul : *Academic Archives: Managing Next Generation of College and University Archives, Records, and Special Collections*
Penulis : Aaron D. Purcell
Penerbit : Neal-Schuman, Chicago
Tahun : 2012
Halaman : 277
ISBN : 978-1-55570-769-9

Sampai tahun 2008, sudah ada 5 buah bibliografi kearsipan yang membahas tentang Arsip Universitas/Perguruan Tinggi (*University Archives*) yaitu: *College and University Archives: Selected Readings* dari SAA (1979); *The Management of College and University Archives* karangan William J. Maher (1992); *Varsity Letters: Documenting Modern Colleges and Universities* karangan Helen Samuels (1992); *College and University Archives: Readings in Theory and Practice* karangan Christopher Prom dan Ellen Swain; dan “Campus Case Studies” dari SAA (2008). Dari kelima referensi di atas, yang membahas secara rinci tentang manajemen arsip perguruan tinggi adalah Maher (1992) dan Samuels (1992). Maher mendefinisikan arsip universitas secara eksklusif dengan berangkat pada makna ontologis arsip itu sendiri yang *official*, sementara Samuels lebih menekankan pada dokumentasi total di lingkungan perguruan tinggi. Konteks zaman ketika

kedua pengarang ini menyusun buku adalah saat belum dikenalnya “Archives 2.0” yaitu media arsip sudah tidak kertas lagi, melainkan *web*, dan fokus utamanya adalah pengguna, teknologi, standardisasi, advokasi, *assessment*, *engagement*, dan *openness* (hm. 245).

Istilah *Archives 2.0* dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis *Web 2.0* dan *social media*, seperti blogs, *Facebooks*, *Twitter*, dan *Flickr*. *Archives 2.0* menekankan pada *openness* dan *flexibility*. Arsiparis era *Archives 2.0* dituntut lebih mengutamakan pengguna, bukan arsip itu sendiri, serta peka pada potensi penggunaan teknologi untuk berbagi (*sharing*) koleksi, berinteraksi dengan pengguna, serta melakukan perbaikan efisiensi internal. Jangkauan pendekatan kearsipan *Archives 2.0* meliputi preservasi arsip-arsip dinamis (*records*) yang diciptakan oleh *bloggers*, serta penggunaan *tools* berbasis 2.0 lainnya. Arsiparis *Archives 2.0*

dituntut lebih aktif dalam komunitasnya, bukan pasif; ikut terlibat menginterpretasikan koleksinya, bukan sekadar menjadi penjaga (*custodian*) netral; serta melakukan advokasi terhadap program dan profesi kearsipan.

Berangkat dari tantangan *Archives 2.0* inilah, Aaron D. Purcell mendefinisikan arsip maupun arsiparis perguruan tinggi (Purcell memilih istilah arsip akademik dan arsiparis akademik) lebih inklusif. Bila definisi *university archives* sebelumnya mengacu pada program arsip universitas yang mengumpulkan, melestarikan dan menyediakan akses materi arsip untuk mendokumentasikan sejarah universitasnya, bidang arsip akademik jauh lebih ekspansif dan kompleks. Dalam buku ini Purcell menempatkan arsip akademik di bawah perpustakaan akademik dengan mengintegrasikan sistem informasi dari berbagai repositori di lingkungan perguruan tinggi. Purcell menyarankan bahwa arsip universitas di-*merger* dengan bagian koleksi khusus yang ada di perpustakaan pusat universitas. Begitu juga istilah arsiparis akademik tidak lagi sebatas *archivists* yang hanya mengelola arsip statis di perguruan tinggi, melainkan lebih inklusif meliputi profesi-profesi lainnya seperti *records manager*, pustakawan koleksi khusus, *reference archivist*, *manuscript processor*, kurator koleksi, dan para ahli buku-buku langka (hlm. 21).

Purcell menggunakan istilah *archives*, *records*, dan *special collections* pada awalnya sesuai dengan definisi tradisional, namun khusus untuk *special collections* diartikan lebih inklusif. *Archives* (arsip statis) merupakan arsip-arsip dinamis (*records*) yang terpilih dan dinilai karena bernilai guna historis yang ada di lingkungan akademik/perguruan tinggi. *Records* (arsip dinamis) dalam buku ini tidak

didefinisikan secara jelas, namun selalu dikaitkan dengan *records management* yang dapat diartikan sebagai rekaman informasi yang *official* atau dalam rangka kegiatan di lingkungan perguruan tinggi. Pada penjelasan tentang *special collection*, Purcell awalnya menyitir definisi tradisional dalam bidang kepustakawanan, yakni sebagai koleksi-koleksi di perpustakaan selain koleksi utama (buku, terbitan berkala, publikasi ilmiah, dan sebagainya). Beberapa yang termasuk dalam koleksi khusus (*special collections*) dalam perpustakaan meliputi buku-buku langka, foto-foto historis, serta koleksi audio visual.

Dengan perkembangan Web 2.0 yang menuntut *openness and engagement*, Purcell mendefinisi *special collections* tidak sebatas *rare books*, tetapi juga naskah, arsip statis (*archives*), arsip dinamis (*records*), koleksi berbasis subjek, serta arsip audio-visual (Hlm. 63). Di sinilah, tampak bahwa Purcell ingin menekankan kolaborasi arsip (baik *archives* maupun *records*) dengan koleksi khusus dalam payung Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Buku ini membahas *big-picture*, isu-isu pekerjaan praktis arsiparis akademik dan mengelola *next generation* program-program arsip akademik. Buku *Academic Archives* ini tidak fokus pada arsip universitas semata, tetapi mengkonseptualisasikan arsip akademik lebih luas, dengan fokus tertentu pada penggabungan (*merger*) unit kerja di perpustakaan perguruan tinggi, seperti unit koleksi khusus. Tema-tema dalam buku ini meliputi pilihan karier dalam arsip akademik, bekerja dengan profesional informasi lainnya dalam perpustakaan akademik, pengintegrasian fungsi-fungsi manajemen arsip dinamis, membangun koleksi dengan kerja sama para pendonor, pameran materi unik ke khalayak umum,

pendekatan pengolahan dan pengelolaan koleksi organisasi, peluang-peluang digital, peranan arsiparis pada perpustakaan akademik abad ke-21, serta mendefinisikan apa itu arsiparis akademik.

Buku ini terdiri atas 3 bagian. Pada bagian pertama, *Archives and the Academic Environment* terdiri atas 3 bab (Bab 1-3). Bab 1 membahas tentang pengantar dan definisi arsip akademik, serta peluang dan tantangan arsiparis akademik. Purcell melihat tantangan arsiparis akademik dari data A*CENSUS di mana ternyata dari hasil survei tersebut jumlah responden yang menjawab, jumlah arsiparis akademik persentasenya cukup banyak (36%) di samping arsiparis pemerintahan (32%). Dalam survei tersebut juga dijelaskan bahwa mayoritas arsiparis akademik mempunyai harapan menjadi bagian aktif dalam komunitas ilmiah, disertai dengan adanya pengembangan profesi dan pendidikan lebih lanjut.

Bab 2 membahas tren-tren terkini dalam perpustakaan akademik dan bagaimana perkembangan TIK telah mendefinisikan ulang peran perpustakaan universitas di seputar kehidupan mahasiswa, fakultas dan peneliti. Pemahaman akan perpustakaan akademik menjadi sangat penting dalam memahami arsip akademik. Bab 3 lebih fokus pada koleksi khusus, seperti koleksi naskah (manuskrip), arsip institusional, bahan-bahan cetakan, dsb. Koleksi khusus saat ini telah menjadi inti pekerjaan arsiparis akademik karena di antaranya berfungsi sebagai tempat instruksional inovatif, *public program*, *event*, dan pameran, serta poin sentral untuk riset ilmiah.

Bagian kedua, *Building and Updating an Academic Archives Program* terdiri atas 6 bab (Bab 4-9). Bab 4 membahas pendekatan praktis dalam menjaga dan memelihara misi serta menuliskan visi arsip akademik. Arsiparis akademik yang sukses

harus menunjukkan kepemimpinan yang luas, mengelola dan berbagi sumber daya, selalu mengikuti perkembangan, mengidentifikasi *stakeholders*, serta menargetkan pengguna koleksi dan jasanya.

Bab 5 berbicara tentang manajemen arsip dinamis. Program manajemen arsip dinamis adalah bagian krusial dalam arsip akademik. Arsiparis dituntut untuk dapat bekerjasama dengan para unit kerja di lingkungan perguruan tinggi dalam menjamin keutuhan arsipnya karena hulu dari arsip akademik adalah pengelolaan arsip dinamis yang praktiknya ada di berbagai unit-unit kerja.

Kebijakan koleksi yang kuat bisa membendung masuknya koleksi-koleksi yang semestinya bukan *core* dari khazanah arsip akademik. Pada Bab 6 dijelaskan mengapa dan bagaimana arsiparis akademik menentukan cakupan koleksinya serta sumber daya internal dan eksternal yang mungkin menjadi target akuisisinya. Sumber-sumber ini dapat mendokumentasikan berbagai fungsi kampus yang lebih luas, beserta sejarahnya, serta topik-topik historis non-kampus lainnya yang mendukung misi lembaga, kurikulum, serta program arsipnya.

Bahasan mengenai pengolahan dan pengelolaan koleksi ada pada Bab 7. Bahasan ini meliputi tahap-tahap *accessioning*, prosedur pengolahan koleksi secara umum, dan cara arsiparis akademik mengelola koleksi dan ruangnya. Aktivitas “di balik layar” ini juga meliputi kegiatan preservasi dan konservasi, sekuritas, *disaster planning*, dan pembuatan sarana temu-balik arsip.

Layanan publik dan penelitian dibahas pada Bab 8. Bahasannya antara lain meliputi pendefinisian ulang rujukan, *classroom instruction*, interaksi virtual, proses penelitian, pameran dan *event*, serta *outreach* dan advokasi.

Bab 9 membahas tentang *digital frontiers* dan tantangan elektronis terhadap arsip akademik. Mudah-mudahan akses informasi secara elektronik mengharuskan arsiparis akademik beradaptasi dengan pergeseran dan keusangan informasi. Kemampuan arsiparis akademik dalam *melek* TIK menjadi tantangan dan peluang dalam pelayanan publik dan *outreach*.

Pada bagian terakhir, *The Future of Academic Archives*, hanya terdiri atas 1 bab (Bab 10). Bab ini meninjau ulang tren-tren yang sedang terjadi di arsip akademik dan menggambarkan masa depan pada bidang-bidang garapan arsip akademik. Perubahan teknologi, kebutuhan riset, dan peranan perpustakaan akademik di lingkungan kampus adalah faktor signifikan dalam memahami tren-tren mendatang. Seperti pada judul buku ini, ada kata *next generation*, buku ini berbicara tentang masa depan. Arsip akademik saat ini lebih dari sekadar repositori sejarah institusi dan arsip-arsip resmi. Misi dari arsip akademik telah meluas meliputi pengumpulan berbagai format dan bidang penelitian, serta menjangkau kalangan peneliti yang lebih luas dan menuntut arsiparis akademik berperan aktif melayani kebutuhan informasi komunitas kampus. Generasi mendatang program arsip akademik akan dibangun berdasarkan kemajuan teknologi, koleksi *born-digital*, kemitraan kolaboratif yang berbagi

sumberdaya, serta skill arsiparis profesional dengan pengalaman dan pelatihan yang lebih luas.

Nilai-nilai arsiparis akademik generasi mendatang adalah:

1. *Colaborators, not cooperators*
 2. *Technical specialists, not generalists*
 3. *Entrepreneurs, not participants*
 4. *Teachers, not instructors*
 5. *Activists, not promoters*
 6. *Measuring outcomes, not statistics*
 7. *Looking outward more than inward*
- (hlm. 246).

Bila dilihat dari jumlah halamannya (277 hlm.), buku ini tidak terlalu tebal, tetapi isinya padat. Buku ini layak dibaca oleh arsiparis dan pustakawan di lingkungan perguruan tinggi secara khusus. Khusus untuk arsiparis perguruan tinggi, buku ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Bila dikaitkan dengan kondisi Indonesia, di mana tren arsip perguruan tinggi baru muncul beberapa tahun yang lalu, dan budayanya masih dipengaruhi kearsipan ala pemerintahan pada umumnya, buku ini bisa menjadi pemantik untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bila rekan serumpun kita, pustakawan perguruan tinggi sudah lama bergaul dengan tren-tren *Library 2.0*, sudah siapkah arsiparis perguruan tinggi beradaptasi dengan *Archives 2.0*?

Biodata Penulis Jurnal
“Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan”
Volume 10 Nomor 1 Mei 2017



Adhie Gesit Pambudi, S.Sos, M.A. lahir di Wonosobo, 19 Desember 1983 dan menempuh pendidikan terakhir Master of Archival Studies di Universitas Leiden, Belanda. Bekerja di ANRI Tahun 2009 sampai dengan saat ini, pernah menjadi fungsional umum, arsiparis, dan sekarang menjabat sebagai pejabat struktural Eselon IV di lingkungan Sekretariat Utama. Anggota tim pengajuan Arsip KAA, GNB dan Tsunami sebagai *Memory of the World*. Selain bekerja sebagai PNS juga aktif sebagai pengurus di berbagai organisasi sebagai Ketua Bidang Seni dan Budaya KORPRI ANRI (2016-skrng), Koordinator Bidang Umum LSP-KI AAI (2015-sekarang), Ketua PPI Leiden (2011-2012), Koordinator Bidang Penelitian dan Publikasi IAA (2013–2015).



Arif Rahman Bramantya, S.S., M.A., Dosen Program Studi Kearsipan Sekolah Vokasi UGM sejak Tahun 2015. Menyelesaikan pendidikan S-1 Sastra Jepang di UGM pada Tahun 2010 dan S-2 Sejarah di UGM Tahun 2017. Berbagai karya tulisnya telah dipublikasikan baik melalui media massa koran, majalah, serta jurnal. Selain mengajar sebagai dosen juga aktif sebagai desainer grafis lepas, serta penerjemah lepas Bahasa Jepang - Indonesia. Meraih Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia pada Tahun 2016.



Drs. Burhanudin Dwi R, lahir di Bantul 7 Mei 1964. Bekerja sebagai arsiparis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan pengajar tidak tetap Program Studi D3 Kearsipan UGM. Berbagai karya tulis yang telah dipublikasikan seperti buku “Profesi Kearsipan, Pedoman Penataan Berkas” yang ditulis dengan Waluyo dan Titi Susanti. Serta “Essai- essai Persembahan Mengenang 100 Tahun Sang Raja Sri Sultan Hamengku Buwono IX” ditulis bersama penulis lain.



Musliichah, A.Md., S.I.P., M.A., Arsiparis UGM sejak tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan D-3 Kearsipan UGM Tahun 2001, menempuh pendidikan S-1 Administrasi Niaga di Universitas Terbuka pada Tahun 2002 namun tidak diselesaikan. Tahun 2005, ketika mulai bekerja sebagai arsiparis UGM melanjutkan studi S-1 Administrasi Negara di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Tahun 2014 menempuh studi lanjut S-2 Ilmu Komunikasi UGM guna mempelajari bagaimana cara 'mengkomunikasikan arsip'. Senang menulis pengalaman kearsipan yang diperoleh dari studi, praktik lapangan, maupun riset. Tulisannya telah dipublikasikan dalam berbagai buletin, jurnal, dan buku. Menjadi Juara 3 Lomba Karya Tulis Kearsipan Nasional ANRI Tahun 2002, Juara 3 lomba esai yang diselenggarakan oleh Globethics.net dan ICRS Tahun 2014. Juara 1 Lomba Karya Tulis Kearsipan Nasional ANRI Tahun 2015. Menjadi Juara 1 Arsiparis Berprestasi Nasional yang diselenggarakan Kemdikbud RI Tahun 2012 dan Juara 1 Arsiparsi Berprestasi UGM Tahun 2015.



Suprayitno, A. Md., S.I.P., PNS di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Alumnus Prodi Kearsipan UGM Tahun 2003, dan S-1 Ilmu Perpustakaan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Suka menulis tentang kearsipan, baik lewat blog pribadinya (<http://arsiparis.blogspot.com>) maupun media lainnya seperti di Buletin Khazanah Arsip UGM dan Jurnal Kearsipan ANRI. Pernah juara 2 nasional kategori umum pada lomba karya tulis kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI tahun 2008. Saat ini sedang menyelesaikan tesis pada Program Magister Arkeologi, peminatan Museology di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

RALAT

1. Gambar 2 pada halaman 61 menjadi gambar 3 pada halaman 62
2. Gambar 3 pada halaman 62 menjadi gambar 2 pada halaman 61.

KETENTUAN PENULISAN

1. Artikel belum pernah dipublikasikan dalam media lain dan tidak mengandung unsur plagiat dengan dilampiri pernyataan tertulis dari penulis.
2. Tulisan dapat berupa artikel hasil penelitian, kajian maupun konseptual (lepas) dan aplikasi teori, studi pustaka, uji coba laboratorium, hasil seminar dan laporan kasus atau resensi buku. Artikel dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia sepanjang 15-25 halaman termasuk daftar pustaka dan tabel, kertas A4 dengan margin atas dan kiri 4 cm, margin bawah dan kanan 3 cm dengan menggunakan tipe huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12, dan spasi 1,5.
3. Pada artikel dicantumkan nama penulis, apabila hasil penulisan kelompok maka urutan nama penulis harus sudah berdasarkan kesepakatan semua penulis. Nama Penulis ditebalkan dan dimiringkan menggunakan *Times New Roman* ukuran *font* 12.
4. Artikel harus disertai alamat penulis meliputi: Nama lembaga asal penulis serta alamat email. Penulisan alamat untuk penulis artikel menggunakan *Times New Roman* ukuran *font* 12 tetapi tidak ditebalkan dan tidak dimiringkan.
5. Artikel harus disertai dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah kata maksimum 200 kata, menggunakan *Times New Roman* ukuran *font* 12, spasi 1. Penulisan kata ABSTRAK untuk artikel berbahasa Indonesia dan ABSTRACT untuk artikel berbahasa Inggris menggunakan *Times New Roman* ukuran *font* 12 ditebalkan.
6. Pada artikel untuk Abstrak baik berbahasa Inggris maupun Indonesia harus disertai dengan *Keywords* menggunakan *Times New Roman* ukuran *font* 12 dengan spasi 1 serta huruf ditebalkan dan dimiringkan (*bold* dan *italic*) masing-masing terdiri 3-5 kata.
7. PENGANTAR ditulis huruf besar dan spasi 1,5 *Times New Roman* serta ditebalkan. Pengantar berisikan latar belakang masalah; hipotesis (bila ada); tujuan penelitian/kajian; dan pengantar mengacu pada beberapa pustaka yang menjadi landasan atau alasan penelitian/kajian. Tinjauan Pustaka tidak dituliskan pada bagian terpisah dari pengantar, artinya tinjauan pustaka masuk dalam PENGANTAR.
8. PEMBAHASAN ditulis dengan huruf besar *Times New Roman* ukuran *font* 12 dan ditebalkan. Pembahasan meliputi: sajian secara sistematis, hanya data/informasi yang terkait dengan tujuan penelitian/kajian. Tujuan PEMBAHASAN adalah untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian/kajian.
9. SIMPULAN diketik dengan huruf besar *Times New Roman* ukuran *font* 12 dan ditebalkan. Simpulan berisi kesimpulan dan saran yang melebur tidak berdiri sendiri.
10. Penulis dapat mengirimkan naskah disertai dengan *curriculum vitae* terbaru dalam bentuk *softcopy* kepada:
KHAZANAH
Jurnal Pengembangan Kearsipan
Arsip Universitas Gadjah Mada, Gedung L7, Lantai 3, Komplek Perpustakaan UGM
Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281
Tlp. 0274-582907, 6492151, 6492152, Fax 0274-582907
Email:khazanah@ugm.ac.id
11. Penyunting berhak menyeleksi dan mengedit naskah yang masuk. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan naskah didasarkan pada penilaian substansi dan urutan naskah yang masuk ke **KHAZANAH Jurnal Pengembangan Kearsipan**. Substansi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.

“ Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya.”
 (Sir Arthur Doughty, 1924)

SiKS

Sistem Informasi Kearsipan Statis

SiKS merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan pengguna-baik civitas akademika maupun publik-dalam memperoleh informasi khazanah kearsipan Arsip Univeritas Gadjah Mada, baik informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Tridharma sejak Universitas Gadjah Mada berdiri sampai saat ini, maupun informasi kearsipan lainnya yang tersimpan di Arsip universitas Gadjah Mada.

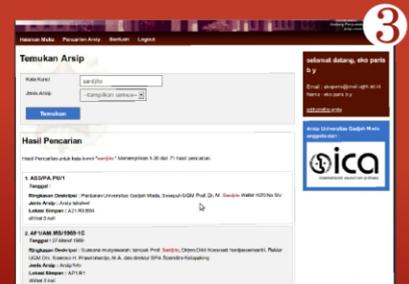
1 Akses
 SiKS dapat diakses dengan mengunjungi tautan :
<http://arsip.ugm.ac.id/siks>

2 Login
 - Civitas Akademika UGM dapat login dengan menggunakan Akun Email UGM.

- Pengguna Publik dapat login dengan mendaftarkan diri dahulu dalam aplikasi SiKS, gunakan tautan "daftar" dalam form login.

3 Pencarian Arsip
 - Setelah Login, SiKS akan menampilkan menu "Pencarian Arsip". Silahkan masukkan katakunci pencarian, pengguna juga bisa melakukan pencarian lebih spesifik pada koleksi arsip jenistertentu.

- Jika kata kunci yang anda cari sesuai dengan koleksi arsip dalam SiKS, aplikasi akan menampilkan daftar hasil pencarian.



ARSIP UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Gedung L7 Lantai 3, Komplek Perpustakaan UGM

Telp. (0274) 6492151, 6492152 | Fax. (0274) 582907 |

Email: arsip@ugm.ac.id | Website: <http://arsip.ugm.ac.id>